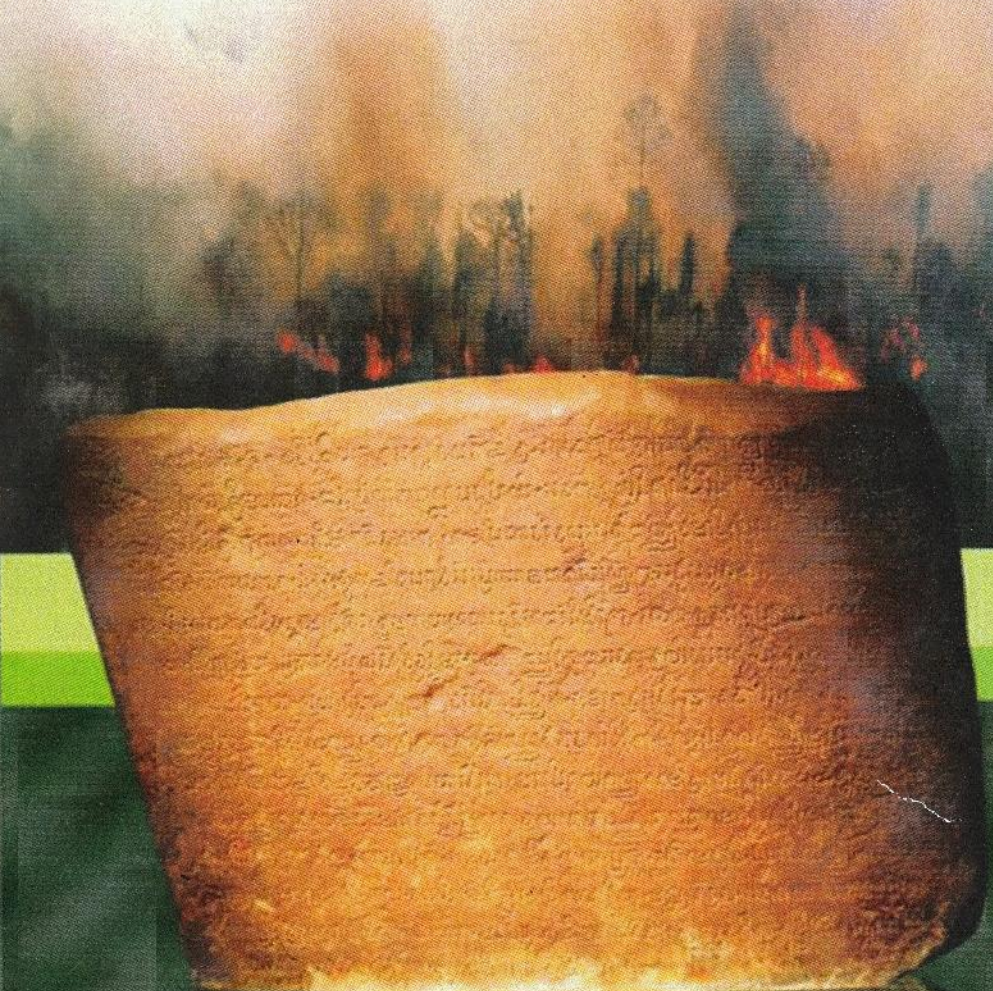


Dr. Yenrizal, M.Si.

RAFAHpress  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RAJAH MUDA PALEMBANG



*Nilai - Nilai*

**Lingkungan Hidup  
Pada Prasasti Talang Tuwo**

Perspektif Komunikasi Lingkungan

## KATA PENGANTAR

Sejarah bukan sekedar masa lalu. Peristiwanya memang sudah terjadi jauh hari, puluhan, ratusan dan bahkan ribuan tahun lalu. Tetapi banyak pihak yang menyadari bahwa sejarah bukan hanya untuk masa lalu. Slogan “jas merah”, jangan sekali sekali melupakan sejarah adalah kata penting untuk mengingatkan bahwa segala yang terjadi di masa lalu adalah hal penting untuk peradaban di masa depan. Peradaban selanjutnya dibangun tergantung pada bagaimana peristiwa masa lalu dirangkai dan dimaknai oleh generasi berikutnya.

Memaknai sejarah, itulah kata kunci terpenting. Sejarah mungkin hanya terlihat dari berbagai tinggalannya, artefak, situs, tulisan, perkataan, dan benda-benda fisik lainnya. Semua itu tidak akan memiliki makna apa-apa, tidak akan jadi apa-apa, jika hanya teronggok di museum atau tersimpan di rumah-rumah tua, terkubur di hutan-hutan, sawah-sawah, ladang-ladang, sungai atau bahkan di dasar laut. Terpenting adalah memaknai apa yang ada di balik benda fisik tersebut, dan kemudian merefleksikannya pada kondisi kekinian. Mengambil nilai-nilai penting dalam peristiwa sejarah ataupun tinggalan sejarah, adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tentu saja tidak semua nilai tersebut akan bisa dikatakan baik atau berguna, namun tidak sedikit pula tinggalan sejarah itu memiliki nilai yang sangat berharga.

Salah satu keunggulan dari para nenek moyang, leluhur di masa lalu adalah kemampuannya untuk merefleksikan situasi dan kondisi saat itu dalam kehidupan sehari-hari. Pada beberapa sisi, mereka juga memiliki kemampuan luar biasa untuk memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Kemampuan refleksi dan prediksi, membuat kehidupan dan tatanan sosial berjalan begitu dinamis dan harmonis. Kuncinya adalah keserasian dalam menjalin kehidupan dan berinteraksi dengan lingkungan secara harmonis.

Banyak kisah-kisah masa lalu yang menunjukkan bagaimana masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan setempat. Tradisi upah tanah di Muara Merang, Sumsel, adat tunggu tubang di Semende, metode penanggalan lokal, tradisi bertani dengan pola Subak di Bali, zonasi wilayah di Baduy, pola *melangun* di masyarakat Suku Anak Dalam, tradisi berburu di pedalaman Kalimantan, dan berbagai fakta-fakta masa lalu lainnya, sangat sarat dengan upaya-upaya adaptasi dan menjaga siklus lingkungan yang ada. Semua itu hanya untuk satu keinginan, bertahan hidup untuk saat ini dan diwariskan untuk anak cucu nantinya.

Lingkungan alam merupakan komponen utama untuk bisa bertahan hidup dan diwariskan pada generasi-generasi berikutnya. Itulah yang senantiasa dijaga dan dipelihara oleh nenek moyang di masa lalu. Tak terkecuali Kerajaan Sriwijaya, yang pernah jaya ribuan tahun lalu. Prasasti Talang Tuwo (ejaan T-U-W-O, bukan TUO), peninggalan berupa batu bertulis berbentuk fisik ini menunjukkan bagaimana sebuah kerajaan besar sudah memulai melakukan penataan lingkungan, tumbuhan, bendungan, kolam dan kesatuan dengan Sang Pencipta. Makna transedental dari alam, terlihat dan terwujud secara nyata pada prasasti tersebut.

Dalam hal ini penggunaan istilah TUWO (dengan W) mungkin sedikit membingungkan. Hal ini dijadikan pilihan karena Talang Tuwo sendiri adalah nama tempat, dan sesuai dengan pengejaan masyarakat Palembang yang menyebutkan kata Tuwo dengan TU-WO. Ini adalah pilihan diksi kata, yang menurut penulis sudah selayaknya dikembalikan sesuai pengejaan masyarakat Palembang<sup>1</sup>.

Talang Tuwo memang sudah digagas ribuan tahun lalu. Secara fisik ia pun tak ada di Sumsel, tapi di Museum Nasional Jakarta. Namun tidak bisa diabaikan bahwa Talang Tuwo berasal dan berakar dari kondisi masyarakat dan alam di Sumsel. Semua tanaman yang disebutkan dalam prasasti tersebut ditemui dan tumbuh di Sumsel.

---

<sup>1</sup> Untuk peristilahan ini, penulis harus mengucapkan terimakasih kepada budayawan dan juga jurnalis lingkungan hidup Taufik Wijaya, yang pertama kali menggagas sebutan Talang Tuwo sesuai diksi yang dipakai di masyarakat Palembang.

Masalahnya kemudian adalah Prasasti Talang Tuwo seakan-akan tercerabut dari realitas dan pemaknaan masyarakat. Tak semua orang Sumsel tahu dengan Talang Tuwo apalagi memahaminya. Nilai-nilai itu seakan sudah pudar dan prasasti tinggallah seonggok batu sebagai penguak kejayaan masa lalu. Maka terlihatlah bagaimana kemudian sungai-sungai ditimbun, rawa dijadikan bangunan ruko, bantaran sungai tak terlihat lagi, pertanian menjadi monokultur, tanaman endemik lokal hanya dijadikan tanaman pelengkap dan sebagian sudah hilang, maraknya penambangan batubara yang meninggalkan kerusakan lingkungan, pembukaan jutaan hektar kebun kelapa sawit dan kebun akasia untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), serta punahnya berbagai satwa dan fauna lokal. Ekspansinya adalah masalah lingkungan hidup yang menjadi ancaman terbesar. Semua masyarakat mengalami hal itu, kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, banjir, tanah longsor, adalah derita-derita yang timbul sebagai akibat dari perilaku yang memang tidak semestinya dilakukan.

Oleh karena itu, kajian yang dilakukan ini menyoroti sisi krusial tersebut. Prasasti Talang Tuwo memang sudah jauh ribuan tahun lalu. Makna penting prasasti tersebut tetap terlihat dan perlu untuk terus dimunculkan. Relevansinya sangat jelas dan itu harus dilakukan. Melalui kajian ilmu komunikasi, khususnya sudut pandang Komunikasi Lingkungan dengan pendekatan Analisis Wacana, berhasil memunculkan nilai-nilai penting dalam Prasasti Talang Tuwo. Hal ini terjabarkan secara rinci pada bagian khusus hasil riset ini. Hubungan penting Prasasti dengan realitas yang terjadi belakangan ini juga dibahas sebagai sebuah refleksi penting dalam upaya revitalisasi usaha pengelolaan lingkungan.

Laporan penelitian ini tentu saja tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Rektor UIN Raden Fatah, Kepala LP2M, Dr. Sefriyeni dan jajarannya, Dekan FISIP UIN Raden Fatah Prof Izomiddin dan Prof Amin Suyitno (dekan periode awal), Wakil Dekan I, II dan Kaprodi Ilmu Komunikasi FISIP UIN Raden Fatah, serta para dosen dan karyawan di FISIP UIN Raden Fatah adalah pihak-pihak yang secara

internal banyak membantu. Dari eksternal juga diucapkan terimakasih kepada Tim Restorasi Gambut Sumsel, Dr Najib Asmani, budayawan dan jurnalis lingkungan hidup Taufik Wijaya, Arkeolog Nurhadi Rangkuti, desainer Idris yang sudah merancang cover buku ini, Kemas Ari Panji, M.Si, sejarawan Sumsel yang banyak meluangkan waktunya untuk diskusi, serta para mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah. Terkhusus tentu saja kepada Henny Yusalia, M.Hum dan si kecil M Nabil Athalla yang terus setia membantu dan rela kehilangan waktunya. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

## **ABSTRAK**

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah realitas bahwa Prasasti Talang Tuwo adalah peninggalan bersejarah semasa kerajaan Sriwijaya, yang merupakan satu-satunya prasasti yang berbicara tentang lingkungan hidup dan penatan ruang. Prasasti ini dibuat semasa 684 M, dan diyakini masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Sampai saat ini, prasasti tersebut cenderung tidak dikenal masyarakat, padahal banyak nilai-nilai penting pada prasasti tersebut yang sangat relevan dengan berbagai persoalan lingkungan hidup yang ada. Untuk itu riset ini mencoba menguraikan nilai-nilai lingkungan hidup yang ada, sesuai dengan teks yang tertulis pada batu tersebut. Selain itu juga dijelaskan relevansi penting prasasti dengan kondisi yang ada. Kajian ini mengambil sudut pandang komunikasi lingkungan dengan perangkat analisis wacana. Secara metodologis, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan mengambil sisi-sisi pendekatan etnoekologi komunikasi. Kebanyakan data yang didapat bersumber dari bahan-bahan tertulis, hasil wawancara dan pengamatan pada lokasi ditemukannya prasasti. Pengamatan juga dilakukan pada kondisi lingkungan di Palembang dan Sumatera Selatan secara umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai lingkungan hidup yang memang sangat relevan dengan kondisi yang ada. Relevansi ini tampak dari berbagai isu lingkungan dan hubungan yang jelas dengan naskah pada prasasti.

## **ABSTRACT**

The background of this research is the reality that the Talang Tuwo Inscription is a historic relic during the Sriwijaya kingdom, which is the only inscription that talks about the environment and the spatial placement. This inscription was made during 684 AD, and is believed to still be very relevant to the current conditions. Until now, these inscriptions tend not to be known to the public, whereas many important values on the inscription are very relevant to various environmental issues that exist. For this purpose the research tries to describe the values of the existing environment, in accordance with the text written on the stone. It also explained the important relevance of the inscription to the existing conditions. This study takes the perspective of environmental communication with discourse analysis tools. Methodologically, this research is done by qualitative method and taking side of approach of ethnoecology of communication. Most of the data obtained comes from written materials, interviews and observations on the location of the inscription. Observations were also made on environmental conditions in Palembang and South Sumatra in general. The results of this study indicate that there are environmental values that are very relevant to the existing conditions. This relevance is evident from a variety of environmental issues and a clear relationship with the text on the inscription

## DAFTAR ISI

	Hlm.
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Daftar Isi	vii
Bab I Pendahuluan	1
a. Latar Belakang	1
b. Tinjauan Pustaka	6
c. Kerangka Teori	16
d. Metode Penelitian	22
Bab II Nilai dan Perspektif dalam Memandang Lingkungan Hidup	25
a. Nilai dan Etika Lingkungan Hidup	25
b. Perspektif dalam Memandang Lingkungan Hidup	40
c. Talang Tuwo dan Lingkungan Hidup	53
Bab III Sekilas Tentang Prasasti Talang Tuwo	56
a. Bermula dari Sri Baginda Sri Jayanasa	56
b. Petuah itu di Talang Kelapa	62
Bab IV Hasil dan Pembahasan	67
a. Nilai-Nilai Lingkungan Hidup pada Prasasti Talang Tuwo	67
b. Pola dan Struktur Pesan pada Prasasti Talang Tuwo	64
c. Relevansi Nilai-Nilai Lingkungan Hidup pada Naskah Prasasti Talang Tuwo	92
d. Prasasti Talang Tuwo dalam Perspektif Komunikasi Lingkungan	121
Bab V Penutup	134
a. Kesimpulan	134
b. Saran	135
Daftar Pustaka	136



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa Sumatera Selatan, atau tepatnya Palembang dulunya adalah pusat kerajaan Sriwijaya. Memang tidak ditemukan bukti bekas keraton atau kerajaan, tetapi banyak bukti penting lainnya yang menunjukkan eksistensi kerajaan besar tersebut. Berbagai peninggalan masa lalu yang diyakini dari Kerajaan Sriwijaya, diantaranya adalah Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Boom Baru, Prasasti Sabokingking, serta berbagai artefak lainnya. Penemuan-penemuan tersebut menjadi bukti kuat bahwa kerajaan Sriwijaya ada di Palembang pada abad ke 7 Masehi.

Selain prasasti, beberapa kalangan Arkeolog dalam aktifitas penggalian bukti sejarah ini, kerap sekali menemukan berbagai kepingan-kepingan keramik China, sisa bangkai perahu, tiang-tiang rumah jaman dulu. Menurut analisis Arkeologi, dengan melihat struktur, bentuk dan perkiraan usianya, diperkirakan memang ada di jaman Sriwijaya. Ini untuk menegaskan bahwa Sriwijaya sudah ada sejak dulu dan memang pernah ada di Sumatera Selatan. Bukti terkuat sebenarnya ada di prasasti, karena ada penjelasan tertulis yang dibuat kala itu.

Masing-masing prasasti memiliki titik fokus tersendiri, sesuai dengan teks yang tertulis pada prasasti tersebut. Prasasti Kedukan Bukit yang tertulis tahun 682 M<sup>1</sup>, merupakan prasasti yang berbicara tentang adanya kerajaan Sriwijaya. Sementara Prasasti Talang Tuwo yang dibuat tahun 684 M, khusus bicara soal tata ruang, lingkungan, dan kemakmuran. Masing-masing prasasti memiliki pesan tersendiri terkait dengan pesan yang dibawanya.

---

<sup>1</sup> Versi lain menyebut Prasasti Kedukan Bukit bertahun 683 M, lihat Muljana 2008.

Khusus untuk Prasasti Talang Tuwo, yang ditemukan Residen Palembang, Louis Constant Westenenk tanggal 17 November 1920<sup>2</sup>, disebutkan tentang Sri Baginda Sri Jayanasa yang mengatur dan menata wilayah kerajaan, khususnya dalam pembuatan Taman Sriksetra. Pada proses inilah disebutkan adanya keharusan untuk menata ruang, menata lingkungan, peruntukan lahan, sumber air, dan kegunaannya bagi seluruh masyarakat. Prasasti ini sendiri dalam bentuk awalnya menggunakan bahasa Melayu Kuno yang kemudian dialih bahasakan George Coedes di awal abad 20.

Keberadaan Prasasti Talang Tuwo pada satu sisi menunjukkan eksistensi kerajaan Sriwijaya, dan di sisi lain menunjukkan keharusan untuk peduli dan menata lingkungan. Isu lingkungan merupakan isu yang sangat strategis, sejak dari zaman dulu hingga sekarang. Terbukti bahwa tahun 684 M, Raja Sriwijaya sudah memikirkan hal itu. Pada saat sekarang, ini menjadi kontekstual karena fenomena kerusakan lingkungan, bencana alam, dan masalah-masalah terkait rusaknya penataan ruang sudah demikian parah dirasakan.

Fenomena masalah lingkungan ini bisa dilihat dari terjadinya banjir di kota Palembang setiap masuknya musim hujan yang memiliki kecenderungan semakin lama semakin meningkat. Di musim kemarau, fenomena kebakaran hutan dan lahan terus terjadi dan menimbulkan masalah kabut asap yang menguat. Hal yang sama terlihat pula bagaimana sesaknya wilayahnya Palembang akibat pembangunan perumahan dan pemukiman yang terus terjadi, menutupi daerah tutupan air dan menimbun rawa-rawa.

Beberapa kajian dan riset tentang lingkungan hidup serta tata ruang menyebutkan bahwa masalah lingkungan ini terjadi karena kesalahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang yang ada. Ini terbukti dari beberapa riset yang dilakukan oleh Sukenti (2008) tentang "Kearifan Lokal dan Perannya Terhadap upaya Pelestarian Lingkungan." Sukenti mengatakan bahwa pelestarian lingkungan sebenarnya sangat terkait dengan kearifan lokal yang

---

<sup>2</sup> Dalam keterangan lain, disebutkan bahwa yang menemukan awal sebenarnya adalah Alwi Lihan, petani penggarap kala itu. Penjelasan mengenai ini akan diterangkan di Bab III.

dimiliki masyarakat. Misalnya, pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lahan tercermin dari sistem pertanian sawah surjan (multicropping), yaitu petani membagi petak menjadi dua bidang, bidang tanaman padi di pinggir, sedangkan bidang tanaman palawija berada di tengah pada bagian yang agak tinggi. Pengetahuan ini merupakan tindakan yang rasional untuk mengatasi serangan banjir dan kekeringan, dan merupakan strategi beradaptasi dalam ekonomi dan mengatasi fragmentasi tanah.

Hal yang sama tampak pula dari berbagai prasasti yang ditemukan di beberapa tempat, khususnya di Jawa, yang menunjukkan bagaimana masyarakat memahami lingkungan sejak dulu. Ini sudah pernah dikaji oleh Utomo (2005), yang menyatakan bahwa beberapa prasasti yang ditemukan di Jawa Tengah menyebutkan adanya sistem pertanian sawah yang dijalankan pada masa itu, beserta organisasi sosial yang berkaitan dengan pengelolaan areal persawahan. Dari prasasti-prasasti yang ditemukan khususnya di Jawa Tengah di sekitar lereng dan kaki gunung api, dapat diketahui bahwa sistem pertanian ini merupakan sistem pertanian yang berkesinambungan.

Riset yang dilakukan Johan Iskandar (2012) tentang Ekologi Perladangan Orang Baduy, juga menunjukkan bahwa komunitas tradisional seperti Baduy di Provinsi Banten, melakukan berbagai hal sebagai bentuk kearifan tradisional mereka. Komunitas Baduy beraktifitas sesuai ritme alam yang ada, menyesuaikan kondisi, dan bertindak untuk melindungi lingkungan alam yang ada. Mereka melakukan zonasi-zonasi tertentu yang tujuannya adalah untuk melindungi ekosistem yang ada. Oleh karena itu, dilokasinya dibuat pembagian-pembagian khusus seperti hutan yang dikategorikan hutan larangan, daerah perladangan, daerah perkampungan, aliran sungai, daerah sumber air dan sebagainya. Ini adalah bentuk bahwa kondisi bentang alam harus dimaksimalkan, ditentukan penggunaannya semaksimal mungkin.

Riset-riset yang dilakukan diatas, sebenarnya lebih banyak dari aspek Antropologi, maupun ilmu pertanian. Sangat jarang dan bahkan belum ditemukan riset khusus dari perspektif komunikasi, yang melakukan tinjauan

terhadap makna lingkungan bagi masyarakat setempat, khususnya pada nilai-nilai kepercayaan lama. Padahal, makna inilah yang sejatinya harus dikedepankan, karena berkaitan dengan jati diri sebuah masyarakat.

Makna akan memiliki korelasi dengan budaya (Mulyana, 2001). Edwar T Hall sudah pula menyebut itu, bahwa komunikasi tidaklah bisa dilepaskan dari aspek budaya. Budaya dan komunikasi adalah dua hal yang saling berhubungan. Karenanya, makna itu terdapat dalam budaya dan budaya sendiri adalah bagian dari pemaknaan tersebut. Termasuk disini jika berhubungan dengan wilayah lingkungan. Makna akan sangat terasa sekali, karena disitulah pangkal masalahnya. Masalah lingkungan terjadi karena makna lingkungan yang diberikan padanya, dan itu adalah masalah komunikasi.

Berbagai kerusakan lingkungan maupun bencana akibat ulah manusia tersebut, dilihat dari perspektif komunikasi lingkungan sebenarnya adalah kesalahan pemaknaan terhadap lingkungan itu sendiri. Lingkungan harus dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan manusia yang merupakan satu sistem kehidupan tersendiri yang tidak terpisahkan. Fenomena ini adalah sesuatu yang integral, yang dalam bahasa Aldo Leopold (1949) disebut sebagai fenomena *land ethics*. Ini berseberangan dengan realitas yang selama ini disebutkan oleh Cartesian dengan paham Antropoethics. Cartesian cenderung memandang bumi dan segala sesuatunya adalah sebuah kesatuan yang dipergunakan untuk kepentingan manusia. Manusia adalah titik sentalnya, sehingga apapun dari lingkungan bisa diperuntukkan untuk manusia.

Penelitian yang dilakukan sekarang ini menjadi penting dan menarik, karena memang dilihat dari penjelasan di atas, bahwa (1) Prasasti Talang Tuwo adalah bukti sejarah awal yang membahas tentang penataan ruang dan lingkungan hidup. (2) Prasasti Talang Tuwo ada pada masa kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan terbesar di masanya, yang mampu menyatukan wilayah se Asia Tenggara, (3) kajian tentang makna lingkungan hidup di masa lalu, dengan menggunakan pendekatan analisis isi, khususnya dengan mencermati

peninggalan yang ada, sangat minim dilakukan. (4) Isu lingkungan hidup sangat kontekstual di masa ini, baik untuk Palembang ataupun Indonesia secara umum.

Oleh karena itulah, riset ini, dengan menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif, menjadi perlu untuk dilakukan. Altheide (1996:2) mengatakan bahwa analisis isi kualitatif disebut pula sebagai *Ethnographic Content Analysis* (ECA), merupakan kolaborasi analisis isi objektif dengan observasi partisipan. Dalam hal ini, dalam melakukan ECA peneliti berinteraksi dengan material-material dokumentasi atau bahkan melakukan wawancara mendalam sehingga pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dapat diletakkan pada konteks yang tepat untuk di analisis. Analisis isi kualitatif, yang menekankan pada kedalaman pemahaman terhadap isi sebuah teks, menjadi relevan dengan objek kajian, karena bisa menangkap dan menjelaskan makna-makna lain di dalam Prasasti Talang Tuwo.

Aspek analisis isi kualitatif kemudian ditempatkan pada sebuah kerangka berpikir besar tentang komunikasi lingkungan, dengan mengambil ide gagasan dari Florr (2004) dan AT Rambo (1984). Ini menjadi penting karena komunikasi lingkungan menjadi kajian strategis yang akan menjembatani pemahaman tentang hubungan manusia dengan lingkungan atau perspektif melihat lingkungan yang terhubung dengan naskah yang tertulis pada prasasti. Komunikasi lingkungan sebagai payung yang memberikan perspektif dalam kajian ini. Akan tetapi, tetap saja pada bagian tertentu diberikan sub bahasan khusus yang membicarakan tentang komunikasi lingkungan dan hubungannya dengan Prasasti Talang Tuwo.

Pertanyaan besar yang diajukan dalam penelitian ini adalah soal nilai-nilai lingkungan hidup dalam Prasasti Talang Tuwo dan kemudian memiliki relevansi dengan kondisi kekinian. Pertanyaan ini kemudian dirincikan menjadi beberapa pertanyaan lain yaitu,

1. Bagaimanakah nilai-nilai tentang lingkungan digambarkan pada Prasasti Talang Tuwo?

2. Bagaimanakah pola struktur teks/pola pesan tentang lingkungan pada Prasasti Talang Tuwo?

3. Bagaimanakah relevansi nilai-nilai lingkungan hidup pada naskah prasasti Talang Tuwo dalam konteks kekinian di masyarakat Palembang?

Pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab tersebut, selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan penelitian ini. Sementara itu, aspek-aspek yang diharapkan bisa mendatangkan manfaat bagi penelitian ini, terbagi atas manfaat secara teoritis dan praktis.

Secara teoritis penelitian ini bisa memperkaya kajian ilmu komunikasi, khususnya komunikasi lingkungan yang terkait dengan isu-isu lingkungan hidup di masa lalu, yang selama ini jarang menjadi bahan kajian. Selain itu diharapkan pula bisa bermanfaat bagi kajian analisis isi dan analisis teks, yaitu bagi pengembangan dan keluasan riset yang bisa dilakukan.

Secara praktis ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan pemahaman di masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan hidup yang kontekstual di masa sekarang. Selain itu juga bisa memberikan bahan pertimbangan bagi siapapun, terutama pelaku kebijakan, bahwa terdapat nilai-nilai tentang lingkungan hidup yang sudah ada sejak dulu dan bisa menjadi acuan dalam pembangunan.

## **I.2. Tinjauan Pustaka**

Kajian mengenai lingkungan hidup harus diakui sudah cukup banyak, baik dari disiplin ilmu lingkungan sendiri, antropologi, sosiologi, dan juga ilmu komunikasi. Akan tetapi kajian-kajian tersebut lebih banyak pada kerangka disiplin ilmu itu sendiri secara murni. Sementara pada perspektif komunikasi, khususnya komunikasi lingkungan, kajian yang muncul lebih dominan pada aspek kampanye lingkungan, kajian media, dan retorika lingkungan. Aspek kajian tentang analisis artefak masa lalu, khususnya prasasti-prasasti, bisa dikatakan belum ada. Hal ini menunjukkan bahwa riset komunikasi lingkungan lebih dominan pada domain penggunaan aspek keterampilan dari ilmu

komunikasi itu sendiri. Substansi komunikasi pada aspek pemaknaan pesan belum terlalu banyak jadi bahan kajian.

Beberapa hasil riset mengenai pemaknaan nilai lingkungan bisa dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Riset-riset tentang Kajian Lingkungan

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
1	Kurniasih Sukenti/2008	Kearifan Lokal dan Perannya Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan, Kajian terhadap Budaya dan Masyarakat Jawa	Kualitatif	Masyarakat Jawa secara turun temurun telah memiliki persepsi, konsepsi, dan tradisi tersendiri dalam pengelolaan sumber daya alam	Riset saya fokus pada analisis isi, bukan pada konsepsi masyarakat tentang alam
2	Dianing Primanita Ayuninggar, Antariksa, Dian Kusuma Wardhani/ 2011	Kearifan lokal masyarakat suku Tengger dalam pemanfaatan ruang dan upaya pemeliharaan lingkungan (Studi kasus desa Wonokirti, Kecamatan Tosari, Pasuruan)	Kualitatif, Deskriptif Eksploratif	Terdapat nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks ketentuan pemanfaatan ruang, seperti pemanfaatan wilayah adat, wilayah administrasi, orientasi peletakan elemen pembentuk pemukiman, dan sebagainya.	Riset yang akan saya lakukan terfokus pada nilai-nilai lingkungan pada prasasti. Kearifan lokal hanya menjadi persinggungan kajian semata
3	Wahyu Rahardjo/2006	Hubungan manusia dengan lingkungan, sebuah refleksi singkat	Kualitatif, kajian teks	Terdapat hubungan simbiosis mutualistis antara manusia dengan lingkungan yang sulit untuk dipisahkan.	Hasil riset yang saya lakukan fokus pada makna dari teks tentang lingkungan.
4	Hendrika Windaryati, Hendrikus Widodo/ 2012	Objektifitas Berita tentang Lingkungan Hidup di Harian Kompas (Analisis Isi berita lingkungan dalam pemberitaan kasus kebakaran hutan dan lahan gambut periode Februari-September 2012)	Analisis Isi dengan Katagori Objektivitas Media	Kompas telah menerapkan katagori objektifitas media, sesuai kerangka teori yang digunakan. Hal ini tampak dari kesesuaian judul, pencantuman waktu, penggunaan data pendukung, dan faktualitas berita.	
5	Eko Kurniawan/ 2006	Studi Analisis Pemberitaan Media Massa tentang Lingkungan Hidup dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Bangka	Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif dengan Tabulasi Frekuensi Sederhana	Terdapat perbedaan intensitas masing-masing media massa dalam memberitakan mengenai isu lingkungan hidup. Masing-masing dipengaruhi oleh fokus	Riset saya lebih terfokus pada aspek kajian analisis isi, bukan semata-mata pada kajian media massa.

				dan kebijakan redaksional yang dianutnya	
6.	Yenrizal/2015	Komunikasi Lingkungan Masyarakat Petani Pedesaan (Studi pada masyarakat Semende Darat Muara Enim, Sumatera Selatan)	Etnografi Komunikasi dengan etnoekologi komunikasi	Masyarakat memiliki pola tersendiri dalam melaksanakan kegiatan komunikasi lingkungannya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana tatanan adat, kondisi alam, dan hubungan sosial yang terjalin di masyarakat	Riset kali ini lebih fokus pada analisis isi teks dan ingin melihat aspek lain dari sebuah teks, dalam konteks komunikasi lingkungan
7	Phillip Share/ 1995	Toward Global Environmental Values, Lesson from Western Eastern Experience	Kajian teks dengan analisis mendalam	Nilai-nilai lingkungan global seharusnya terumuskan pada beberapa kriteria utama yaitu, konsistensi pemahaman keilmuan tentang sistem-sistem alam, mengedepankan etika praktis dan rencana politik, mengedepankan respon-respon estetika yang baik	Penelitian ini lebih fokus pada keutamaan nilai-nilai LH masa lalu dan relevansinya dengan kondisi yang sekarang
8	Monica Gratani, Stephen G. Sutton, James R.A. Butler, Erin L. Bohensky and Simon Foale/ 2016	Indigenous environmental values as human values	Kualitatif dengan merumuskan tema-tema analisis dan wawancara mendalam	Komunitas yang partisipatif memiliki peran penting dalam menguatkan nilai-nilai biosfer. Nilai-nilai ini terinternalisasikan dalam manajemen sumber daya manusia	Penelitian yang dilakukan tidak terlalu fokus pada aspek biosfer, tetapi pada masalah nilai LH pada prasasti Talang Tuwo
9	Basorun Jo dan Ayeni DA/ 2013	Planning and Restoration of Environmental Values in Nigeria Dysfunctional Societies	Kualitatif dengan review dan kajian literatur	Banyak nilai-nilai LH di Nigeria yang hilang seiring dengan urbanisasi dan modernisasi. Oleh karena itu perlu perencanaan dan restorasi nilai-nilai itu kembali	Penelitian ini fokus pada nilai-nilai lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan di zaman dahulu
10	Herbert Schroeder/ 2011	Environmental Values and Their Relationship to Ecological Service	Kualitatif dengan kajian teks	Nilai-nilai lingkungan hidup tumbuh dari hubungan manusia dengan lingkungan alam, dan ini kemudian akan memberikan pengaruh	Hal yang membedakan adalah aspek pertumbuhan nilai-nilai lingkungan bukan jadi objek kajian, tapi pada



				besar pada aktifitas layanan pengelolaan lingkungan	identifikasi nilai-nilai lingkungan yang ada.
--	--	--	--	---	---

*Sumber : analisis dari berbagai sumber, 2017*

Tampak dari beberapa kajian di atas, riset-riset sangat terfokus pada kajian media, khususnya untuk disiplin komunikasi. Sementara kajian lain, cenderung berbijak pada wilayah kearifan lokal masyarakat setempat. Minimnya riset mengenai makna-makna benda masa lalu dalam konteks pemahaman lingkungan, menjadi justifikasi ilmiah perlunya riset ini dilaksanakan.

Riset yang fokus pada komunikasi lingkungan tidaklah terlalu banyak. Bidang ini nyaris hanya didalami oleh sedikit orang saja. Ini semestinya bisa menjadi peluang di tengah riuh rendahnya persoalan lingkungan dan persoalan-persoalan lainnya. Apalagi yang berbicara mengenai teks-teks lama tentang lingkungan dan kemudian dikorelasikan pula dengan kondisi masalah kekinian. Beberapa ringkasan riset di atas akan dijelaskan lebih luas pada bagian berikut ini.

Sukenti (2008) yang membahas mengenai kearifan lokal masyarakat Jawa dalam pengelolaan lingkungan, adalah seorang yang memiliki basis keilmuan pada Program Studi Biologi. Kendati dari keilmuan biologi, tetapi bahasannya banyak seputar aspek sosiologi masyarakat dalam kaitan dengan terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan di sekitar mereka. Ia membahas mengenai bagaimana sebenarnya masyarakat Jawa memiliki pola dan cara tersendiri dalam memperlakukan alam. Metode penanggalan Jawa yang disebut dengan *Pranatamangsa*, menunjukkan salah satu kearifan lokal masyarakat yang arif dalam memandang realitas disekitarnya. Penanggalan ini sudah dibuat sejak tahun 1855 M oleh Sri Susuhunan Pakubowo VII. Terdapat 12 musim (*mangsa*), yang masing-masingnya memiliki keunikan tersendiri meliputi durasi, sudut deklinasi matahari, angin yang mempengaruhi, kondisi meteorologi, serta gejala-gejala alam yang menyertainya. Masing-masing musim

kemudian akan menandai aktifitas petani dalam menanam jenis-jenis tanaman tertentu, disesuaikan dengan kondisi lahan dan cuaca pada musim tersebut.

Sukenti juga menjelaskan bahwa dalam pertanian masyarakat Jawa tidak hanya soal bertani sawah saja tetapi juga bentuk pemanfaatan lahan pekarangan. Lahan pekarangan merupakan salah satu bentuk lahan kering yang banyak diusahakan para petani di Jawa. Pekarangan bagi masyarakat diartikan sebagai tanah yang dipilih untuk tempat bermukim, berproduksi, serta melakukan kegiatan ekonomi/non-ekonomi (sosialisasi dan lain-lain). Selain untuk bertempat-tinggal, pekarangan juga diusahakan sebagai lahan untuk menanam berbagai jenis tanaman dan memelihara berbagai jenis ternak. Fungsi sosial pekarangan dijalankan dengan digunakannya sebagai tempat bermain anak-anak, berkumpulnya para tetangga, termasuk juga untuk saling bertukar hasil pekarangan antar tetangga.

Dalam riset yang lain, Dianing Primanita Ayuninggar, Antariksa, Dian Kusuma Wardhani (2011) dalam risetnya berjudul Kearifan Lokal Masyarakat Suku Tengger dalam Pemanfaatan Ruang dan Upaya Pemeliharaan Lingkungan, studi kasus Desa Wonokirti, Kecamatan Tosari, Pasuruan, menunjukkan sebuah hasil yang hampir mirip. Riset ini menegaskan bahwa masyarakat Tengger punya tata cara tersendiri pula dalam memelihara dan memanfaatkan ruang-ruang yang mereka miliki. Orang Tengger membagi ruang-ruang wilayahnya atas kawasan perladangan, pemukiman, pertanian lain, sarana prasarana dan sebagainya. Semua ini dalam konteks pemeliharaan lingkungan agar senantiasa terjaga.

Orang Tengger memang harus bersahabat dengan alam. Mereka sangat mempercayai ini sejak dari zaman dulu. Hal ini tidak lepas dari kondisi pemukiman dan karakteristik wilayahnya yang memang sangat rentan dengan terjadinya bencana alam. Melakukan zonasi dan bertindak secara ketat terhadap hal itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kehidupan orang Tengger di masa sekarang dan yang akan datang. Kesadaran seperti itulah yang kemudian menjadikan mereka sangat arif terhadap lingkungan setempat.

Sebuah kajian berikutnya dari Wahyu Raharjo (2006) yang membuat analisa tentang hubungan manusia dengan alam. Wahyu yang memiliki latar belakang Psikologi, membuat analisisnya dari sudut pandang keilmuan psikologi. Ia berkata bahwa hubungan antara manusia dengan lingkungannya adalah suatu interaksi, jadi jelas sudah bersifat dua arah. Dijelaskan oleh Wahyu bahwa salah satu hal yang menarik untuk diketahui adalah bahwa manusia sebagai individu ternyata bisa menjalin hubungan kasat mata yang harmoni dengan lingkungan sekitar. Meskipun pada dasarnya setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda, namun tanpa disadari kecintaan dan bahkan ketergantungan mereka terhadap lingkungan memposisikan mereka menjadi individu yang agak berbeda satu dengan yang lain dan secara jelas semakin memantapkan keberadaan perbedaan individu (*individual differences*).

Rahardjo (2006) kemudian mengambil pendapat dari McKechnie (1997) tentang *environmental personality* yaitu tipe-tipe kepribadian manusia lingkungan. Ia menyebutkan setidaknya ada beberapa tipe kepribadian (yaitu :

- a. *Pastoralism* di mana individu yang memiliki poin tinggi di sini adalah individu yang suka menentang penggunaan dan pengembangan lahan secara salah dan semena-mena tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem dan dampaknya terhadap lingkungan
- b. *Urbanism* di mana individu yang tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang mampu menikmati lingkungan dengan kepadatan tinggi dan sangat menghargai keragaman stimulasi antar pribadi dan budaya dalam kehidupan kota
- c. *Environmental adaptation* di mana individu yang tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang secara baik mampu melakukan pengurangan ketidaksesuaian kebutuhan sebagai manusia dengan keadaan yang ada dengan merubah lingkungannya.
- d. *Stimulus seeking* di mana individu yang tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang memiliki kecenderungan suka bersenang-senang dan melakukan eksplorasi alam dan sangat menikmati sensasi fisik

yang sifatnya intens dan kompleks yang di dapat dari kegemarannya melakukan perjalanan dan petualangan

- e. *Environmental trust* di mana individu yang tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang memiliki kecenderungan untuk mampu percaya pada suatu lingkungan, tidak takut dengan lingkungan baru dan tidak takut menjadi sendiri dalam lingkungan tersebut.
- f. *Antiquarianism* di mana individu yang tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang begitu menikmati perjalanan dan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat dengan desain tradisional dan menghargai produk-produk dari masa lampau
- g. *Need for privacy* di mana individu yang memiliki poin tinggi pada kategori ini adalah mereka yang memiliki kecenderungan untuk sering membutuhkan keadaan lingkungan yang tenang, suka berada dalam keadaan terisolasi, menghindari gangguan dan mencari kesendirian
- h. *Mechanical orientation* di mana individu yang tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang suka menikmati proses mekanis dan teknologi, senang *handle* segala sesuatunya sendiri tanpa bantuan orang lain dan sangat peduli terhadap cara kerja sesuatu hal atau benda yang menarik perhatiannya.

Selain penjelasan di atas, Rahardjo (2006) juga mengutip pendapat dari Sonnelfield (1997), yang menambahkan tipe-tipe kepribadian manusia terhadap lingkungan. Ia menyebutkan beberapa unsur yaitu :

- a. *Environmental sensitivity* di mana individu yang memiliki poin yang tinggi pada kategori ini cenderung secara benar dan cepat mampu mempersepsikan lingkungannya apakah baik atau buruk pada dirinya.
- b. *Environmental mobility* yang dapat melihat sampai seberapa jauh individu suka mengunjungi tempat-tempat yang eksotik dan beresiko untuk dijelajahi.

- c. *Environmental control* yang dapat dipergunakan untuk melihat sampai sejauh mana kepercayaan individu bahwa lingkungan alam mampu mengendalikan perilaku mereka.
- d. *Environmental risk taking* di mana dapat diketahui seberapa jauh individu mau melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi di suatu lingkungan. Individu juga harus tahu bagaimana suatu lingkungan tergolong beresiko untuk didatangi dan melakukan aktivitas di sana serta tahu bagaimana mengambil resiko dan segala konsekuensinya.

Apa yang dijelaskan oleh Rahardjo di atas menunjukkan suatu realitas bahwa manusia dengan lingkungan memang memiliki bentuk keterikatan tersendiri. Keterikatan ini bisa saja berubah dan bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Ini yang dikatakan Wahyu bahwa manusia dapat mempengaruhi alam sebagaimana alam juga dapat mempengaruhi manusia. Nuansa psikologis cukup kental pada analisis yang disampaikan Wahyu.

Sementara itu Hendrika Windaryati, Hendrikus Widodo (2012) dan Eko Kurniawan (2006), masing-masing lebih memfokuskan kajian pada aspek pemberitaan media massa. Mereka melihat bagaimana objektifitas berita di Kompas, serta bagaimana berita tentang kasus lingkungan disajikan oleh media massa di daerah Bangka. Kajian media yang dibuat ini tidak terlalu fokus pada aspek kearifan lokal ataupun relasi hubungan antara manusia dengan lingkungan. Tekanannya lebih kepada kemasan media dalam menyoroti masalah lingkungan hidup.

Sedangkan riset oleh Yenrizal (2015), fokusnya adalah pada interaksi manusia dalam melihat dan mencermati fenomena lingkungan disekitar mereka, terutama di daerah Semende Darat Tengah, Sumatera Selatan. Salah satu aspek penting dari kajian ini adalah adanya mekanisme perhitungan musim tersendiri yang diyakini masyarakat, yang disebutnya dengan *Mate Taon*. Ini mirip dengan kalender musim di Jawa (*Pranatamangsa*), tetapi cara perhitungan sedikit berbeda. Masyarakat Semende memulai perhitungannya di 17 Oktober Masehi sebagai titik awal atau disebut juga bulan *Se* atau satu.

Selanjutnya berturut-turut hingga bulan 12. Uniknya pula komunitas Semende mempercayai bahwa pada masing-masing bulan, tidak semua jenis tanaman bisa ditanam. Hanya tanaman tertentu yang dibolehkan.

Riset ini juga menekankan bahwa komunitas Semende mengenal istilah pembagian lokasi yang dibagi atas daerah sumber air, daerah perladangan, daerah persawahan, daerah permukiman dan daerah sungai. Semua ini punya karakteristik tersendiri yang tidak bisa diolah secara sembarangan. Hal ini kemudian terkait dengan karakteristik adat yang berlaku yaitu adat *bemeraje anak belai* atau sering juga disebut dengan Adat Tunggu Tubang. Intinya masyarakat Semende bersikap dan berperilaku sesuai dengan kondisi alam yang ada disekitarnya.

Demikian pula riset dari Philip Share (1995) yang membahas bagaimana nilai-nilai lingkungan hidup dikembangkan dan dijaga serta juga mengalami degradasi, khususnya di wilayah Timur. Ia melihat bahwa komunitas masyarakat Timur sebenarnya punya kearifan yang lebih tinggi dalam melihat lingkungan hidup. Setidaknya sejarah masa lalu, keberadaan para leluhur sudah menunjukkan hal tersebut. Hanya saja perkembangan berikutnya, dinamika yang terjadi, serta perubahan sosial ekonomi yang terus menerpa, menyebabkan masalah lingkungan mulai tertinggalkan dan kemudian menjadi masalah.

Hal yang sama kemudian dilihat oleh Share bahwa kondisi di Barat juga tidak jauh berbeda. Kondisi awal cukup bagus, tetapi perkembangan berikutnya, baik karena disebabkan pertumbuhan umat manusia ataupun perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat, menyebabkan adanya distorsi-distorsi tersendiri dalam proses ini. Konsistensi adalah kata-kata yang kemudian menghilang dan tidak lagi bisa menjadi penentu terhadap kelestarian lingkungan. Ketidakkonsistenan adalah ancaman terbesar yang menyebabkan masalah ini terjadi.

Sesuatu yang menarik kemudian tampak pula dari bagaimana kajian yang dilakukan oleh Grafani dkk. (2016) yang menyebutkan tentang nilai-nilai kearifan lokal sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Grafani menjelaskan nilai-nilai

berhubungan dengan keyakinan (*beliefs*). Keyakinan adalah pemahaman tentang realitas sekitar yang biasanya dianggap fakta, terutama bagi orang-orang yang menghalangi pemahaman bahwa dunia dibangun secara sosial dan kultural. Ini adalah realitas, dunia dibangun secara sosial dan kultural, tak bisa dipungkiri itu. Oleh karenanya nilai-nilai adalah serangkaian keyakinan tentang sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah, cantik dan harmonis atau tidak (Vidal, 2008 dalam Grafani, 2016). Nilai-nilai tentu saja akan berhubungan dengan persoalan etika.

Apa yang dijelaskan Grafani, kemudian bisa pula dilihat penguatannya dari gagasan Schroeder (2011) bahwa lingkungan alam kemudian akan memberikan penguatan pada nilai-nilai dengan cara yang berbeda untuk kelompok dan orang-orang yang bervariasi pula. Nilai-nilai yang berbeda dan model-model yang ada juga didorong untuk melakukan identifikasi, katalogisasi, dan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang lingkungan.

Riset-riset yang dikembangkan di atas memberikan penekanan pada aspek penguatan nilai-nilai dan menempatkan nilai-nilai sebagai sesuatu yang memang berasal dari keyakinan manusia. Tekanannya lebih kepada interaksi antara semua komponen yang terhubung dengan lingkungan, utamanya manusia. Manusia adalah makhluk yang kemudian dianggap memiliki kemampuan menciptakan nilai-nilai dan menggunakannya untuk kepentingan kehidupannya. Oleh karena itu, Schroeder (2011) mengembangkan gagasan secara konseptual tentang aspek-aspek berbeda dari nilai-nilai yang muncul dari lingkungan. Dalam hal ini ia berkata bahwa keragaman (*diversity*) dan kompleksitas adalah sarana dimana nilai-nilai bisa muncul dari lingkungan. Nilai-nilai ini akan terhubung dengan bagaimana dan apa tindakan yang akan dilakukan. Disinilah tekanan pendapat Schroeder bahwa nilai-nilai ini akan berimplikasi pada aktifitas-aktifitas lingkungan yang dilakukan.

Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai adalah sesuatu yang harus dan selalu ada dalam pola hubungan manusia dengan alam. Tidak ada kehidupan tanpa

nilai, karena memang manusia membutuhkannya, dan nilai itu berkembang serta muncul dari interaksi manusia dengan lingkungannya.

Riset-riset mengenai nilai-nilai pada aspek lingkungan hidup memang banyak terfokus pada aspek nilai yang dikembangkan manusia dan bersumber pada gejala-gejala alam yang menghampirinya, sebagaimana juga riset yang dilakukan ini. Akan tetapi, mendalami nilai-nilai yang dikembangkan di masa lalu, dan kemudian menjadi relevan dan seharusnya implementatif pada masa kini, tidak banyak yang membahas ini. Tujuannya bukanlah untuk bernostalgia dengan peristiwa masa lalu, tetapi bagaimana melihatnya kemudian menjadi relevan dan penting untuk dilaksanakan di masa sekarang.

Naskah Prasasti Talang Tuwo yang menjadi objek kajian pada riset ini berada pada sisi ini, yaitu nilai-nilai yang dikembangkan di masa silam, ternyata memang memiliki relevansi dengan kondisi sekarang. Sekaligus juga dapat ditegaskan bahwa kajian yang dilakukan ini memang berbeda dari yang sudah dilakukan pihak lain. Kearifan lokal masa lalu coba diangkat dan ditunjukkan dengan realitas sekarang. Gap itu akan tampak dan sekaligus menjadi justifikasi tersendiri bahwa kesalahan dengan mengabaikan masa lalu, berimplikasi penting dengan kondisi sekarang.

### **I.3. Kerangka Teori**

Penelitian ini beranjak dari pemikiran bahwa lingkungan hidup dengan manusia selalu berinteraksi dalam wilayahnya masing-masing. AT Rambo (1985) menyebutkan istilah *social ecosystem interaction models* yang menekankan adanya interaksi yang bisa dilihat dari aspek materi, energi, dan komunikasi. Model dari Rambo ini menunjukkan satu rangkaian hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara manusia dengan lingkungan.

Dalam kajian lain, Florr (2004) mengatakan bahwa interaksi manusia dengan lingkungan, tidak bisa hanya dikaji pada aspek teknis belaka, atau kajian yang tampak di permukaan belaka. Ada aspek budaya, tradisi, sosial, dan keseharian masyarakat yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut selalu



terjadi dalam kurun waktu yang ada. Ini sejalan juga dengan pandangan Jurin (2010), yang mengatakan bahwa dalam perspektif interaksi manusia dengan lingkungan, ada wilayah yang mengatakan bahwa manusia melakukan proses konstruksi terhadap lingkungan.

Gagasan Jurin dan Florr di atas, jika dikaji lebih jauh akan bertemu dengan gagasan Aldo Leopold yang populer dengan kajian *land ethics*, yang menyebutkan bahwa ada kesatuan hubungan manusia dengan lingkungan yang terlihat dari etika yang harus diperhatikan. Inilah yang kemudian diturunkan oleh Arne Naess (2001) melalui tiga perspektif etika lingkungan hidup yang disebutnya sebagai *ecoethics*, *bioethics*, dan *antropoethics*. Selanjutnya Naess berkata bahwa seharusnya dalam pengelolaan lingkungan hidup harus mengacu pada ketentuan tentang *ecoethics* yang lebih sering disebutnya sebagai *deep ecology*.

Gagasan ini tidak lepas dari kenyataan bahwa yang dimaksudkan sebagai lingkungan hidup tersebut adalah keseluruhan yang ada di sekitar manusia dan menjalin kesatuan hubungan dengan semua makhluk yang ada. Soerjani (1997), berpendapat bahwa lingkungan terdiri atas lingkungan alam, lingkungan buatan atau binaan, serta lingkungan sosial. Ini juga memiliki kesamaan dengan pandangan Soemarwoto (2000) yang menyebutkan adanya lingkungan fisik dan non fisik. Apapun itu, yang jelas lingkungan dimaknai sebagai keseluruhan yang ada dalam realitas kehidupan manusia dan bersifat saling mempengaruhi.

Sebagai sebuah keseluruhan maka interaksi antara manusia dengan lingkungan menjadi kompleks dan sekaligus rumit. Soemarwotto (1991) mengatakan, interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya sangat kompleks sehingga pengaruh terhadap suatu unsur akan merembet ke unsur lain, sehingga pengaruhnya terhadap manusia sering tidak dapat segera terlihat atau dirasakan.

Gagasan di atas yang menempatkan manusia dalam satu kesatuan lingkungan, sebagaimana Florr, Rambo dan Jurin, menjadi landasan teori

dalam penelitian ini. Ini ditekankan bahwa teks Prasasti Talang Tuwo berbicara tentang keutuhan dan keharusan menjaga lingkungan, yang kemudian ditunjukkan kepada seluruh masyarakat. Satu kesatuan inilah yang menjadi pola pikir awal dalam melihat bahwa teks pada Talang Tuwo sebenarnya sama, dan kemudian justru tergerus sendiri oleh gerak pembangunan.

Sementara pada tataran aspek nilai-nilai tentang lingkungan hidup, menarik untuk melihat gagasan dari Callicott yang disebut dengan Teori Nilai. Teori ini bersifat sentimental dan komunitarian. Callicott (2009;129) mengurangi fakta tentang nilai psikologis pada orang-orang yang tinggal di sebuah komunitas. Tidak ada nilai tanpa komunitas yang menilai. Hal ini seharusnya tidak disalahartikan dengan pandangan bahwa manusia secara intrinsik berharga. Teori Nilai Callicott bersifat antropogenik (manusia-dihasilkan) tanpa antroposentris (human-centered). Sesuatu yang memberikan nilai dan stabilitas moralitas atau bahkan universalitas, menurutnya, adalah fakta kontinen bahwa manusia di masa dan budaya lalu, terhubung dengan kebutuhan dasar, perhatian, dan keengganan mereka (Yenrizal, 2018).

Callicott (2009;130) juga secara khusus berkata bahwa, manusia secara evolusioner dianugerahi disposisi untuk menghargai komunitas tempat mereka berada, ketika mereka menyadari bahwa tanah ini miliknya. *Land Ethics*, menurut Callicott adalah realisasi terakhir dari disposisi komunitarian tersebut pada manusia. Oleh karena itu etika lingkungan yang terbaik dan memang dibutuhkan saat ini adalah etika yang bersumber dari keyakinan bahwa bumi adalah milik semua makhluk, termasuk bumi itu sendiri. Etika ini menempatkan pandangan bahwa tidak ada yang boleh berlaku negatif terhadap bumi, karena itu adalah kunci dari kesejahteraan dan kemakmuran yang dicita-citakan manusia (Yenrizal, 2018).

Landasan berpikir dalam kerangka teori ini kemudian diturunkan menjadi gagasan tentang wacana. Tarigan (2009 : 24) menyebutkan ada

delapan unsur penting yang terdapat dalam wacana yaitu (1) satuan bahasa, (2) terlengkap dan terbesar/tertinggi, (3) di atas kalimat/klausa, (4) teratur/rapi/rasa koherensi, (7) lisan dan tulis, (8) awal dan akhir yang nyata. Pendapat dari Tarigan di atas bisa menjadi petunjuk penting tentang wacana yang kemudian aplikatif dalam penelitian ini.

Lebih lanjut, Maingueneau (1998 dalam Cabalero, 2008) menjelaskan tentang ciri wacana yaitu : (1) *une organisation au-delà de la phrase* 'organisasi di atas kalimat', (2) *orienté* 'terarah', (3) *une forme d'action* 'bentuk tindakan', (4) *interactif* 'interaktif', (5) *contextualisé* 'kontekstual', (6) *pris en charge par un sujet* 'didukung oleh subjek', (7) *régi par des normes* 'diatur oleh norma', (8) *pris dans un interdiscours* 'bagian dalam interdiskursus'.

Wacana sebagai sebuah organisasi di atas kalimat, dimaknai sebagai konteks pembahasan tertinggi dalam struktur kalimat. Seperti yang diungkapkan oleh Mulyana (2005:8) bahwa dalam analisis wacana, kata atau kalimat yang berposisi sebagai wacana disyaratkan memiliki kelengkapan makna, informasi, dan konteks tuturan yang jelas dan mendukung.

Wacana sebagai satuan bahasa yang terarah adalah wacana mengikuti tujuan dari pembicara atau melibatkan topik tertentu. Wacana melibatkan topik tunggal karena ia merupakan sebuah urutan yang linier atau urutan yang lurus. Dalam prosesnya, wacana sering mengubah arah tujuannya namun kembali lagi pada tujuan awalnya (Maingueneau dalam Cabalero, 2008).

Sementara wacana sebagai bentuk tindakan identik dengan gagasan dalam wacana bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia menjadi aplikatif karena merupakan gagasan yang diterapkan oleh si pembawa wacana. Oleh karena itu wacana menjadi interaktif, dinamis dan bisa berkembang sesuai dialog yang kemudian berkembang. Ini menunjukkan pula bahwa wacana bersifat kontekstual, sesuai dengan realitas dan kondisi yang terjadi pada momen tersebut. Wacana juga didukung oleh subjek dalam arti kata tidak

berdiri sendiri, diatur oleh ketentuan yang berlaku umum, dan bersifat dialogis. Wacana menjadi sebuah perdebatan dan juga ajang diskusi yang sifatnya memperkuat makna tentang wacana tersebut.

Gagasan dari Maingueneau kemudian secara aplikatif digunakan digunakan dalam perangkat Analisis Isi Kualitatif untuk menelaah naskah prasasti Talang Tuwo, walaupun dalam hal ini adalah naskah yang sudah diterjemahkan oleh George Coedes.

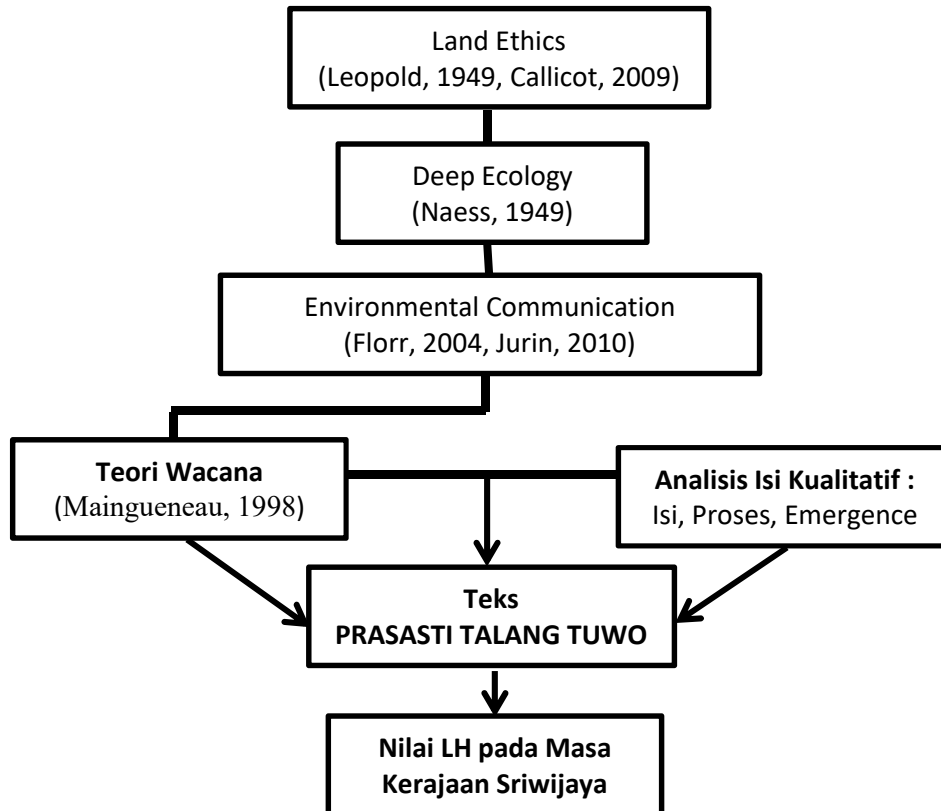
Beberapa hal yang kemudian menjadi fokus dalam analisis isi kualitatif adalah :

1. Isi (content) atau situasi sosial seputar dokumen (pesan/teks) yang diriset. Misalnya, peneliti harus mempertimbangkan faktor ideologi institusi media, latar belakang wartawan & bisnis, karena faktor-faktor ini menentukan isi berita dari media tersebut.
2. Proses atau bagaimana suatu produk media/isi pesannya dikreasi secara aktual dan diorganisasikan secara bersama. Misalnya bagaimana teks dibuat, diciptakan, dan kemudian disebarluaskan.
3. Emergence, yakni pembentukan secara gradual/bertahap dari makna sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasi. Peneliti menggunakan dokumen atau teks untuk membantu memahami proses dan makna dari aktivitas-aktivitas sosial. Dalam proses ini periset akan mengetahui apa dan bagaimana si pembuat pesan di pengaruhi oleh lingkungan sosialnya atau bagaimana si pembuat pesan mendefinisikan sebuah situasi (Bungin, 2003).

Penjelasan di atas memberikan penegasan tentang kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Titik pijaknya bermula dari paham kesatuan manusia dengan lingkungan, yang selanjutnya terimplementasikan dalam ranah wacana dan secara aplikatif melalui metode analisis isi kualitatif.

Secara sederhana bisa dilihat dari bagan berikut ini.

Bagan 1. Kerangka Teori Penelitian



Kerangka berpikir di atas menempatkan posisi nilai-nilai lingkungan hidup yang digagas pada Prasasti Talang Tuwo sebagai sebuah aturan atau norma yang dikembangkan pada masa Sriwijaya. Kendati para teoritis belum ada saat itu, namun gagasan tentang nilai-nilai lingkungan hidup sudah dimunculkan. Pendapat dari Leopold dan Callicott menjadi gagasan awal untuk membuka pola pikir dalam melihat aspek lingkungan hidup. Analisis isi dan

teori wacana akan berguna untuk menentukan aspek apa saja yang nantinya relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini.

#### **I.4. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode secara praktis adalah analisis isi kualitatif. Dalam prakteknya, peneliti mendalami berbagai data-data yang bersumber dari teks prasasti Talang Tuwo, dokumen terkait lainnya, serta pihak-pihak tertentu yang dianggap menguasai tentang sejarah kerajaan Sriwijaya. Menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mendasarkan diri pada subjektifitas pengamatan dan wawancara terhadap informan penelitian. Inilah yang menjadi ciri khas dalam mendalami dan melaksanakan analisa data penelitian.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data teks Prasasti Talang Tuwo, dan juga data-data sekunder dari berbagai literatur dan hasil penelitian orang lain sebelumnya. Dalam klasifikasinya, bisa berupa data kualitatif, maupun data kuantitatif, tergantung pada realitas kebutuhan data yang akan menunjang akurasi data keseluruhan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode utama yaitu :

a. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan utama dalam penelitian, yaitu naskah prasasti Talang Tuwo (terjemahan), photo-photo, dan dokumen lain yang terkait dengan kebutuhan data keseluruhan. Semua bahan yang diperlukan akan dikumpulkan, termasuk hasil riset orang lain yang terkait.

b. Wawancara mendalam

Wawancara ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang dianggap menguasai dan memahami tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya dan prasasti Talang Tuwo. Beberapa pihak juga bisa dilibatkan dari unsur ilmuwan lingkungan dan sosiologi, untuk melihat kontekstualisasi nilai-nilai pada prasasti Talang Tuwo. Pemilihan informan yang akan diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu didasarkan pada kecukupan data yang ada dan kelengkapannya. Secara teknis ini akan dilakukan dengan metode identifikasi informan yang dianggap sebagai narasumber. Informan ini dianggap sebagai kelompok pakar dan ahli tentang sejarah, lingkungan, dan sosial.

c. Observasi

Pengamatan dilakukan terutama terhadap semua data yang ada, serta terhadap kondisi kekinian Palembang. Ini berguna untuk melihat dan menilai kondisi kontekstualisasi nilai prasasti Talang Tuwo pada kehidupan sekarang. Ini penting karena terkait dengan pertanyaan penelitian nomor 3, yaitu menjawab persoalan nilai-nilai apa saja yang kontekstual dengan masalah sekarang ini.

Semua data-data dan teknik pengumpulan data, apabila disederhanakan bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Data, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

<b>Pertanyaan penelitian</b>	<b>Data Yang Dibutuhkan</b>	<b>Sumber</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
Penggambaran nilai-nilai tentang lingkungan pada Prasasti Talang Tuwo	Teks prasasti Talang Tuwo, hasil penelitian lain yang relevan, artefak terkait	Prasasti Talang Tuwo, laporan penelitian, artefak	Dokumentasi
Bagaimanakah pola struktur teks/pola pesan tentang lingkungan pada Prasasti Talang Tuwo	Teks prasasti Talang Tuwo, keterangan ahli/pakar, hasil penelitian lain yang terkait	Prasasti Talang Tuwo, laporan penelitian, artefak, ahli	Dokumentasi, Wawancara mendalam, observasi
Relevansi naskah prasasti Talang Tuwo dalam konteks	Teks prasasti Talang Tuwo, keterangan	Prasasti Talang Tuwo, Laporan penelitian, media	Dokumentasi, Wawancara mendalam, observasi

kekinian di masyarakat Palembang	ahli/pakar, hasil penelitian, kondisi terkini Palembang	massa, ahli	
----------------------------------	---	-------------	--

Data-data yang didapatkan dalam penelitian ini, dianalisa dengan model analisis isi kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Bungin (2003) yang membaginya menjadi tiga komponen yaitu, Isi, Proses, dan Emergence. Polanya dimulai dari pengumpulan data, kodifikasi dan reduksi data, pengelompokan data, dan penarikan kesimpulan. Pada dasarnya, analisa berlangsung selama penelitian tersebut dilaksanakan, karena ini merupakan ciri khas penelitian kualitatif. Pada saat peneliti memasuki lapangan penelitian, saat itu analisa sudah dilakukan. Dasarnya adalah sudut pandang tentang masalah selama ini, serta didasarkan pada realitas yang dihadapi dan dialami masyarakat.

Analisis isi kualitatif lebih menekankan pada makna lain dari sebuah teks. Hal inilah yang kemudian dilihat pada prasasti Talang Tuwo. Bagaimana konteks pembuatannya, konteks penempatannya, konteks penulisannya, dan konteks kekiniannya. Hal ini dijabarkan dari mekanisme penelaahan terhadap isi, proses yang berlangsung, serta pengaruh lingkungan dalam pembuatannya. Terpenting pula analisis ini akan pula membahas dan menempatkan relevansi kondisi kekinian yang dikaitkan dengan realitas komunikasi lingkungan. Aspek komunikasi lingkungan akan menjadi titik pembahasan penting karena tidak akan mungkin sebuah nilai-nilai yang diyakini bersama akan bisa terhubung dan terimplementasikan tanpa proses komunikasi nilai-nilai yang diyakini.



# **BAB II**

## **NILAI DAN PERSPEKTIF MEMANDANG LINGKUNGAN HIDUP**

### **II.1. Nilai dan Etika Lingkungan Hidup**

Ketentuan bahwa lingkungan hidup memiliki nilai dan etika tersendiri, tentunya sudah menjadi sesuatu yang pasti. Hal ini sudah dijelaskan jauh-jauh hari oleh berbagai kalangan terutama ahli lingkungan dan para Antropolog. Tania Murai Li (2012) dalam sebuah tulisannya menjelaskan tentang bagaimana komunitas masyarakat lokal di pedalaman Sulawesi harus menyesuaikan diri dan membentuk perilaku-prilaku tersendiri demi keselarasan hubungan yang terjalin. Begitu juga bahasan yang dibuat oleh Puri (2005) tentang masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan. Semua itu memperlihatkan bahwa nilai etika dan keserasian hubungan menjadi sesuatu yang mutlak sekali.

Analisis mendalam sudah pernah pula dilakukan oleh Aldo Leopold (1949) yang menyebutkan ketentuan tentang etika bumi (*land ethics*). Dalam gagasannya ini Leopold menyebutkan perlunya bersinergi dengan alam, dengan ketentuan bahwa alam adalah satu kesatuan dengan makhluk lain di bumi. Hal inilah yang kemudian menjadi ide munculnya berbagai kajian tentang pemahaman lingkungan hidup secara mendalam yang lebih dikenal dengan sebutan *deep ecology*.

Dalam konteks masyarakat lokal, terutama masyarakat yang memang terikat dan bersinggungan langsung dengan lingkungan dimana mereka tinggal, penghargaan terhadap kondisi yang terjadi sangat menentukan sekali. Ini kemudian yang akan membentuk nilai-nilai etis kehidupan mereka sekaligus perilaku sehari-hari. Jati diri dan juga identitas, akan pula tercermin dari bagaimana konsep etika tersebut berlangsung dan ditunjukkan oleh masyarakat setempat.

Sebuah gambaran menarik pernah disampaikan oleh Lahajir (Yenrizal, 2015) tentang masyarakat Dayak Tunjung Linggang di Kalimantan Tengah yang hidup keseharian dari interaksinya dengan alam (hutan). Disebutkan bahwa komunitas Dayak Tunjung Linggang masih erat kaitannya dengan kegiatan ladang berpindah. Bagi orang Dayak, perladangan akan berkaitan dengan sumber daya yang menyediakan bahan makanan agar manusia dapat hidup. Karena itu, orang Dayak akan berusaha menemukan lahan-lahan hutan-tanah yang potensial untuk padi ladang. Disini ada tahap-tahap dan proses yang harus ditempuh yaitu, pertama, penentuan dan memastikan status hak milik tanah hutan yang akan dipilih. Biasanya ini pada bekas lahan milik keluarga sendiri, atau lahan bekas orang lain yang sudah diizinkan, atau lahan hutan primer yang minta izin pada Kepala Suku. Kedua, memperhatikan dengan seksama sifat-sifat tanah hutan yang akan dipilih, bisa tanah darat ataupun tanah paya ataupun pembedaan atas tanah dataran (*madakng*), tanah lereng bukit (*keleq*) dan tanah lembah (*dempak*). Mereka juga memahami lapisan-lapisan tanah yang subur atau tidak subur. Orang Dayak memperhatikan banyak aspek saat memilih tanah, dan semua aspek itu bersumber dari tanda-tanda alam, seperti besar kecilnya pohon yang tumbuh disitu, suara burung dan binatang lain, arah jalannya binatang, termasuk arah terbangnya burung (Yenrizal, 2015;33).

Dijelaskan juga oleh Lahajir bahwa pada saat penebasan lahan, orang Dayak juga memperhatikan tanda-tanda lain, seperti mimpi. Jika tidak ada mimpi-mimpi tertentu maka perladangan diteruskan. Begitu juga sebaliknya. Orang Dayak juga memperhatikan bulan (*ulatn*) dan bintang (*bintakng*) di langit untuk menentukan kapan mulai membersihkan lahan, membakar, menanam dan proses lanjutannya (Yenrizal, 2015;33). Apa yang dilakukan oleh suku Dayak di atas, pada dasarnya adalah aplikasi dari etika lingkungan yang sudah mereka pahami sedari awal. Tentu saja mereka tidak akan mengatakan ini sebagai sebuah etika, tetapi ini memiliki korelasi bahwa perlakuan masyarakat terhadap alamnya, dijaga dan diatur sedemikian rupa. Disini berlaku ketentuan mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Dasarnya adalah pada

pemahaman mendalam secara langsung terhadap segala kondisi dan perubahan lingkungan disekitarnya. Jauh sejak berpuluh-puluh bahkan mungkin ratusan tahun lalu, orang Dayak sudah menerapkan hal tersebut.

Etika sendiri memiliki makna pada kebaikan. Sony Keraf (2002;2) berkata bahwa secara teoritis etika mempunyai pengertian bervariasi. *Pertama*, secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani yaitu *Ethos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan kehidupan yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Etika sering dipahami sebagai ajaran yang berisikan aturan tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Oleh karena itu, Keraf mengatakan bahwa etika secara lebih luas dipahami sebagai pedoman bagaimana manusia harus hidup, dan bertindak sebagai orang yang baik. Etika memberi petunjuk, orientasi, arah bagaimana harus hidup secara baik sebagai manusia.

*Kedua*, etika dipahami dalam pengertian yang berbeda dengan moralitas sehingga mempunyai pengertian yang jauh lebih luas. Etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkrit, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret. Bertindak secara konkret ini akan terjawab melalui etika nomor satu sebelumnya. Dengan kata lain, ada pegangan baku dalam bentuk norma dan nilai tertentu yang siap pakai (Keraf, 2002;5).

Hal inilah yang kemudian disebutkan Keraf bahwa saat ini dibutuhkan etika dalam pengertian yang kedua, berupa refleksi kritis untuk menentukan pilihan, menentukan sikap, dan bertindak secara benar sebagai manusia. Refleksi kritis ini menyangkut hal-hal tertentu yaitu, refleksi kritis tentang

norma dan nilai yang diberikan oleh etika dan moralitas dalam pengertian pertama, refleksi kritis tentang situasi khusus yang kita hadapi dengan segala keunikan dan kompleksitasnya, serta refleksi kritis tentang berbagai paham yang dianut oleh manusia atau kelompok masyarakat tentang apa saja.

Atas dasar itu, maka Keraf (2002:8) juga berkata bahwa etika lingkungan akan berada pada pengertian kedua, yaitu sebuah refleksi kritis tentang norma dan nilai atau prinsip moral yang dikenal umum selama ini dalam kaitan dengan lingkungan dan refleksi kritis tentang cara pandang manusia tentang manusia, alam dan hubungan antar manusia, serta perilaku yang bersumber dari cara pandang ini. Dari refleksi kritis ini lalu disodorkan cara pandang dan perilaku baru yang dianggap lebih tepat terutama dalam kerangka menyelamatkan krisis lingkungan.

Kajian mengenai etika lingkungan, secara lengkap pernah disampaikan oleh Arne Naess (1989) dengan istilah *ecoshopy* dan kemudian ia memunculkan konsep yang disebutnya dengan *ecoshopy T* dengan tekanan pada keragaman dan kebersamaan dalam kehidupan. Intinya semua makhluk yang ada di muka bumi adalah beragam dan bersatu dalam kebersamaan tersebut. Gagasan Naess ini yang kemudian diterjemahkan pula oleh Sony Keraf dalam tulisannya yang kemudian dijabarkan menjadi Etika Lingkungan. Ada tiga aspek yang dibahas disini yaitu Antroposentrisme, Biosentrisme dan Ekosentrisme. Pembahasan berikut akan menjelaskan satu persatu dengan mengadopsi dari tulisan Sony Keraf (2002).

### **Antroposentrisme**

Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri (Keraf, 2002:33). Ini gagasan awal dalam etika ini. Manusia adalah titik sentral dan titik utama untuk melihat kondisi alam dan lingkungan yang ada. Fokusnya adalah pada keberfungsian alam untuk kepentingan manusia. Sony Keraf menyebut ini teori yang egoistik (2002:34), karena hanya mementingkan manusia semata.

Gagasan tentang ini apabila bisa dilihat lebih jauh, mengacu pada filsafat Cartesian dengan istilah terkenalnya "Aku berpikir maka aku ada". Sudut

pandang yang dipakai adalah sudut pandang manusia. Alam boleh diolah dan dimanfaatkan (dalam bahasa lain disebut dengan dieksplorasi) selagi itu memberikan keuntungan pada manusia. Oleh karena itu, pola hubungan manusia dengan alam terlihat sangat instrumentalistik, hanya hubungan yang menguntungkan satu pihak saja.

Filsafat ini yang bermula dari gagasan Aristoteles yang menyebutkan bahwa "tumbuhan disiapkan untuk kepentingan binatang dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia, menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai sesuatu yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem. Sekalipun tumbuhan dan binatang juga penting, tetapi posisinya ada di bawah manusia (Susilo, 2008;61). Hal seperti inilah yang kemudian mengilhami Descartes dan kemudian diterjemahkan oleh manusia-manusia lain dalam relasi yang sekarang banyak dikenal.

Relasi seperti ini diyakini kemudian memberikan sumbangan besar terhadap kerusakan alam di dunia ini. Pertimbangan kepentingan alam untuk diri mereka sendiri seolah diabaikan. Misalnya, hewan yang juga punya hak hidup di atas bumi ini tidak diperhatikan sama sekali. Hutan boleh dibabat dan diambil kayunya untuk kepentingan manusia, tanpa memperhatikan kepentingan hewan-hewan yang juga menggantungkan hidup dari pepohonan yang ada.

Analisa penting disampaikan oleh Soemarwoto (2004:88), dimana di negara berkembang maupun di negara maju, pertimbangan egoistis tetap dominan. Oleh karena itu, sikap mau berkorban untuk pengelolaan lingkungan hidup dianggap sebagai sikap yang ideal. Muncullah istilah dalam lingkungan yang disebut *altruisme*, sifat yang mementingkan kepentingan orang lain. Ini yang terabaikan.

Tetapi, apakah gagasan Antroposentrisme selamanya negatif dan tidak memberikan kebaikan sama sekali bagi makhluk hidup yang ada? Sony Keraf menilai bahwa tidak selamanya juga demikian. Tetap ada aspek-aspek positif

yang terdapat dalam etika ini. Hanya saja implementasinya yang kemudian terlihat lebih mengedepankan aspek eksploitasi ketimbang konservasi.

Sonny Keraf (2002:45-46) menyebutkan beberapa hal berikut yang pernah juga diulas oleh Yenrizal (2015). *Pertama*, adanya pesan bahwa kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia tergantung dari kelestarian dan kualitas lingkungan. *Kedua*, dalam pandangan agama, manusia dianggap sebagai wakil Tuhan, karena itu ia harus mencitrakan diri sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap alam ini. *Ketiga*, sebagai aristokrat biologis, manusia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral untuk melayani, melindungi, dan menjaga semua makhluk yang berada di bawah kekuasaannya.

Sepintas, sepertinya aspek antroposentrisme memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan yang lebih luas. Masalahnya kemudian adalah manusia terjebak dan tergoda oleh nafsu jangka pendek untuk mengolah dan mengeksplorasi alam. Segalanya seolah bisa dipakai dan digunakan selagi itu memberikan keuntungan jangka pendek bagi manusia. Aspek keberlanjutan atau *sustainability* dari lingkungan itu sendiri terabaikan. Nafsu manusia untuk melakukan pengolahan dan penggunaan alam secara berlebihan kemudian mengabaikan nilai-nilai jangka panjang. Tak heran jika kemudian kerusakan lingkungan menjadi sesuatu yang berpangkal dari tingkah laku dan sikap manusia itu sendiri.

Dijelaskan oleh Beckmann dan Kilborne (1997) bahwa ciri penting dimensi antroposentris dari domain kosmologis adalah keyakinan bahwa manusia terpisah dari alam dan secara etis lebih unggul dari keseluruhan alam. Akibatnya, manusia menganggap dirinya sebagai orang yang benar, para empu alam menundukkannya untuk tujuan instrumental mereka sendiri. Melalui demistifikasi alam (Lewis 1973), pengembangan ilmiah dan teknologi, manipulasi dan eksploitasi dan akhirnya menghasilkan "kematian alam" (Merchant 1980). Posisi antipodal terhadap antroposentrisme adalah ekosentrisme yang menganggap alam memiliki nilai inheren terlepas dari

kegunaannya bagi manusia (Shrivastava 1995; Purser, Park, dan Montuori 1995; Thompson dan Barton 1994).

Beckmann dan Kiborne juga menyatakan bahwa ada dua perspektif untuk menguji posisi ekosentris. Yang pertama adalah posisi bahwa tujuannya adalah "emansipasi dan pemenuhan manusia dalam masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis (Eckersley 1992, hal 26)." Posisi ini telah digambarkan sebagai ekologi kesejahteraan manusia (Kilbourne 1995; O'Riordan 1976). Yang kedua mengakui tujuan yang sama namun dengan pengakuan akan pendirian moral dunia bukan manusia dan haknya untuk terus berkembang. Titik tolak utama kedua pandangan tersebut adalah posisi manusia di biosfer.

Saras Dewi (2015) memberikan analisisnya yang kemudian dikatakannya untuk membantah paham antroposentris ini. Mengambil pendapat dari Leopold, ia berkata tentang konsep Piramida Tanah, yaitu adanya lapisan-lapisan yang merupakan semacam perantara daya melalui seperangkat sirkuit. Lapisan terbawah dari piramida adalah tanah, selanjutnya sebutlah serangga yang bersandar pada tanaman. Lapisan berikutnya adalah burung dan hewan pengerat lapisan di atasnya bergantung pada serangga. Hewan tingkat tinggi kemudian mencapai level puncak, yang didominasi karnivora berukuran besar.

Menurut Dewi (2015;28), mekanisme piramida tanah ini penting dipahami karena selama ini manusia merasa sebagai pemilik tanah. Mereka mendirikan bangunan, jalan raya, atau menghancurkan rawa-rawa tanpa memikirkan dampak beruntun sebagai imbas perubahan yang terjadi. Bagi Leopold, perubahan drastis yang terjadi justru akan menyengsarakan manusia itu sendiri. Menghilangnya keseimbangan yang ada akan berpengaruh terhadap bagaimana manusia bisa hidup. Inilah juga kira-kira kritik yang diberikan untuk paham antroposentrisme, paham yang dianggap hanya menempatkan manusia sebagai pihak paling berkepentingan dalam soal lingkungan hidup. Padahal, pengabaian terhadap makhluk lain akan berefek pada manusia itu sendiri juga.

## **Biosentrisme**

Berbanding terbalik dengan gagasan dalam Antroposentrisme yang memandang manusia sebagai titik sentral kehidupan, maka dalam Biosentrisme terdapat kepentingan yang bisa dikatakan sama. Antara makhluk hidup yang ada memiliki kepentingan yang bisa dikatakan sama. Sering juga disebut sebagai teori yang berpusat pada kehidupan.

Sony Keraf (2002;51) menyebutkan bahwa :

”secara harfiah, biosentrisme dikenal dengan teori lingkungan yang berpusat pada kehidupan. Manusia memiliki kewajiban moral terhadap alam. Kewajiban ini tidak bersumber pada kewajiban manusia terhadap sesama sebagaimana dipahami oleh Antroposentrisme. Kewajiban ini bersumber dan berdasarkan pada pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, entah itu kehidupan manusia atau kehidupan spesies yang lain.”

Titik penting pada etika ini adalah kepentingan semua makhluk hidup terhadap alam, tidak hanya manusia semata. Siapapun dan apapun itu, selagi disebut makhluk hidup, maka ia memiliki kepentingan terhadap kehidupan ini. Dikatakan oleh Keraf (2002;55) bahwa subyek moral adalah semua organisme hidup dan kelompok organisme tertentu. Air, sungai, bebatuan yang ada didalamnya harus dijaga dan diperhatikan dengan baik karena ada makhluk hidup didalamnya. Begitu juga udara yang perlu dijaga karena makhluk hidup bergantung padanya. Ini yang kemudian disebut bahwa semua pelaku moral adalah subyek moral, tetapi tidak semua subyek moral adalah pelaku moral.

Taylor (Keraf, 2002;56-58) mengatakan bahwa manusia memiliki kewajiban terhadap alam sebagai pelaku moral dan subyek moral, yaitu sikap menghargai dan menghormati alam. Terdapat empat kewajiban manusia yaitu :

- a. Tidak melakukan sesuatu yang merugikan alam dan segala isinya. Ini ideal sekali, terutama jika dikaitkan dengan konteks *land ethics* sebagaimana digagas oleh Leopold bahwa alam tidak boleh dirusak, karena akan merugikan semua pihak, termasuk manusia. Oleh karenanya ada kewajiban moral yang harus dipenuhi pada konteks ini.



- b. Kewajiban untuk tidak mencampuri. Dalam hal ini ada dua kewajiban yang saling terkait yaitu, (1) tidak membatasi dan menghambat kebebasan organisme untuk berkembang dan hidup secara bebas dan leluasa di alam ini sesuai dengan hakikatnya. Termasuk disini adalah hambatan eksternal yang bersifat positif, hambatan eksternal yang bersifat negatif, hambatan internal positif dan hambatan internal negatif. (2) Kewajiban untuk membiarkan organisme berkembang sesuai dengan hakikatnya, termasuk untuk tidak memindahkan mereka dari habitanya yang asli.
- c. Kesetiaan, atau yang dimaksud disini adalah semacam janji terhadap makhluk hidup lain seperti binatang liar untuk tidak diperdaya, dijebak dan dijerat. Janji ini lebih berlaku dalam relasi antara individu tertentu dengan binatang tertentu untuk dijaga dan dibiarkan hidup di alam bebas.
- d. Kewajiban restitutif atau keadilan retributif. Ini menuntut agar manusia memulihkan kembali kesalahan yang pernah dibuatnya sehingga menimbulkan kerugian terhadap alam dalam bentuk kerusakan atau pencemaran lingkungan. Manusia diwajibkan untuk mengembalikan alam yang telah dirusaknya ke kondisi semula.

Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa biosentrisme tidak hanya menekankan pada manusia, namun semua makhluk hidup. Aspek non hayati tetap diperhitungkan karena dipercaya memiliki relevansi langsung dengan makhluk hidup.

Ada empat keyakinan dalam biosentrisme yaitu, *pertama*, manusia adalah anggota dari komunitas kehidupan di bumi dalam arti yang sama dan dalam kerangka yang sama di mana makhluk hidup yang lain juga anggota dari komunitas yang sama. *Kedua*, keyakinan bahwa spesies manusia, bersama dengan spesies lain adalah bagian dari sistem yang saling tergantung sedemikian rupa sehingga kelangsungan hidup dari makhluk hidup manapun serta peluangnya untuk berkembang biak, tidak ditentukan oleh kondisi fisik

lingkungan melainkan oleh relasinya satu sama lain. *Ketiga*, keyakinan bahwa semua organisme adalah pusat kehidupan yang mempunyai tujuan sendiri. *Keempat*, keyakinan bahwa manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari makhluk hidup lain (Taylor dalam Keraf, 2002:53).

Gagasan tentang biosentrisme ini, apabila dilihat lebih konkrit lagi, sebenarnya sudah terejawantahkan dalam prikehidupan masyarakat di tingkat lokal, terutama komunitas-komunitas awal yang sudah melakukan hal tersebut. Kelompok masyarakat di Semende Darat Tengah, Sumatera Selatan terbukti adalah salah satu yang melakukan itu. Contoh konkrit adalah pengaturan tata guna lahan dengan mempertimbangkan kemiringan, kelandaian dan kondisi lahan. Kendati berada di daerah perbukitan, tetapi mereka mampu untuk bersinergi dengan realitas alam, termasuk disini adalah metode pertanian dengan sistem *aquaculture*, atau ada yang menyebutnya dengan sistem mina padi (Yenrizal, 2015).

### **Ekosentrisme**

Gagasan penting dalam teori ini memiliki kemiripan dengan biosentrisme. Apabila biosentrisme berakar gagasan tentang etika bumi sebagaimana dilansir oleh Leopold (1949), maka ekosentrisme bermula dari pemikiran Arne Naess yang mengaggas konsep *deep ecology*. Aspek penting dalam teori ini adalah bahwa manusia bukan lagi sebagai titik pusat dari semua peradaban di dunia ini (Keraf, 2002;76).

Menurut Keraf (2002;76), *deep ecology* menuntut etika baru dalam persoalan lingkungan. Aspeknya adalah, *pertama*, manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Manusia bukan pusat peradaban. Konsep ini memusatkan perhatian pada semua spesies, termasuk spesies bukan manusia. Prinsip moral yang dikembangkan adalah kepentingan seluruh komunitas ekologis. *Kedua*, etika lingkungan yang dikembangkan dirancang sebagai sebuah etika praktis, sebagai sebuah gerakan. Prinsip moral etika lingkungan harus diterjemahkan dalam suatu aksi nyata dan konkrit. Ini menyangkut gerakan yang jauh lebih dalam dan komprehensif dari sekadar

sesuatu yang instrumental dan ekspansionis sebagaimana ditemukan pada antroposentrisme dan biosentrisme.

Selain itu, seorang pakar lingkungan hidup, Otto Soemarwoto (Yenrizal, 2015) mengatakan, konsep *deep ecology* akan melestarikan lingkungan hidup beserta penghuni non-manusia demi lingkungan hidup itu sendiri. Manusia sebagai salah satu organisme hidup, tidak dilihat dalam isolasi, terpisah dari dan berada di atas alam, melainkan bagian dari dan berada di alam semesta.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam konsep ini dikemukakan oleh Arne Naess (Yenrizal, 2015) yaitu, *pertama*, pengakuan bahwa semua organisme dan makhluk hidup adalah anggota yang statusnya dari suatu keseluruhan yang terkait hingga mempunyai martabat yang sama. Pengakuan ini menunjukkan sikap hormat terhadap semua cara dan bentuk kehidupan di alam semesta.

*Kedua*, prinsip non-antroposentrisme, yaitu manusia merupakan bagian dari alam, bukan di atas atau terpisah dari alam. Manusia adalah salah satu spesies dari sekian banyak spesies lainnya di alam ini. Dominasi manusia digantikan dengan sikap ketergantungan manusia terhadap lingkungan atau ekosistem.

*Ketiga*, prinsip realisasi diri. Hal ini menekankan bahwa manusia terbentuk tidak hanya karena lingkungan sosialnya, namun juga karena hubungannya dengan alam dan lingkungan di sekitarnya. Realisasi diri manusia tidak lain adalah pemenuhan dan perwujudan semua kemampuannya yang beraneka ragam sebagai makhluk ekologis dalam komunitas ekologis. Manusia merealisasikan dirinya melalui sebuah proses dimana ia menyadari bahwa ia hanya bisa menjadi manusia dalam kesatuan asasi dengan alam dan dengan bagian lain dari alam ini.

*Keempat*, pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan kompleksitas ekologis dalam suatu hubungan simbiosis. Setiap bentuk kehidupan termasuk dan menjadi bagian dari komunitas ekologis seluruhnya, dimana keberadaan yang satu menunjang keberadaan yang lainnya.

*Kelima*, perlunya perubahan dalam politik menuju *eco-politics*. Dalam kerangka ini, dituntut adanya perubahan yang bukan hanya melibatkan individu, melainkan juga membutuhkan transformasi kultural dan politis, yang mempengaruhi dan menyentuh struktur-struktur dasar ekonomi dan ideologis. Dalam hal ini perlu ada perubahan dari konsep pembangunan berkelanjutan menjadi paradigma keberlanjutan ekologis atau keberlanjutan ekologis yang luas.

Gagasan etika lingkungan (baik antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme) secara jelas menunjukkan bahwa dalam memandang lingkungan hidup diharuskan untuk memandang berdasarkan aspek etika dan nilai-nilai yang hidup. Setiap manusia bisa memiliki sudut pandang berbeda terhadap ini, dan semuanya bisa dilihat dari aspek yang tampak pada tindakan praktis yang dilakukannya.

Menarik kemudian ketika membaca gagasan Ming (Friesen, ed., 1991;2-3) bahwa diperlukan suatu etika yang sangat berbeda dari model sosial Darwinian mengenai kepentingan pribadi dan persaingan. Kita harus mengatasi mentalitas bahwa janji pertumbuhan adalah tanpa batas dan persediaan energi tidak dapat habis. Sifat merusak “humanisme sekuler” bukan terletak pada sekulernya, tetapi pada antroposentrismenya. Sementara kesadaran akan spiritualitas manusia sebagai tolok ukur segalanya atau sebagai penguasa mutlak atas alam memerosotkan ruang lingkup spritual hingga menjadi tidak relevan dan mereduksikan alam menjadi sekadar objek konsumsi. Proyek manusia telah begitu dimiskinkan sehingga jawaban atas pertanyaan “Apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya?” kalau bukan karena kekurangan tentu keserakahan. Krisis modernitas bukanlah sekularisasi dalam dirinya sendiri, melainkan ketidakmampuan untuk mengalami materi sebagai perwujudan dari ruh.

Oleh karena itu, Ming (Tucker dan Grim, ed. 2003;23) berkata bahwa kunci suksesnya kerjasama spiritual adalah menyadari tidak adanya ide mengenai komunitas, apalagi komunitas global, dalam proyek pencerahan.

Persaudaraan, suatu ekuivalen fungsional komunitas dari ketiga keutamaan utama dari Revolusi Prancis, kurang diperhatikan di dalam pemikiran ekonomis, politik, dan sosial dunia barat modern. Kesediaan untuk membiarkan ketidaksamaan, kepercayaan akan kekuatan demi kepentingan diri, dan egoisme yang merajalela telah meracuni kehendak baik kemajuan, akal dan individualisme. Langkah pertama dalam menciptakan suatu tatanan dunia baru adalah merumuskan maksud universal bagi pembentukan suatu komunitas global. Hal ini sekurang-kurangnya menuntut pergantian prinsip kepentingan diri, tidak peduli betapa luas definisinya, dengan suatu perintah baru : “jangan melakukan bagi orang lain apa yang tidak ingin dilakukan oleh orang lain bagi anda.” Karena perintah emas dilakukan dalam bentuk negatif maka harus ditambah dengan prinsip positif. “Untuk menegaskan diri, kita harus membantu orang lain membentuk dirinya.” Merasa menjadi bagian komunitas, berdasar kesadaran komunal yang kritis dan reflektif serta berkepribadian ekologis, mungkin muncul sebagai hasilnya.

Kerjasama spiritual sebagaimana disebutkan Ming di atas tentu berhubungan sekali dengan aspek-aspek yang menjadi sumber spiritual. Dalam wilayah lingkungan hidup, terutama konteks masa lalu, sumber spiritual diyakini sangat mendominasi dan memang itulah yang diyakini. Hal ini juga sekaligus menegaskan bahwa lingkungan memiliki aspek yang harus didekati secara spiritual.

Gagasan spiritualitas dan etika lingkungan sebenarnya yang sudah pernah digagas jauh-jauh hari oleh para leluhur di Nusantara. Tidak hanya Sumatera Selatan, tetapi juga bagian dari komunitas-komunitas masyarakat lain umumnya melakukan hal yang sama, ada penghargaan terhadap entitas lokal yang sebenarnya merujuk pada aspek penghargaan atau etika terhadap alam ini. Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang memberikan penguatan ini pada ajaran adat yang berlaku juga menunjukkan hal tersebut. Begitu juga dengan bagaimana leluhur para masyarakat Dayak di Kalimantan (lihat Puri, 2005, Lahajir, 2001) tampak memberikan aspek dominan pada hubungan yang

terjalin. Hal yang sama juga ada pada komunitas Badui di Banten (lihat Iskandar, 2009) yang mampu melakukan zonasi-zonasi pemukimannya demi keserasian hubungan.

Sementara di Sumatera Selatan, Prasasti Talang Tuwo yang dibuat semasa kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 M, menunjukkan bagaimana tata kelola lahan harus di atur sedemikian rupa demi keserasian dan kearifan hubungan. Sebenarnya prasasti ini mengedepankan etika bumi yang mesti dicermati dengan baik sebagai sebuah penghargaan terhadap kearifan masyarakat kala itu. Sumber-sumber spiritual yang diyakini ada pada konteks ini, tentu saja akan sangat kental sekali pelaksanaannya. Ming (Tucker dan Grim, ed. 2003;23) berkata bahwa terdapat tiga macam sumber spiritual yang selama ini menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pendekatan terhadap lingkungan hidup.

*Pertama*, bersumber pada tradisi-tradisi etik religius dunia barat modern, khususnya filsafat Yunani, Yudaisme, dan Kristianitas. Kenyataan bahwa hal itu telah membantu melahirkan mentalitas pencerahan mendorong mereka memeriksa kembali hubungan mereka dengan munculnya dunia barat modern untuk menciptakan ruang lingkup publik baru dalam penilaian nilai-nilai khas barat. *Kedua*, bersumber dari peradaban zaman kapak non-barat yang mencakup Hinduisme, Jainisme, Taoisme di Asia Timur, dan Islam. Tradisi-tradisi etik religius ini menyediakan sumber-sumber yang lengkap dan dapat dipraktekkan dalam pandangan dunia, upacara, lembaga, model pendidikan, dan pola hubungan manusia. Mereka membantu mengembangkan gaya hidup, baik sebagai kelanjutan maupun alternatif dari contoh mentalitas Pencerahan Eropa Barat dan Amerika Utara. Asia Timur yang industrial dibawah pengaruh Konfusianisme, telah memperkembangkan suatu peradaban modern yang kurang bermusuhan, kurang individualistik dan kurang berkepentingan diri.

*Ketiga*, sumber spiritual yang melibatkan tradisi-tradisi asli, tradisi religiusitas Amerika Asli, Hawaii, Maori, dan sejumlah suku asli. Mereka telah menunjukkan dengan kekuatan fisik dan keindahan estetik bahwa hidup manusia dapat bertahan sejak Zaman Neolitik. Implikasinya bagi kehidupan

sungguh besar. Gaya perkembangan manusia mereka bukanlah isapan jempol semata, tetapi kenyataan yang dialami di dalam zaman modern sekarang ini. Bentuk khas tradisi asli adalah suatu pemahaman mendalam dan pengalaman keberakaran. Masing-masing tradisi religius asli ditanamkan pada tempat konkret yang menyimbolkan suatu cara pemahaman, gaya berpikir, cara hidup, dan sikap, serta pandangan dunia.

Tampak disini, berdasarkan penjelasan dan gagasan dari Ming di atas, bahwa sebenarnya etika dalam berhubungan dengan lingkungan hidup, itu akan sangat bersentuhan dengan sumber-sumber spiritual yang selama ini dikenal. Sumber spiritua akan menentukan etika yang digunakan. Sementara pada konteks Prasasti Talang Tuwo, sumber spiritual ini berakar dari ajaran Budha tentang lingkungan. Nuansa Taoisme juga akan terlihat, karena keduanya sangat beririsan sekali. Semangat pada Prasasti Talang Tuwo adalah semangat untuk melakukan intisari ajaran Budha yaitu mendatangkan kemakmuran bagi semua makhluk hidup. Pembangunan Taman Sriksetra kemudian menjadi laboratorium lingkungan hidup yang selama ini dikendalikan dan memang dikhususkan untuk menciptakan kebaikan semua pihak. Adanya istilah "*tercapainya Bodhi* adalah tanda utama bahwa Prasasti Talang Tuwo memiliki sumber spiritualitas pada ajaran Budha.

Menarik pula mengutip pendapat dari Ewert Cousin (Ming dalam Tucker dan Grim, 2003;27) bahwa sebagaimana kita menatap ke abad 21 dengan semua ambiguitas dan kebingungan yang kita miliki, bumi adalah nabi kita, dan bangsa-bangsa asli adalah guru kita. Tetapi secara mentalitas, manusia sekarang yang dibesarkan oleh Abad Pencerahan tidak dapat melepaskan tanggungjawab berhermeneutik untuk menafsirkan makna nubuat bumi dan membawa pemahaman terhadap pesan bangsa-bangsa primitif.

Pendapat dari Gratani dkk (2016) menarik pula untuk dicermati bahwa pendekatan dalam melihat lingkungan ini tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang yang ada pada dirinya. Disebutkan bahwa cara masyarakat mendekati pengelolaan sumber daya alam adalah cerminan nilai, etika dan bagaimana

mereka mendefinisikan dan mengukur kualitas hidup. Secara historis, masyarakat "barat" telah dikaitkan dengan nilai-nilai egois, etika antroposentris dan pemahaman tentang kualitas hidup berdasarkan materialisme. Perspektif semacam itu memungkinkan sumber daya alam dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab, asalkan teknologi yang tepat tersedia dan hemat biaya (Merchant, 1992).

## **II.2. Perspektif dalam Memandang Lingkungan Hidup**

Penjelasan pada bagian atas sudah memperlihatkan bahwa dalam melihat aspek lingkungan, terdapat berbagai perspektif dalam memandang lingkungan. Hal ini terkait dengan etika yang digunakan dan nilai-nilai apa yang melatarbelakangi sudut pandang terhadap lingkungan tersebut. Sekaligus juga pandangan di atas memperlihatkan akar masalah dalam persoalan lingkungan yang terjadi.

Masalah lingkungan hidup selama ini, kerap menjadi sorotan yang sulit untuk dicarikan solusinya. Semua bagai sebuah mata rantai yang susah untuk dipertemukan. Bentuk lainnya, ini menunjukkan kompleksitas masalah lingkungan yang tidak bisa juga mendapatkan titik temu persoalan. Hal ini sebenarnya terkait dengan perspektif dalam memandang masalah lingkungan hidup yang kemudian berujung pada berbagai persoalan yang terjadi.

Apabila pada konteks sebelumnya sudah disebutkan tentang sudut pandang etika lingkungan hidup, dimana terlihat bahwa masalah selama ini adalah masalah eksploitasi alam yang terfokus pada keterpenuhan kebutuhan manusia. Pendekatan lain harus dikedepankan, inilah yang kemudian menjadi masalah utama yaitu pendekatan budaya. Aspek budaya jadi masalah yang selama ini sering tertinggalkan, padahal inilah konteks terpenting dalam persoalan lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa sudut pandang dalam lingkungan hidup yang dibahas berikut ini.



a. **Lanskap Budaya.**

Rob Krier dalam bukunya "Urban Space" (1979) menjelaskan lanskap adalah suatu sistem yang menyeluruh yang di dalamnya ada hubungan antara komponen biotik dan abiotik, termasuk komponen pengaruh manusianya. Di dalamnya bukan hanya tentang penataan tanaman, satwa, pengaturan tata ruang, serta pemeliharaan infrastruktur, juga merupakan hubungan manusia dengan alam atau kebudayaannya. Gagasan Krier sebenarnya lebih terfokus pada penataan ruang dari sudut pandang seorang arsitek. Tetapi Krier juga menekankan bahwa penataan ruang, terutama wilayah perkotaan, haruslah memperhatikan seluruh komponen yang ada, baik itu manusia maupun non manusia. Termasuk pula di sini adalah aspek budaya. Tulisan dari Idang (2015) tentang budaya Afrika dan nilai-nilai yang berkembang didalamnya, bisa menjelaskan aspek ini secara khusus. Dikatakannya bahwa tidaklah semua masyarakat Afrika memahami secara sama soal lingkungan dan budaya, walaupun ada kesamaan bahasa, budaya dan lainnya. Karena itu, pemahaman budaya akan mempengaruhi perlakuan mereka terhadap lingkungan sekitar.

Budaya dipahami mencakup keseluruhan karakter di masyarakat selama ia menandai mereka dari masyarakat lain. Hal ini mencakup bahasa, pakaian, musik, pekerjaan, seni, agama, tarian dan sebagainya. Selanjutnya ini diteruskan dengan memasukkan norma sosial masyarakat, hal-hal yang tabu dan nilai yang berkembang. Nilai di sini harus dipahami sebagai keyakinan yang dipegang tentang apa yang benar dan salah dan apa yang penting dalam kehidupan (Idang, 2015;98).

Gagasan Idang di atas dan juga Krier, menegaskan bahwa dalam pandangan mereka, aspek budaya harus diperhatikan dan dijadikan sebagai isu awal dalam melihat problem lainnya. Tidak ada lanskap yang bisa dibuat dan dilaksanakan dengan baik tanpa pendekatan budaya. Ini

yang kemudian digagas oleh Sumatera Selatan dengan penancangan *Green Growth Development* berbasis pada lanskap budaya. Acuannya adalah budaya yang dibangun semasa Sriwijaya, sebagaimana Prasasti Talang Tuwo.

*Cultural Landscape* sebenarnya adalah sebuah istilah dengan beragam makna. Banyak definisi dari kacamata yang berbeda: estetis, sosial, budaya, arsitektur dan ekologi. Tapi singkatnya, *cultural landscape* adalah suatu bentang alam yang terbentuk oleh aktifitas manusia atau memiliki arti penting manusia (Suriatmaja, 2007).

Cultural landscape mungkin tidak mudah dideteksi oleh manusia yang terlibat di dalamnya. Para petani pasti tidak sadar bahwa sawah atau ladang adalah salah satu contoh *cultural landscape*. Permukaan tanah sawah berubah bentuk karena kegiatan tani. Bertani sendiri adalah cerminan dari budaya masyarakat, sehingga sawah adalah *cultural landscape*. Kubangan tempat memandikan kerbau juga saujana, kebun buah-buahan, saluran irigasi, dan perkampungan tradisional maupun kompleks perumahan juga *cultural landscape* karena berkaitan dengan budaya masyarakat

Dijelaskan juga Suriatmaja bahwa tidak semua *cultural landscape* adalah oleh masyarakat karena mengingatkan pada seseorang atau sesuatu atau suatu waktu juga sebuah *cultural landscape*. Karena dianggap penting dan memiliki makna khusus oleh masyarakat, tempat tersebut mewakili nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh karenanya *cultural landscape* umumnya unik dan khas.

Hal yang jelas bahwa semua aktifitas lingkungan harusnya memiliki sudut pandang budaya, terutama adalah budaya masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Ini tidak bisa dihindari karena lingkungan dan budaya adalah sesuatu yang memiliki visi ke depan. Hubungan antara manusia dengan lanskap harus diperimbangkan dalam

konteks satu kesatuan dan harus diikat dalam sebuah kesepakatan bersama, apapun itu namanya.

Harapan yang muncul dari lanskap budaya adalah terdapatnya kesatuan pemahaman dan tindakan masyarakat bahwa manusia dengan lingkungan tidak bisa dipisahkan. Aspek kebudayaan yang dijelaskan oleh gagasan Krier, Soekanto (2009), Li (2001), dan Lahajir (2001), bisa jadi acuan pandangan bahwa terdapat unsur lokal dan budaya asli yang bisa dijadikan sebagai acuan penting dalam membuat dan menyusun program peduli lingkungan dan penataan ruang berbasis lanskap budaya.

**b. Arkeologi Lingkungan.**

Menurut Dr. Kitty Emery dalam *Environmental Archaeology*<sup>3</sup>, arkeologi lingkungan merupakan salah satu cabang ilmu dari arkeologi yang berusaha untuk merekonstruksi hubungan antara manusia pada masa lampau dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Selanjutnya Guido, M., Menozzi, B., Bellini, C., Placereani, S., & Montanari, C. (2013). "*A palynological contribution to the environmental archaeology of a mediterranean mountain wetland (north west apennines, italy)*", menjelaskan arkeologi lingkungan menggabungkan pendekatan arkeologi dengan paleoekologi untuk meneliti lingkungan pada masa lampau. Sementara Branch (2005) dalam "*Environmental Archaeology: Theoretical and Practical Approaches. Hodder Arnold Education*," menjelaskan arkeologi lingkungan berusaha untuk memahami apakah lingkungan dari manusia pada masa lampau memaksa manusia untuk mengubah suatu kebudayaan, atau merupakan faktor dalam perkembangan kebudayaan tersebut. Rekonstruksi lingkungan masa lalu yang dilakukan dapat membuat para arkeolog mengerti mengenai adaptasi apa yang diperlukan untuk manusia pada saat itu agar dapat

---

<sup>3</sup> <http://www.environmental-archaeology.com/>

bertahan hidup, dan bagaimana perubahan lingkungan dapat berperan dalam hilangnya suatu kebudayaan.

c. **Politik ekologi** (*Political Ecology*).

Melakukan pendekatan politik ekologi sebagai upaya untuk mengkaji sebab akibat perubahan lingkungan yang lebih kompleks dibandingkan hanya sistem biofisik yakni menyangkut distribusi kekuasaan dalam satu masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran atas beragamnya kelompok-kelompok kepentingan, persepsi dan rencana yang berbeda terhadap lingkungan. Melalui pendekatan politik ekologi ini juga digunakan untuk melihat isu-isu pengelolaan lingkungan khususnya menyangkut isu "*right to environment dan environment justice*". *Right* (hak) merujuk pada kebutuhan minimal atau standar individu terhadap obyek-obyek *right* seperti hak untuk hidup, hak untuk lingkungan, hak untuk berpendapat, dan lainnya. Sementara *justice* (hukum) menekankan alokasi kepemilikan dan penguasaan atas obyek-obyek hukum yaitu merujuk pada persoalan-persoalan relasional antar individu dan antar kelompok (Setiawan, 2006).

Persoalan lingkungan memang tidak lepas dari aspek politik, bahkan unsur inilah yang kerap menyebabkan masalah lingkungan menjadi sulit untuk diselesaikan. Aspek politik ini berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang kemudian menjadi legalitas penguasaan lingkungan oleh berbagai pihak.

Disebutkan oleh Lay (2007), di dalam isu lingkungan melekat kepentingan subyektif makhluk manusia: masa depan bersama dari bukan saja sebuah bangsa tetapi setiap komunitas dan individu pembentuk bangsa. Tidak mengherankan jika isu lingkungan telah menjadi salah satu dari sedikit isu bersama masyarakat global yang melahirkan jaringan interaksi politik yang paling kompleks. Lingkungan melahirkan pola-pola interaksi dengan variasi yang paling rumit dan sekaligus dengan pelibatan aktor yang paling majemuk. Konflik dan kerjasama

antar negara, antar daerah atau antar pemerintahan, antara pemerintah dan masyarakat, antara masyarakat dan dunia usaha, dan masih banyak lagi sudah menjadi tema penting yang menghubungkan aktor-aktor yang bervariasi dan sekaligus telah menjadi obyek penting dalam berbagai kajian ilmu politik dan studi pemerintahan. Bahkan pengembangan gagasan-gagasan konseptual seperti *network governance*, di samping merupakan konsekuensi logis dari perubahan teknologi dan pergeseran pemaknaan mengenai politik dan demokrasi, juga menemukan lingkungan sebagai titik tumpu bagi perkembangannya

Persoalan lingkungan, dilihat dari aspek politik memang terlihat sangat rumit. Ini disebabkan karena banyaknya kepentingan yang bermain diwilayah ini. Lingkungan sering sekali dijadikan sebagai “modal” dalam aktifitas politik, yang dalam keseharian tidak terlihat secara nyata, namun memiliki implikasi yang sangat jelas.

Kondisi seperti ini yang ditegaskan oleh Cornelis Lay (2007), bahwa ini memang sebuah keniscayaan karena aspek modal yang sangat besar dalam aktifitas lingkungan. Lay (2007) mengatakan bahwa,

Lingkungan memiliki sejumlah karakteristik khas yang idealnya dapat dijadikan titik rujuk bagi politik sebagai instrumen pengaturan kepentingan bersama. Tiga karakteristik dasar lingkungan bisa diidentifikasi. *Pertama*, watak lingkungan sebagai sebuah kesatuan sistem melintasi sekat-sekat administrasi pemerintahan dan politik. Lingkungan tidak pernah setia pada dan tidak pernah bisa dipagari oleh ruang yang diciptakan melalui politik. Ia melintasi batas-batas negara, mengabaikan konseptualisasi tentang "kedaulatan" sebagai titik pijak dalam pemaknaan atas negara modern. Sifat lingkungan juga tidak pernah setia pada dan tidak dapat dipagari oleh batas-batas administrasi pemerintahan apapun pola pengaturannya. Sebuah regim yang paling otoriter sekalipun, tak memiliki cukup kekuasaan untuk memasung, asap misalnya, untuk tidak bermigrasi ke wilayah negara tetangga. Demikian pula lingkungan tidak peduli dan tidak akan pernah peduli pada perjuangan mendapatkan “otonomi” sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang telah diperjuangkan sangat panjang oleh cukup banyak daerah di berbagai kawasan dunia yang bahkan

melibatkan cukup banyak korban dan menciptakan banyak masalah dalam sebuah bangsa yang sering dirumuskan sebagai "regional question". Seberapa besarpun otonomi diberikan pada sebuah daerah misalnya, otonomi yang dimiliki tidak cukup kuat untuk menghentikan alur sebuah sungai yang melintasi berbagai daerah. Karakteristik di atas secara hipotetik dapat menjadi struktur insentif penting bagi pengembangan kerja-sama - lintas negara, lintas daerah - yang sulit dicapai melalui penggunaan isu lainnya. Sebuah bentuk pengaturan politik yang fungsional dalam kerangka mencapai *collective gain* secara maksimal.

*Kedua*, lingkungan melekat di dalamnya kepentingan paling subyektif dari manusia sebagai makhluk, terlepas dari ruang politik dan terbebas dari penjara waktu. Setiap individu, membutuhkan lingkungan sebagai ruang kebutuhan hari ini yang tak bisa ditunda pemenuhannya dan sekaligus ruang kebutuhan masa depan yang tak dapat dipercepat. Lingkungan adalah ruang kita sebagai makhluk manusia bukan saja sebagai ruang hari ini, tapi sekaligus sebagai ruang masa depan diri dan anak keturunan kita. Dalam konteks ini, lingkungan memiliki variasi makna, mulai dari posisinya sebagai ruang ekonomi, ruang kultural, bahkan hingga pada ruang dalam makna fisikalnya.

*Ketiga*, daya menghukum lingkungan yang timbul sebagai akibat dari pengabaian manusia atas lingkungan punya sifat yang sangat khas, yakni indiskriminatif. Berbagai bencana dan kenaaan yang timbul silih berganti sebagai akibat logis dari kealpaan kita memperlakukan lingkungan secara wajar akan melanda siapa saja tanpa memperdulikan kelas sosial, kekayaan, asal-usul, suku, agama dan berbagai kategori pembeda manusia lainnya. Daya menghukum lingkungan, dengannya sebanding dengan watak dari daya menghukum tindakan terorisme yang targetnya bersifat indiskriminatif: siapa saja bisa menjadi korban. Argumen ini telah mendapatkan pembuktian kongkrit melalui pengaman Indonesia di Aceh dimana Tsunami tidak mempedulikan pembilahan sengketa politik dan militer - GAM atau TNI -- sebagai dasar penentuan korban. Setiap orang yang berada dalam radius kemarahan alam adalah target dan korban yang sah dari umbaran kemarahan alam. Kisah gempa di Yogya beberapa saat lalu kembali mengukuhkan watak indiskriminatif dari hukuman alam: gempa telah memakan korban siapa saja tanpa peduli kelas sosial, afiliasi politik-ideologi, jenis kelamin dan aneka kategori pembeda lainnya. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan HAM, misalnya. Korban pelanggaran HAM umumnya bersifat selektif bahkan diskriminatif: tidak semua orang pada sembarang ruang dan sembarang tempat bisa menjadi korban pelanggaran HAM. Kisah Aceh di masa lalu dimana tindakan pelanggaran HAM berat

berlangsung dapat dipakai sebagai ruiukan untuk menopang argumen mengenai sifat diskriminatif dari pelanggaran HAM.

Apa yang disampaikan oleh Cornelis Lay tersebut memang menjadi sebuah keniscayaan. Karakteristik pertama yang menyatakan bahwa lingkungan tidak mengenal batas wilayah, terutama dalam efeknya, menunjukkan bahwa lingkungan ini bersifat universal. Tindakan politik apapun yang diberikan pada lingkungan, tidak bisa dibatasi hanya pada satu pihak, terutama soal akses yang terjadi.

Lay (2007) juga menyatakan bahwa ada perbedaan sangat mendasar antara logika kerja lingkungan dan logika kerja politik. Penelusuran sederhana lewat kosa kata sudah memadai untuk mengungkap perbedaan diametral yang ada, "common", "future", "share", "collective gain", "sustainable", "kerjasama", misalnya adalah kata-kata kunci dalam logika kerja lingkungan. Sementara politik bercerita dalam kata yang lain : "individual", "masa kini", "rebut", dan "kementingan kelompok atau 'individu", serta "kompetisi, atau konstetasi". Hal-hal di atas "mengungkapkan fakta yang sangat sederhana, politik dan lingkungan" terutama dalam konteks Indonesia menjadi dua entitas yang saling meniadakan.

Oleh karena itu masalah lingkungan tetap saja menjadi masalah yang rumit. Solusi yang dimintakan disini adalah pengakuan bahwa aktifitas politik kerap berhubungan dengan masalah lingkungan. Tentu ini tidak mudah, tetapi itu harus dilakukan yaitu tidak mencampuradukkan masalah politik ke dalam persoalan lingkungan. Masuknya unsur politik harus dilihat sebagai sikap yang terbaik untuk penyelamatan lingkungan, bukan sebaliknya. Kecenderungan bahwa masalah lingkungan berhubungan masalah politik memang hal yang sulit untuk diuraikan, tetapi harus bisa diminimalisir.

d. **Human Welfare Ecology.**

Pendekatan *Human Welfare Ecology* menurut Eckersley (dalam Setiawan, 2006), menjelaskan kelestarian lingkungan tidak akan terwujud apabila tidak terjamin keadilan lingkungan, khususnya jaminan kesejahteraan masyarakatnya. Dibutuhkan strategi guna menerapkannya antara lain; strategi pertama, yakni melakukan perubahan struktural kerangka perundangan dan praktik politik pengelolaan sumberdaya alam, khususnya yang lebih memberikan peluang dan kontrol bagi daerah, masyarakat lokal dan petani untuk mengakses kekayaan alam seperti tanah, hutan, laut, sungai, dan tambang. Dalam hal ini peluang lebih memihak atau diutamakan pada petani dan masyarakat lokal, serta membatasi kewenangan negara yang terlalu berlebihan (hubungan negara – kapital – masyarakat sipil). Strategi kedua, penguatan institusi petani dan masyarakat lokal.

e. **Perspektif Antropologi.**

Dibutuhkan asumsi-asumsi dalam upaya menemukan model penjelas terhadap ekologi manusia dengan perspektif antropologi. Tasrifin Tahara dalam Andi M, Akhbar dan Syarifuddin (2007) selanjutnya menjelaskan secara historis, perspektif dimaksud mulai dari determinisme alam (*geographical determinism*), yang mengasumsikan faktor-faktor geografi dan lingkungan fisik alam sebagai penentu mutlak tipe-tipe kebudayaan masyarakat, metode ekologi budaya (*method of cultural ecology*) yang menjadikan variabel-variabel lingkungan alam dalam menjelaskan aspek-aspek tertentu dari kebudayaan manusia. Neofungsionalisme dengan asumsi keseimbangan (*equilibria*) dari ekosistem-ekosistem tertutup yang dapat mengatur dirinya sendiri (*self-regulating system*), materialisme budaya (*cultural materialism*) dengan keseimbangan *cost-benefit* terlembagakan, hingga ekologi Darwinisme dengan optimal fitness dalam respon atau adaptasi untuk “survival”.



f. **Perspektif Ekologi Manusia.**

Dijelaskan Munsir Lampe dalam Andi M, Akhbar dan Syarifuddin (2007) terdapat tiga perspektif ekologi manusia yang dinilai relevan untuk aspek kearifan lokal, yaitu 1) pendekatan ekologi politik, 2) pendekatan ekosistemik dan 3) pendekatan konstruksionalisme. 1) Pendekatan ekologi politik memusatkan studi pada aspek pengelolaan sumberdaya milik masyarakat atau tidak termiliki sama sekali, dan pada masyarakat-masyarakat asli skala kecil yang terperangkap di tengah-tengah proses modernisasi. 2) Pendekatan ekosistemik melihat komponen-komponen manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem yang seimbang dan 3) Paradigma komunalisme dan paternalisme dari perspektif konstruksionalisme. Dalam hal ini kedua komponen manusia dan lingkungan sumberdaya alam dilihat sebagai subyek-subyek yang berinteraksi dan bernegosiasi untuk saling memanfaatkan secara menguntungkan melalui sarana yang arif lingkungan.

g. **Perspektif Komunikasi Lingkungan**

Gagasan mengenai ini sebenarnya masih sangat terbatas. Kalaupun banyak yang mengkaji, fokusnya bukan pada aspek etika atau nilai-nilai, tetapi lebih kepada penggunaan keterampilan praktis ilmu komunikasi dalam melihat isu-isu lingkungan. Hal ini bisa dilihat dari kajian yang dilakukan oleh Jurin (2005), Cox (2010), maupun sedikit bahasan oleh Littlejohn dalam buku *Theories of Communication* (1999). Sedikit berbeda dimunculkan oleh Florr (2004) yang menyebutkan aspek budaya dalam masalah komunikasi lingkungan. Dalam hal ini, Florr mengedepankan bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan yang didasarkan pada aspek jalinan hubungan materi, energi, dan informasi. Florr mendasarkan diri pada ide yang diangkat pertama kali oleh Antropolog Harold Conklin tentang interaksi sosial manusia dengan lingkungan. Inilah yang kemudian sebenarnya penting dilakukan karena

berhubungan dengan pemahaman tentang manusia dan lingkungan itu sendiri.

Perspektif komunikasi lingkungan sebenarnya merupakan kajian yang tidak hanya terfokus pada aspek keterampilan praktis dari ilmu komunikasi, tetapi juga pada aspek wilayah lingkungan sebagai subyek komunikasi itu sendiri. Komunikasi lingkungan akan menunjukkan keterkaitan tiga unsur penting dalam peristiwa yang terjadi, yaitu pelaku komunikasi, setting komunikasi dan peristiwa komunikasi itu sendiri. Pelaku komunikasi adalah unsur-unsur dalam masyarakat, yang memiliki aturan komunikasi sesuai tatanan adat istiadat yang berlaku. Kaidah tradisi yang berlaku menunjukkan bahwa pelaku komunikasi memiliki struktur-struktur tertentu dalam stratifikasi sosial masyarakat, yang kemudian terlihat dalam pola komunikasi yang terbentuk. Setting komunikasi meliputi semua tempat dan situasi yang menunjukkan terjadinya peristiwa komunikasi, sedangkan peristiwa komunikasi sendiri terdiri dari tujuan, topik, bahasa yang digunakan, serta kaidah-kaidah yang berlaku. Berbagai arus informasi dari lingkungan dimaknai oleh pelaku komunikasi, melalui keterkaitan masing-masing unsur, yaitu bagaimana setting yang terbentuk serta dinamika pemaknaan dalam peristiwa komunikasi (Yenrizal, 2015).

Pada konteks ini juga terlihat bahwa kajian komunikasi lingkungan adalah sesuatu yang dinamis, sekaligus juga sangat relevan dengan berbagai kondisi. Kritik juga bisa diberikan kepada para ahli komunikasi, karena wilayah lingkungan selama ini dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dengan lingkungan itu sendiri. Lingkungan lebih dianggap sebagai sebuah objek kajian (sangat identik dengan paham antroposentrisme), alih-alih dipandang sebagai komponen yang aktif.

Riset yang saya lakukan sendiri beberapa waktu lalu (Yenrizal, 2015) menghasilkan hal yang saya anggap sangat penting bahwa kajian mengenai komunikasi lingkungan selama ini cenderung berorientasi

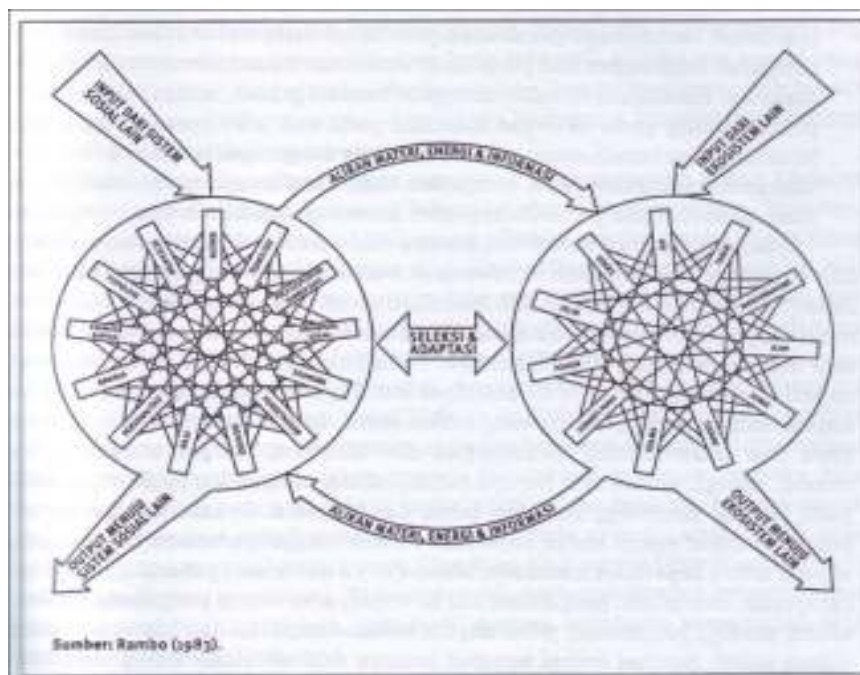
pada sumber, dengan menekankan manusia sebagai titik perhatian utama. Manusia ini dipersempit lagi pada wilayah kebijakan dan aktifitas organisasi yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu fokus kajian komunikasi lingkungan lebih dominan pada aspek kampanye dan kegiatan advokasi. Keilmuan komunikasi cenderung digunakan sebagai alat semata, dimana teknik-teknik praktisnya dimanfaatkan untuk aktifitas kampanye pelestarian lingkungan dan kegiatan advokasi lingkungan. Realitas seperti ini bukanlah hal yang negatif, karena menunjukkan kekuatan ilmu komunikasi secara praktis yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Akan tetapi, sebagai sebuah bidang ilmu yang sudah mandiri, ilmu komunikasi semestinya juga bisa berbicara lebih dalam lagi, bahkan mampu bergerak dalam isu lingkungan berdasarkan *core* keilmuannya itu sendiri. *Core* tersebut adalah pemaknaan yang simbolik (*symbolic meaning*). Pemaknaan simbolik memiliki makna yang luas dan cair, dimana tekanan terpenting adalah aspek budaya (*culture*). Lingkungan dan budaya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, saling berhubungan. Budaya yang terbentuk dalam masyarakat terkait sekali dengan lingkungan mereka, dimanapun posisinya, apakah di pedesaan, perkotaan, pegunungan ataupun dalam sebuah *mall* yang mewah. Sebaliknya, lingkungan alam juga selalu diintervensi oleh budaya yang diciptakan manusia.

Pada komunitas tradisional pedesaan, budaya ini akan melekat pada sistem nilai yang juga bersumber dari lingkungan. Selama ini kajian mengenai ini ada pada keilmuan Antropologi Lingkungan, Sosiologi Lingkungan, atau Ilmu Lingkungan itu sendiri, yang memberikan analisa berdasarkan sudut pandang masing-masing bidang ilmu. Oleh karena itu, kajian komunikasi lingkungan harus mampu lebih meluaskan cakupan areanya dengan menekankan aspek budaya dan masyarakat sebagai elemen penting dalam persoalan lingkungan. Lingkungan harus dilihat

sebagai bagian integral dalam kehidupan manusia, sebagai bagian tak terpisahkan, yang juga menyerap arus informasi dari manusia.

Disinilah menariknya perspektif komunikasi lingkungan harusnya ditempatkan. Semua ini tidak lepas dari gagasan penting AT Rambo (1984) dengan konsep besarnya interaksi manusia dengan lingkungan. Gagasan Rambo bisa dilihat dari gambaran bagan singkat berikut ini.

Gambar 1. Social System and Ecosystem Interaction Models



Gambar di atas menunjukkan alur hubungan manusia dengan lingkungan terjadi pada proses seleksi dan adaptasi. Semua ini tergambar pada aliran materi, energi, dan informasi. Semua proses tersebut terjadi karena adanya interaksi dan proses yang bersifat dinamis dalam sistem sosial. Rambo menegaskan bahwa alur ini selalu terjadi dan semuanya memang bersifat dinamis. Perubahan-perubahan juga bisa dilakukan, baik secara sosial maupun fisik, yang semuanya akan berefek pada perubahan pada sistem sosial yang ada. Oleh karena itu, aspek pemaknaan terhadap lingkungan menjadi penting, karena disitulah inti gagasan dari komunikasi lingkungan.

### II.3. Talang Tuwo dan Lingkungan Hidup

Prasasti Talang Tuwo bisa dikatakan adalah sebuah kekayaan dan juga pelajaran penting di masa lalu yang tetap menjadi penting untuk dicermati pada saat ini. Prasasti yang dibuat di abad ke-7 M, dimana segalanya masih sangat terbatas dan wilayah masih berupa hutan belantara, kerajaan Sriwijaya sudah memikirkan untuk membangun sebuah tatanan wilayah yang teratur.

Sejumlah arkeolog dan budayawan memberikan pendapat khusus mengenai Prasasti Talang Tuwo. Agus Aris Munandar (arkeolog dan Guru Besar Universitas Indonesia) dalam berita “Presiden Jokowi Diharapkan Dukung Peringatan Hari Bumi pada 23 Maret<sup>4</sup>, berpendapat Prasasti Talang Tuwo merupakan satu-satunya prasasti tua di Indonesia yang bicara soal lingkungan hidup. Tidak hanya bicara taman dengan beragam tanaman, juga tata ruang taman berupa kanal dan kolam.

Pendapat Aris Munandar ini tentunya didasari bahwa prasasti Talang Tuwo sebagai prasasti yang sudah berumur ribuan tahun, dan ternyata memuat pesan penting tentang alam semesta. Ini juga diyakini sama oleh Nurhadi Rangkuti (arkeolog) dalam artikelnnya “Amanat Prasasti Talang Tuwo dan Taman Sriwijaya untuk Kemakmuran Makhluk Hidup<sup>5</sup>, menyatakan amanat Dapunta Hyang Sri Jayanasa melalui Prasasti Talang Tuwo sangat jelas: kelola lingkungan untuk kemakmuran dan kesejahteraan semua mahluk.

Secara jelas Prasasti ini memang berkata soal lingkungan hidup. Terlihat seperti dikatakan dalam Prasasti ini mengawali dengan mengatakan bahwa “... *Semoga segala yang ditanam di sini, pohon kelapa, pinang, aren, sagu dan bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan, demikian pula bambu haur, wuluh dan pattum, dan sebagainya; dan semoga juga taman-taman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan, dapat dipergunakan untuk kebaikan semua mahluk, yang dapat pindah*

---

<sup>4</sup> <http://www.mongabay.co.id/2015/06/12/presiden-jokowi-diharapkan-dukung-peringatan-hari-bumi-pada-23-maret/>

<sup>5</sup> <http://www.mongabay.co.id/2016/07/24/opini-amanat-prasasti-talang-tuo-dan-taman-sriwijaya-untuk-kemakmuran-makhluk-hidup/>

*tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan...*" Naskah di atas dikatakan adalah niat dari Baginda Sri Jayanasa terhadap taman Srisektra yang akan dibangun.

Atas dasar itu juga, beberapa kalangan seniman dan budayawan kemudian ingin menempatkan Prasasti Talang Tuwo sebagai ikon di Sumatera Selatan. Usulan terhadap kemunculan pencanangan Hari Bumi juga dimunculkan. Taufik Rahzen (budayawan) dalam berita "Berdasarkan Prasasti Talang Tuwo, Perayaan Hari Bumi Setiap Tahun Diusulkan pada 23 Maret. Alasannya adalah lahirnya Prasasti Talang Tuwo sendiri bertanggal 23 Maret. Karena saat itu kekuasaan Sriwijaya sudah meliputi hampir seluruh Asia Tenggara, maka pengaruhnya juga sangat luas.

Prasasti Talang Tuwo bisa dikatakan adalah salah satu bukti sejarah terbesar yang ditinggalkan oleh Kerajaan Sriwijaya, karena berisi tulisan yang cukup panjang dibandingkan prasasti lain yang sudah ditemukan sebelumnya. Isi dari prasasti ini juga memiliki perbedaan dari prasasti lain, yaitu fokus pada penataan lingkungan dan pembuatan taman-taman. Intinya bicara tentang bagaimana lingkungan harus dikelola, ditata dan dimanfaatkan. Baginda Sri Jayanasa adalah tokoh utama yang disebutkan dalam prasasti tersebut, yang memelopori pendirian Taman Sriksetra (Yenrizal, 2016).

Dalam konteks masyarakat Sumatera Selatan, tempat prasasti ini ditemukan, relevansi nilai-nilai Talang Tuwo menjadi sangat penting. Masalah lingkungan yang semakin lama semakin menguat, seperti persoalan kebakaran hutan dan lahan, banjir, kabut asap, kekeringan, adalah fenomena-fenomena yang sebenarnya sudah diatur dalam Talang Tuwo dan menjadi relevan untuk saat ini.

Masalah lingkungan hidup adalah masalah aktual, walau ini bukanlah masalah baru. Ia sudah ada sejak dulu, bahkan sejak zaman Sriwijaya hingga saat ini. Satu hal penting yang patut dicermati disini adalah keserasian dan kesatuan hubungan, baik secara mikro maupun makro. Ada ungkapan menarik dari Capra (2009;81) yang mengatakan bahwa ciri yang mendefinisikan suatu

sistem kehidupan bukanlah keberadaan makromolekul-makromolekul tertentu, melainkan keberadaan suatu jaringan proses metabolisme yang membentuk diri sendiri. Oleh karena itu, Capra juga berkata (2009;82) bahwa manusia tidak terlempar dalam kekacauan dan keacakan, tetapi bagian dari suatu keteraturan besar, suatu simponi agung kehidupan. Manusia berada dalam alam semesta, dan manusia layak berada didalamnya, dan pengalaman didalamnya itu membuat kehidupan manusia bermakna secara mendalam.

Prasasti Talang Tuwo yang dalam berbagai perspektif disebut memiliki motif beragam dalam pendiriannya, namun yang jelas inilah bentuk kepedulian leluhur dalam menata ruang yang ramah lingkungan. Sesuatu yang sangat dinanti dan ditunggu-tunggu belakangan ini. Terpenting juga dipahami bahwa Prasasti Talang Tuwo memang sebuah realitas penting mengenai kearifan lokal sebuah masyarakat dalam memandang alam disekitarnya. Apa yang ada itulah yang dimanfaatkan dan kemudian dikelola serta didorong untuk kemajuan semua masyarakat.

Sebuah riset dari Sharma (?) tentang mengatakan bahwa penting untuk memahami bagaimana ekosistem bekerja dan bagaimana masyarakat manusia berinteraksi dengan mereka untuk memahami tekanan pada ekosistem dan menemukan solusinya. Seringkali terlihat bahwa kesimpulan yang ditarik adalah skala luas dan bahkan global. Misalnya, perladangan berpindah adalah bentuk destruktif pertanian adalah kesimpulan global berskala luas. Keputusan yang paling tepat akan menentukan keberlanjutan ekosistem, seperti yang telah terlihat dalam kasus Bukit Garo, India adalah lokal atau regional. Termaktub di sini adalah adanya realitas yang menyebutkan bahwa pada masyarakat lokal terdapat aspek tertentu yang harus diperhatikan. Semua hal ini akan sangat menunjang terhadap realitas dan bagaimana sebuah peristiwa bisa dimaknai sebagai bentuk penyerasian dengan lingkungan alam setempat.

# BAB III

## SEKILAS TENTANG PRASASTI TALANG TUWO

### III.1. Bermula dari Sri Baginda Srijayanasa

Setahun setelah Kerajaan Sriwijaya didirikan<sup>6</sup>, tepatnya tahun 684 M, secara resmi keluarlah pengumuman dari Sang Raja. Melalui kekuasaan dan pamornya, Raja memberikan titah sekaligus amanah kepada seluruh rakyatnya dan siapapun yang bisa mengetahui, bahwa wilayah kerajaan akan diatur dan ditata sedemikian rupa. Mempercantik wilayah akan dilakukan, mengatur pemukiman, perkebunan, air, kolam-kolam, dan tanam-tanaman. Kepada warga diminta untuk menanam tumbuhan tertentu yang mudah ditemukan. Hasilnya boleh dipakai untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Raja menitahkan ini dengan harapan agar mendapatkan berkah dan izin dari Yang Maha Kuasa, Sang Budha. Maka dibangunlah Taman Sriksetra.

Gambar 2. Prasasti Talang Tuwo



Sumber : [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Talang\\_Tuo\\_Inscription.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Talang_Tuo_Inscription.jpg)

---

<sup>6</sup> Pendirian Sriwijaya ini versi Prasasti Kedukan Bukit yang diakui oleh Georde Coedes, Kulke, dan beberapa sejarawan lainnya. Kendati ada juga yang tidak sepakat soal ini, seperti Muljana, 2008. Coedes sendiri berasumsi bahwa Prasasti Kedukan Bukit adalah tahun 684 atau 685 M. Muljana mengatakan tahun 684 M.



Itulah Prasasti Talang Tuwo, sebuah prasasti terpanjang di Sriwijaya, yang khusus bicara soal kemakmuran dan lingkungan hidup. Tidak diketahui secara pasti siapa yang menulis prasasti tersebut, tetapi kata-kata dalam prasasti ini adalah amanah Sang Raja. Artinya ide dan perintah untuk mengukir batu dengan tulisan ini adalah dari Sri Baginda Srijayanasa, Raja dari Kerajaan Sriwijaya. Pendapat seperti ini bisa ditelusuri dari catatan George Coedes (1989;77), orang yang melakukan penerjemahan terhadap naskah Prasasti Talang Tuwo. Pada prasasti ini juga disebutkan bahwa wujud dari taman yang akan dibangun ini dinamakannya Taman Sriksetra.

Raja Sri Baginda Sri Jayanasa, disebut juga Dapunta Hyang Sri Jayanaga (Muljana, 2008;152) adalah sosok Raja Sriwijaya yang sudah disebut juga dalam Prasasti Kedukan Bukit. Sosok ini memang sangat terkenal dan banyak diceritakan dalam berbagai catatan sejarah. Prasasti Sabokingking yang diterjemahkan dan disunting oleh deCasparis menunjukkan adanya sebuah struktur pemerintahan yang rapi dan lengkap dari Sriwijaya. Posisi teratas adalah Raja Sri Baginda Srijayanasa (Kulke dalam Coedes,2014;363). Selanjutnya diikuti oleh putra mahkota dan seterusnya sampai pada struktur terendah. Ini menunjukkan bahwa Sriwijaya sudah mengenal struktur yang sangat rapi dan lengkap. Administasi pemerintahan sepertinya sudah disusun dengan baik.

Dapunta Hyang sebagai Raja Sriwijaya merupakan tokoh yang menguasai banyak daerah seantero Asia Tenggara. Piagam Kedukan Bukit dianggap sebagai bukti pendirian kerajaan, masa proklamasinya Sriwijaya (lihat Coedes, 2014, Krom, dan Yamin). Walaupun kemudian banyak pula para ahli sejarah yang membantah ini dengan mengatakan bahwa Prasasti Kedukan Bukit bukan proklamasi Sriwijaya, tetapi perjalanan jaya (*jayasiddhatra*) dari daerah Minanga Tanwan ke Palembang, sebagai hasil dari kemenangan perang (lihat Mulyana, 2008;135). Apapun itu, yang jelas fakta bahwa Sriwijaya adalah kerajaan besar dan Dapunta Hyang adalah raja yang paling berjasa saat itu, kiranya tidak terbantahkan. Kendati masih ada perdebatan tentang ibukota

Sriwijaya dan kapan Sriwijaya didirikan, tetapi setidaknya bukti-bukti arkeologis dan ulasan para ahli sejarah sudah menyatakan bahwa Sriwijaya itu ada dan sebagai sebuah kerajaan besar.

Kulke (Coedes, 2014;281) mengatakan bahwa Sriwijaya dipandang sebagai salah satu kerajaan besar atau imperium di Asia Tenggara yang selama berabad-abad menduduki dan menguasai bukan hanya Sumatera, tetapi juga semenanjung Malaya dan Selat Sunda, sehingga dapat memonopoli perdagangan internasional Asia Tenggara. Asumsi tentang sebuah negara dan kenegaraan Sriwijaya yang kuat dengan pemerintahan yang terstruktur secara hirarkis dan sistem pembagian teritorial, terutama didasarkan pada prasasti-prasasti Melayu terkenal dari akhir abad VII. Tiga dari prasasti ditemukan di Palembang dan sekitarnya, empat lainnya ditemukan di daerah *mandala-mandala* yang jauh, yakni di Sungai Batang Hari di hulu Jambi, Pulau Bangka, dan dekat Selat Sunda.

Kebesaran Sriwijaya tampak dari ekspansi wilayahnya yang terus meluas meliputi berbagai wilayah. Berbagai peninggalan sejarah juga menunjukkan bahwa hubungan dagang Sriwijaya sudah berlangsung dengan berbagai wilayah lainnya. Manguin (Coedes, 2014;233) mengatakan bahwa selama tujuh abad terakhir Negara Sriwijaya, antara abad VIII dan abad XIV memiliki pusat-yang fungsinya masih perlu diperjelas-yang terus menerus menggunakan keramik impor. Keramik China merupakan yang terbanyak ditemukan. Disebutkan juga bahwa pada abad tersebut ditemukan berkumpulnya keramik-keramik impor, patung raksasa dari Batu yang banyak memiliki kemiripan dengan India. Ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Sriwijaya yang memiliki daerah lintas pulau dan lautan.

Sriwijaya kemudian memang tidak bertahan terus. Perjalanan selanjutnya menunjukkan masa kemunduran kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang bermula sejak abad ke-7 ini mengalami kemunduran drastis di abad ke-14 M.

Beberapa hal yang kemudian menjadi penyebab kemunduran kerajaan ini sampai kemudian hancur adalah hal berikut<sup>7</sup> :

1. Kerajaan Sriwijaya seringkali di serang oleh kerajaan Colamandala yang dipimpin Raja Rajendracoladewa dari india.
2. Banyak kerajaan taklukan yang memisahkan diri dari Sriwijaya, seperti kerajaan Pahang, Sunda, Jambi, Kelantan dan Ligor.
3. Sriwijaya terdesak oleh perkembangan kerajaan di Thailand yang memperluas pengaruhnya di Semenanjung Malaya.
4. Sriwijaya tersudut dengan pengaruh kerajaan Singasari yang telah menjalin hubungan baik dengan kerajaan Melayu di Jambi.
5. Sriwijaya di serang oleh Raja Dharmawangsa pada 990 M.
6. Sektor ekonomi dan perdagangan mengalami kemunduran, karena pelabuhan pelabuhan pentingnya melepaskan diri dari Sriwijaya.
7. Singasari sukses melakukan ekspedisi Pamalayu
8. Mulai berkembangnya pengaruh kerajaan Islam, yaitu Samudera Pasai
9. Militer Sriwijaya melemah, hingga menyebabkan beberapa wilayah taklukan melepaskan diri, seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya.
10. Sriwijaya ditaklukan oleh majapahit. yang disebabkan oleh serangan dari Adityawarman atas perintah dari Gajah Mada pada 1477.

Semasa jayanya, luas kerajaan Sriwijaya memang meliputi banyak daerah. Gambaran tentang wilayah kekuasaan Sriwijaya bisa dilihat dari gambar berikut.

---

<sup>7</sup> <http://pengayaan.com/10-faktor-penyebab-keruntuhan-kerajaan-sriwijaya/>

Gambar 3. Wilayah Kekuasaan Sriwijaya



Sumber : [https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Srivijaya\\_Empire\\_id.svg](https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Srivijaya_Empire_id.svg)

Peta kerajaan Sriwijaya yang terlihat di atas, didasarkan asumsi bahwa pusat kerajaan Sriwijaya adalah Palembang, dan kemudian berpindah ke Jambi sekitar tahun 1070 atau 1160 M. Manguin (Coedes, 2014;236) mengatakan ini teori yang bisa dipakai mengingat berbagai peninggalan Sriwijaya sangat banyak ditemukan di Palembang. Walaupun sudah pindah ke Jambi, tetapi aktifitas perdagangan dan pelabuhan di Palembang tetap berlangsung.

Fakta-fakta keberadaan kerajaan Sriwijaya banyak ditemukan dari prasasti dan peninggalan-peninggalan berupa artefak lainnya. Prasasti punya peranan penting karena disitu ada data-data tertulis yang jelas maknanya. Bagi kalangan arkeolog dan sejarawan, prasasti jelas menjadi andalan utama dalam menelisik sejarah keberadaan sebuah kerajaan.

Terkait Prasasti Talang Tuwo sendiri, memiliki makna strategis, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam Bab IV. Akan tetapi, terhadap

kerajaan sendiri pada waktu itu dan terhadap masyarakat Sriwijaya sendiri, prasasti juga diyakini memiliki makna strategis. Menurut versi van Ronkel (1924, dalam Coedes, 2014;61), Prasasti Talang Tuwo menuturkan pembangunan sebuah taman oleh Sri Jayanasa. Tetapi Coedes sendiri kemudian mengkritik pandangan van Ronkel dengan mengatakan bahwa tafsiran tersebut tidak cocok dengan rumusan yang diberikan teks itu sendiri. Apa yang dianggap Ronkel sebagai permintaan kepada para penganut, dan sebagai uraian peraturan moral itu dinamakan *pranidhana*. Kata ini sendiri (sebagaimana Burnouf, 1852) adalah permintaan yang disampaikan kepada seorang Budha oleh seseorang yang berhasrat menjadi Budha untuk mendapatkan berkahnya, dengan maksud supaya suatu hari ia akan menjadi Budha penyelamat manusia. *Pranidhana* adalah janji awal seorang calon yang mau mencapai *Bodhi*, artinya saat ia memulai karirnya sebagai *bodhisattva* (Coedes, 2014;61).

Coedes (2014;62) juga mengatakan bahwa mengapa niat pada prasasti ini disebut *pranidhana*. Kata *upaya* yang muncul tepat di teks bersendi, yaitu merupakan persambungan antara perincian karya amal raja dan perincian harapan yang dirumuskannya demi semua makhluk. Dengan mempersembahkan pahala yang diperolehnya berkat amalnya (*sucarita*) kepada semua makhluk yang dapat berpindah tempat dan yang tidak, maka niat raja Jayanasa merupakan *pranidhana* dari jenis kedua, yaitu untuk kebaikan dan pematangan makhluk-makhluk.

Menurut Muljana (2008;152), prasasti Talang Tuwo diyakini orang sebagai bentuk hadiah dari Sang Raja kepada rakyatnya. Segala puji-pujian yang muluk diberikan kepada Sang Raja. Piagam ini juga memuat doa untuk kebahagiaan Raja Sriwijaya atas kemurahan hatinya.

Bisa dikatakan, apapun itu motifnya (apakah bentuk *pranidhana* ataukah ini sebagai hadiah), yang jelas prasasti ini memiliki makna strategis bagi semua orang kala itu. Posisi Raja yang ingin menggapai status *bodhi* ataupun sebuah hadiah, tidaklah bisa dilepaskan bahwa ini adalah amanat dari seorang pemimpin. Amanat yang kemudian terhubung dengan bagaimana sebuah taman

harus diciptakan dan ditujukan untuk semua makhluk yang ada di bumi ini. Inilah makna strategis yang tentunya harus dipatuhi dan diyakini oleh masyarakat kala itu.

### **III.2. Petuah itu di Talang Kelapa**

Alwi Lihan, seorang petani asal Dusun Meranjat, pada 17 November 1920, menemukan sebuah bongkahan batu yang tidak biasa. Batu yang berbentuk menyerupai lempengan ini berisi tulisan-tulisan yang tentu saja tidak dimengertinya. Lokasi pembuatan prasasti sudah berubah wujud menjadi sebuah talang. Wilayah bukit ini dikelilingi sebuah sungai, dan satwa khas sumatera seperti harimau juga masih sering muncul di lokasi ini. Oleh Alwi Lihan, batu tersebut dibawa ke Bukit Siguntang dan diserahkan ke Resident Palembang, LC Westenek, kala itu. Batu itulah yang kemudian disebut dengan Prasasti Talang Tuwo.

Dalam versi lain, disebutkan juga bahwa penemu prasasti ini adalah LC Westenek sendiri. Ini yang kemudian banyak diyakini kebenarannya oleh berbagai pihak. Tetapi, seorang arkeolog Bambang Budi Utomo justru meyakini bahwa penemu prasasti adalah Alwi Lihan. “Saya yakin penemunya Alwi Lihan. Westenek bukanlah seorang arkeolog yang sering melakukan penelitian ke hutan. Lagian pula pada saat itu sejarah yang banyak ditulis atau dikehendaki oleh penguasa.” Keterangan dari ahli waris dan cerita para tetua di Desa Talang Kelapa—Talang Tuwo masuk dalam desa ini—penemunya adalah Alwi Lihan, seorang petani penggarap dari Meranjat.<sup>8</sup>

Dalam tulisan Coedes sendiri juga disebutkan bahwa penemu prasasti ini adalah LC Westenek, yang secara langsung memberitahukan penemuannya ini kepada Coedes. Ia juga mengaku bahwa teks tersebut pertamakali diterjemahkan oleh van Ronkel, dan kemudian disempurnakan oleh Coedes sendiri (2014;55).

---

<sup>8</sup> <http://sumsel.tribunnews.com/2016/03/27/ironis-situs-ekologi-talang-tuwo-dikepung-perkebunan-sawit-dan-perumahan>

Lokasi ditemukannya batu bersurat ini adalah di dusun Talang Tuwo, berada sebelah barat Kota Palembang, sekitar 5 km dari Bukit Siguntang. Saat ini, daerah tersebut masuk wilayah Talang Kelapa. Prasasti itu sendiri kemudian dibawa ke Jakarta dimasukkan di Museum Arsip Nasional. Jika dulu ini merupakan daerah yang termasuk pinggiran, maka sekarang daerah ini sudah berubah menjadi kawasan permukiman dan sebagian perkebunan kelapa sawit.

Menurut arkeolog Bambang Budi Utomo<sup>9</sup> Lokasi tempat ditemukannya prasasti ditandai dengan sebuah “makam”, yang dikenal penduduk sebagai Makam Mbah Banua (mungkin berasal dari kata wanua yang dijumpai pada prasasti Kedukan Bukit yang berkisah tentang pendirian wanua Sriwijaya oleh Dapunta Hyang). “Makam” ini terletak pada bagian punggung sebuah talang (tanah yang tinggi). Di sekelilingnya terdapat lembah yang dialiri sungai-sungai kecil, di mana sungai-sungai ini bermuara di Sungai Musi, di Kota Palembang. Di seberang lembah juga terdapat tanah-tanah yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian serbuk sari tanaman oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional (Puslitbang Arkenas), dulunya di daerah ini terdapat tanaman buah-buahan dan tanaman sejenis palma, sebagaimana yang disebutkan dalam prasasti Talang Tuwo. Juga tanaman jenis bambu-bambuan yang batangnya dapat dimanfaatkan untuk membuat bangunan.

Setelah kepindahan prasasti ke Jakarta, untuk memberikan ingatan terhadap prasasti ini, dibuatlah duplikat Prasasti Talang Tuwo di tempat yang sama. Tahun 1980, duplikat ini raib dicuri pihak tak bertanggungjawab. Sampai sekarang beberapa warga masih sering berkunjung ke lokasi ini, sayangnya tujuan bukan untuk mengenang prasasti, tetapi untuk mencari wangsit sebagai tempat “keramat”.

---

<sup>9</sup> <https://www.facebook.com/KejayaanSriwijaya/posts/335971909811510>

Gambar 4. Lokasi Penemuan Prasasti Talang Tuwo



Sumber : <http://www.mongabay.co.id/2016/03/28/lokasi-raja-sriwijaya-beramanat-ekologi-ini-dikepung-kebun-sawit/>

Lokasi Talang Tuwo sendiri sebenarnya adalah hutan adat milik Marga Talang Kelapa<sup>10</sup>. Sebagai hutan adat, sebenarnya peruntukan adalah untuk hutan rimba, tidak dibolehkan dipergunakan untuk hal-hal lainnya. Seiring dengan penghapusan marga, hutan adat inipun sudah tidak kelihatan lagi fungsinya. Semakin meluasnya pembangunan yang dilakukan, bertambahnya kebutuhan lahan, lokasi inipun mulai dirambah dan kemudian dialihfungsikan menjadi bentuk lain. Saat ini justru disekeliling tempat penemuan prasasti ini sudah penuh dengan kebun-kebun kelapa sawit.

Pengakuan dari warga setempat juga menyebutkan, hingga tahun 1980-an, di sekitar daerah tersebut masih ditemukan berbagai binatang-binatang seperti harimau, kancil, rusa, dan kijang. Berbagai tanaman seperti tercantum dalam naskah prasasti juga masih ada, seperti bambu, kelapa, pinang, dan sebagainya. Dulu ini masih cukup banyak ditemukan. Tetapi semenjak semakin gencarnya perluasan usaha masyarakat, daerah itupun terus dibuka dan akhirnya menjadi seperti sekarang. Selain dari adanya bangunan sederhana

---

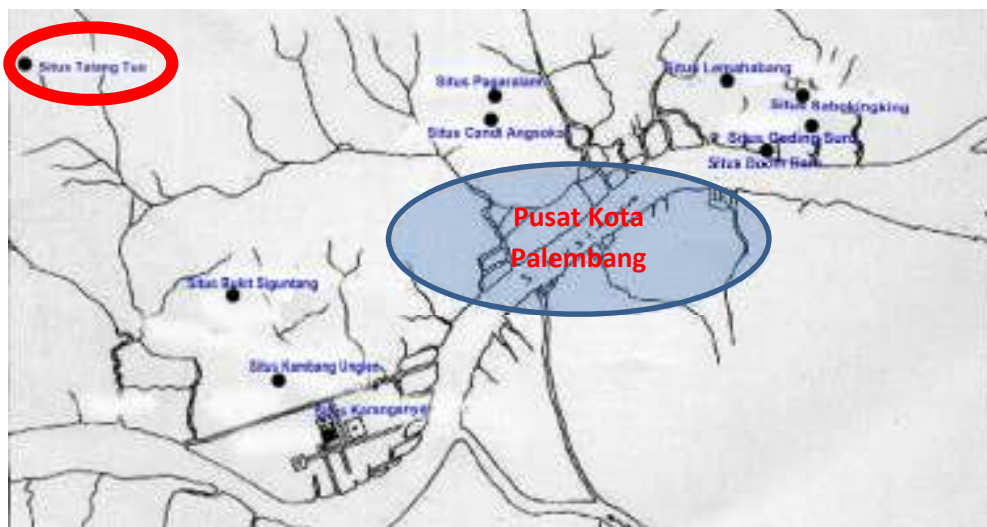
<sup>10</sup> Marga adalah unit pemerintahan lokal terendah di Sumatera Selatan yang dulunya pernah hidup. Sejak 1983 pemerintahan marga dihapuskan dan diganti dengan pemerintahan desa.



yang dibuat pemerintah sebagai bukti tempat penemuan prasasti (gambar 3), hampir tidak ditemukan lagi jejak-jejak sejarah bahwa disini dulunya pernah ada sebuah taman atau sebuah tempat pemberian amanat seorang raja besar di Sriwijaya.

Secara ringkas, posisi daerah Talang Kelapa dan Talang Tuwo bisa dilihat dari gambar berikut.

Gambar 5. Posisi daerah Talang Tuwo



Sumber : <http://pendidikansejarahunsri.blogspot.co.id/2016/04/palembang-dan-sriwijaya.html>

Gambaran di atas menunjukkan posisi daerah Talang Tuwo dibandingkan dengan posisi pusat kota Palembang. Daerah ini sekarang sudah berkembang dan sepertinya terus berubah lebih lanjut. Ini yang kemudian menjadi salah satu masalah terhadap upaya pelestarian dan pembenahan terhadap situs Prasasti Talang Tuwo. Dikatakan pula oleh Bambang Budi Utomo<sup>11</sup> bahwa Taman Sriksetra sekarang sedang dalam tahap pengurusan. Punggung talang di sekitar tempat ditemukannya prasasti Talang Tuwo sekarang merupakan kebun kelapa sawit, tetapi di sekitarnya, di beberapa tempat diperuntukkan bagi perumahan. Lebih parah lagi, jarak antar rumah sangat rapat, seperti layaknya kampung yang padat penduduk. Keadaan seperti

<sup>11</sup> <https://www.facebook.com/KejayaanSriwijaya/posts/335971909811510>

ini dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Sementara itu, di sebelah selatan Talang Tuwo tanahnya sedang dikeruk untuk menimbun daerah rawa di Palembang.

Dalam hal ini terdapat dua pihak yang berkorelasi langsung yaitu pemerintah dengan kebijakan untuk perlindungan, dan masyarakat setempat. Upaya perlindungan dari pemerintah tampak tidak maksimal, begitu juga aktifitas masyarakat yang terus melakukan perluasan aktifitas. Oleh karena itu, Arkeolog Bambang Budi Utomo<sup>12</sup> menyatakan keemasannya. Apa jadinya Kota Palembang kalau daerah bekas Taman Sriksetra penuh dengan perumahan? Tentu saja Kota Palembang akan mengalami banjir yang cukup parah. Air datang dari luapan Sungai Musi, ditambah lagi air juga datang dari daerah yang tinggi di sebelah utara dan barat laut kota bekas lokasi taman.

Fenomena seperti ini sudah terlihat dan dirasakan sekarang ini. Banjir di kala musim hujan sudah menjadi hal yang biasa. Palembang yang memang daerah perairan, memiliki banyak anak-anak sungai, kemudian ditimbun dan banjir jadi langganan. Di sisi lain, masyarakat sendiri juga tidak terlalu paham dan bahkan peduli dengan keberadaan prasasti ini. Pengetahuan publik terhadap adanya prasasti ini apalagi pemahaman terhadap isinya sangat minim.

Tetapi, sebagaimana disebutkan oleh Bambang Budi Utomo<sup>13</sup>, usaha penyelamatan bekas lokasi Taman Sriksetra dari penggusuran belum terlambat. Apabila ada niat baik dari Pemerintah Kota Palembang menjadikan kawasan ini sebagai daerah hijau atau daerah resapan air untuk Kota Palembang, itu berarti pemerintah kota sekaligus mendukung program penanaman sejuta pohon, juga dapat menjadi contoh kota di Indonesia dalam usaha melestarikan lingkungan kota. Semua tergantung pada niat baik.

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

## BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Prasasti Talang Tuwo sudah diyakini adalah salah satu peninggalan penting masa kerajaan Sriwijaya. Bukti-bukti arkeologis cukup banyak berbicara tentang ini. Banyak analisa juga diberikan mengenai prasasti ini. Ada yang menyebutnya ini adalah hadiah dari Sang Raja untuk rakyatnya, karena sudah banyak pencapaian dilakukan, sehingga raja memerlukan untuk mengucapkan rasa terimakasih. Pembangunan taman Sriksetra yang disebut pada Prasasti Talang Tuwo adalah bukti terhadap hal itu. Selain itu, ada juga yang menyebut ini adalah jalan bagi Dapunta Hyang Sri Jayanasa untuk mencapai status tertinggi dalam Budha, yaitu Bodhi. Melalui pencapaian ini diharapkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya bisa terjamin. Kalau ini dicapai, maka peningkatan status dalam agama Budha bisa diraih (lihat Coedes, 2014;60-63, Muljana, 2008;124).

Apapun itu, perdebatan soal motif dalam pembuatan prasasti ini, yang jelas prasasti ini merupakan amanah/pesan dari seorang raja kepada seluruh rakyatnya tentang penataan ruang dan lingkungan hidup. Mungkin saja ini adalah bentuk *pranidhana* yang merupakan motivasi raja untuk mencapai level seorang *bodhi*, tetapi amanah/petuah tetaplah ucapan seorang raja yang memiliki kekuatan hukum tersendiri.

Pada naskah prasasti tersebut sangat jelas membicarakan mengenai bagaimana tata kelola lingkungan dilakukan, bagaimana upaya penanaman pohon, pemeliharaan, dan termasuk aspek sosial. Aspek ini berhubungan langsung dengan perspektif dalam komunikasi lingkungan. Selanjutnya akan diuraikan satu persatu aspek makna nilai-nilai utama yang terkandung di dalam teks, terutama yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup. Selanjutnya akan

diuraikan soal perspektif komunikasi lingkungan pada konteks Prasasti Talang Tuwo. Bahasan tersebut akan mempertegas makna bahwa Prasasti Talang Tuwo adalah salah satu bentuk komunikasi lingkungan yang dilakukan.

#### IV.1. Nilai-Nilai Lingkungan Hidup pada Prasasti Talang Tuwo

Benarkah pada prasasti Talang Tuwo terdapat nilai-nilai lingkungan atau ada pesan-pesan khusus mengenai kelestarian atau penataan lingkungan? Ini bisa dimulai dari pemahaman terhadap naskah prasasti tersebut. Selengkapnya teks Prasasti Talang Tuwo bisa dilihat berikut ini.

Dalam sejarah penemuan arkeologi, naskah pada prasasti tersebut bisa

##### Kotak 1 Naskah Prasasti Talang Tuwo

*Pada tanggal 23 Maret 684 Masehi, pada saat itulah taman ini yang dinamakan Śrīksetra dibuat di bawah pimpinan Sri Baginda Śrī Jayanāśa. Inilah niat baginda: Semoga yang ditanam di sini, pohon kelapa, pinang, aren, sagu, dan bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan, demikian pula bambu haur, waluh, dan pattum, dan sebagainya; dan semoga juga tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan, dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk, yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan.*

*Jika mereka lapar waktu beristirahat atau dalam perjalanan, semoga mereka menemukan makanan serta air minum. Semoga semua kebun yang mereka buka menjadi berlebih (panennya). Semoga suburlah ternak bermacam jenis yang mereka pelihara, dan juga budak-budak milik mereka. Semoga mereka tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa karena tidak bisa tidur. Apa pun yang mereka perbuat, semoga semua planet dan bintang menguntungkan mereka, dan semoga mereka terhindar dari penyakit dan ketuaan selama menjalankan usaha mereka. Dan juga semoga semua hamba mereka setia pada mereka dan berbakti, lagipula semoga teman-teman mereka tidak mengkhianati mereka dan semoga istri mereka menjadi istri yang setia. Lebih-lebih lagi, di mana pun mereka berada, semoga di tempat itu tidak ada pencuri, atau orang yang mempergunakan kekerasan, atau pembunuh, atau penzinah.*

*Selain itu, semoga mereka mempunyai seorang kawan sebagai penasihat baik; semoga dalam diri mereka lahir pikiran Boddhi dan persahabatan (...) dari Tiga Ratna, dan semoga mereka tidak terpisah dari Tiga Ratna itu. Dan juga semoga senantiasa (mereka bersikap) murah hati, taat pada peraturan, dan sabar; semoga dalam diri mereka terbit tenaga, kerajinan, pengetahuan akan semua kesenian berbagai jenis; semoga semangat mereka terpusatkan, mereka memiliki pengetahuan, ingatan, kecerdasan. Lagi pula semoga mereka teguh pendapatnya, bertubuh intan seperti para mahāsattwa berkekuatan tiada bertara, berjaya, dan juga ingat akan kehidupan-kehidupan mereka sebelumnya, berindra lengkap, berbentuk penuh, berbahagia, bersenyum, tenang, bersuara yang menyenangkan, suara Brahmā.*

*Semoga mereka dilahirkan sebagai laki-laki, dan keberadaannya berkat mereka sendiri; semoga mereka menjadi wadah Batu Ajaib, mempunyai kekuasaan atas kelahiran-kelahiran, kekuasaan atas karma, kekuasaan atas noda, dan semoga akhirnya mereka mendapatkan Penerangan sempurna lagi agung. (Terjemahan dari naskah asli oleh George Coedes tahun 1930).*

dikatakan adalah teks terpanjang pada sebuah prasasti yang pernah ditemukan. Teks ini juga memiliki karakteristik, yaitu berbicara soal penataan lahan, yang dalam bahasa arkeolog, Nurhadi Rangkuti<sup>14</sup>, seorang arkeolog senior disebutkan berbicara tentang Kemakmuran. Secara sepintas pembacaan pada teks, sebenarnya ini sudah menggambarkan bagaimana persoalan lingkungan hidup dibicarakan oleh Raja Sriwijaya kala itu. Aspek lingkungan hidup bisa dirunut satu persatu berdasarkan naskah teks yaitu:

1. Penanaman dan keragaman tanaman

Gagasan mengenai ini tampak jelas pada paragraf pertama naskah prasasti. Sebagaimana mana kutipannya,

*“...Semoga yang ditanam di sini, pohon kelapa, pinang, aren, sagu, dan bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan, demikian pula bambu haur, waluh, dan pattum, dan sebagainya; dan semoga juga tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan, dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk, yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan...”*

Kalimat di atas secara jelas dan tersurat merupakan harapan dari seorang raja terhadap pentingnya menanam tumbuhan. Menanam tumbuh-tumbuhan sepertinya menjadi prioritas dari Sang Raja, terlihat dari penempatan di awal teks. Taman yang dibuat diprioritaskan pada jenis tanaman yang sangat lazim saat itu dan tampak merupakan jenis tanaman yang diperkirakan sangat dikenal masyarakat. Jenis tanaman yang disebut yaitu

- a. Kelapa
- b. Pinang
- c. Aren
- d. Sagu
- e. Pohon buah-buahan
- f. Bambu Haur dan Waluh
- g. Pattum

---

<sup>14</sup> <http://www.mongabay.co.id/2016/07/24/opini-amanat-prasasti-talang-tuo-dan-taman-sriwijaya-untuk-kemakmuran-makhluk-hidup/>

Semua jenis tanaman tersebut adalah tanaman yang akrab dengan masyarakat, bahkan hingga saat ini. Satu jenis yang belum teridentifikasi (mungkin karena faktor bahasa) adalah Pattum. Tetapi jenis lainnya jelas adalah jenis tanaman pangan yang buah atau batangnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Terlihat juga bahwa kelapa, pinang, aren dan sagu sudah ada sejak abad ke 7 M. Dari ketiga jenis tersebut bisa dikatakan yang dikategorikan sebagai tanaman pangan adalah sagu, sementara kelapa, pinang, dan aren adalah tanaman untuk pengolah makanan pokok. Ini kiranya sejalan dengan hasil riset dari Nadirman Haska<sup>15</sup> bahwa sagu adalah makanan asli orang Indonesia. Ketentuan mengenai sagu sebagai makanan asli Indonesia, dikatakan Haska sudah banyak terpahat pada relief-relief candi yang ada di Nusantara.

Naskah pada prasasti tersebut juga menunjukkan bahwa tanaman pangan yang dikenal saat itu adalah sagu. Tidak ada penyebutan padi sebagai tanaman yang wajib ditanam, padahal ini adalah tanaman yang banyak dikenal belakangan ini. Hal ini mengindikasikan bahwa makanan pokok warga sebenarnya adalah sagu, bukan beras. Kemas Ari Panji<sup>16</sup> berkata bahwa di era Sriwijaya memang terlihat sekali bahwa masyarakat belum mengenal tanaman padi. Padi adalah tanaman dari luar yang kemudian dibawa ke Nusantara. Berbicara soal tanaman lokal, maka apa yang tercantum pada prasasti Talang Tuwo adalah daftar yang sangat jelas.

“beruntungnya, pada prasasti Talang Tuwo ini tercantum dengan jelas. Semua sudah lengkap dan jelas sekali, itu adalah tanaman-tanaman yang memang endemik. Tidak ada menyebut beras atau tanaman lain yang sekarang kita kenal, artinya inilah tanaman lokal di Sriwijaya.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> <https://finance.detik.com/industri/3108281/bukan-beras-ini-makanan-asli-ri-sejak-zaman-kerajaan>

<sup>16</sup> Wawancara tanggal 1 November 2017

<sup>17</sup> Ibid.

Tampak juga pada naskah prasasti tersebut bahwa raja memerintahkan untuk menanam ragam tumbuhan, bukan sejenis. Ini kiranya yang patut diperhatikan karena punya korelasi langsung dengan kehidupan masyarakat. Saat masa Sriwijaya, tumbuhan tersebut tentunya bisa tumbuh bebas dimana saja, tetapi ada anjuran agar juga ditanam secara khusus, dan tidak satu jenis. Semangat menanam tanaman secara bervariasi berarti tidak menganjurkan untuk pola-pola monokultur. Besar kemungkinan ini berkaitan dengan fungsi tanaman adalah untuk kemakmuran semua masyarakat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang.

Adanya tanaman monokultur biasanya sangat erat dengan keuntungan secara finansial, terutama pada orang yang menguasai lahan dan jenis pertanian tersebut. Sebuah artikel menyebutkan bahwa pemilihan pola tanam monokultur sangat dipengaruhi oleh tujuan suatu usaha tani dan juga keberadaan akan faktor-faktor pertumbuhan khususnya air. Untuk suatu usaha tani dengan tujuan komersial, terdapat kecenderungan untuk memilih pola tanam monokultur. Pada usaha tani komersial, keuntungan secara ekonomi merupakan tujuan akhir yang akan dicapai. Pada monokultur bisa mengintensifkan tanaman yang paling memiliki nilai ekonomis sehingga hasil produksi pertanian bernilai ekonomi tinggi akan tinggi pula. Selain itu, pada penanaman monokultur akan lebih mudah dan murah dalam perawatan karena hanya ada satu tanaman. Kemudahan dan kemurahan ini akan semakin mengefektif dan mengefisienkan proses produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan suatu usaha tani.<sup>18</sup>

Hal ini juga bisa dilihat dari hasil riset Wahyudi dan Panjaitan (2013) bahwa pola monokultur justru mendegradasi tanaman lokal yang selama ini dikenal masyarakat, serta rawan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Metode agroforestri yang lekat dengan keragaman

---

<sup>18</sup> <http://www.anakagronomy.com/2013/01/pola-tanam-monokultur.html>

tanaman, jelas lebih baik dan lebih memberikan pilihan bagi komunitas setempat.

Oleh karena itu, gagasan dari Raja Sriwijaya untuk menanam tanaman yang bersifat multikultur, bisa dikatakan sebagai fakta penting bahwa kemakmuran harus dicapai dari alam dan tanaman yang ditanam. Kemakmuran tidak akan bisa dicapai tanpa adanya perimbangan terhadap apa yang ditanam dan diproduksi dari sebuah lahan.

## 2. Penanaman tanaman ramah lingkungan (bambu, waluh, pattum dll)

Di atas sudah dijelaskan bahwa tanaman yang dianjurkan oleh Raja adalah tanaman yang memiliki manfaat bagi manusia setempat. Bambu, Pinang, Kelapa, Sagu, Aren dan buah-buahan adalah tanaman yang dianjurkan. Tanaman-tanaman ini adalah tanaman lokal yang sudah ada di daerah tersebut.

Dari semua jenis tanaman tersebut, bisa dikatakan adalah tanaman-tanaman yang diklaim ramah terhadap lingkungan. Bambu adalah salah satunya. Hasil riset dan kajian banyak pihak menyebutkan kehandalan bambu, baik dari sisi penanaman, penggunaan lahan, maupun kegunaan pasca panen. Bambu juga paling mudah tumbuh dan mempunyai kecepatan dalam pertumbuhan. Bisa dipastikan ada makna bahwa bambu memiliki keramahan terhadap lingkungan setempat, sebagai sebuah alasan untuk menanam tanaman ini. Bambu terkenal sebagai tumbuhan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan mudah ditanami.

Begitu pula dengan tanaman kelapa, yang bisa dimanfaatkan hasilnya dari semua sisi. Baik daun, buah, batang, tempurung, sabut bahkan janurnyapun bisa digunakan oleh warga. Ini menandakan kelapa adalah tanaman yang sangat fungsional sekaligus juga tanaman yang ramah lingkungan. Tanaman ini bisa tumbuh di berbagai tempat, khususnya kawasan dataran rendah dan pinggiran pantai. Kelapa tidak



membutuhkan asupan air yang banyak dan tidak menyebabkan kerusakan hara tanah.

Hal yang sama juga ada pada tanaman pinang, jenis tanaman yang dikenal sebagai bahan obat-obatan, kosmetik, tekstil dan sebagainya. Masyarakat dulu terbukti juga sudah memanfaatkannya. Ini juga ramah lingkungan, tidak merusak hara tanah, bisa tumbuh tanpa mengganggu tanaman lain, dan gampang tumbuh.

Dalam sebuah tulisannya, arkeolog Bambang Budi Utomo berkata bahwa tanaman-tanaman yang disebut dalam Prasasti Talang Tuwo, itu masih ditemukan di daerah tempat ditemukannya. Tanaman ini sudah ada sejak dulu dan memang bisa dikatakan endemik daerah tersebut.

Sagu dan aren juga sama. Dua jenis tanaman pangan ini bisa tumbuh dengan mudah dan berdampingan dengan tanaman lain. Ciri khasnya adalah sebagai tanaman dataran rendah dan endemik di daerah perairan. Kecuali aren yang banyak juga ditemukan di areal perbukitan atau dataran tinggi.

Tanaman yang ramah lingkungan ini berpadu dengan metode penanaman yang bercorak multikultur. Ini semakin membuat apa yang ditanam semakin memberikan efek positif. Hasil riset Wahyudin dan Panjaitan (2013) juga menyebutkan bahwa keragaman tanaman yang ditanam memberikan efek positif bagi tanah, karena kecenderungan menanam satu jenis tanaman dalam jumlah massif akan memberikan pengaruh kurang baik bagi unsur hara tanah. Ini bisa dikatakan sebagai alasan penting dan klaim yang diberikan oleh Raja Sriwijaya, di masa segala macam teknologi belum ditemukan oleh manusia, tetapi ternyata memiliki korelasi dengan aspek pengetahuan ilmiah dewasa ini.

### 3. Pengaturan tata air (bendungan dan kolam)

Ketentuan tentang pengaturan air jelas terlihat pada naskah prasasti. Kutipannya yaitu,

*“dan semoga juga tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan, dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk, yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan*

Teks di atas jelas menyebutkan soal perlunya pengaturan tata air dalam bentuk bendungan dan kolam-kolam. Ini menarik karena masalah air sudah diperhitungkan sejak awal oleh sang Raja, padahal di kala itu segalanya masih sangat terbatas dan manusiapun belum begitu banyak. Lahan masih luas, air juga masih melimpah, tetapi perlunya pengaturan itu sudah dilakukan oleh Raja. Memang pada prasasti tidak menyebutkan secara teknis tata cara pengaturan air yang dilakukan, tetapi sudah bisa dilihat bahwa istilah bendungan (hasil terjemahan) bermakna sebagai sebuah rekayasa untuk mengatur air yang diperlukan. Begitu juga dengan istilah kolam, yang bisa dimaknai sebagai tempat berkumpulnya air untuk memelihara ikan atau bisa juga untuk tempat penampungan air.

Kemampuan penataan air yang dilakukan, sampai sekarang masih terlihat fakta konkrit, terutama di kawasan Situs Karang Anyar, Palembang. Di daerah ini terlihat beberapa kanal yang dipercaya berasal dari kerajaan Sriwijaya dan menunjukkan kemampuan luar biasa dalam merancang tata air yang baik<sup>19</sup>. Adanya kanal-kanal ini memungkinkan air dari sungai Musi masuk hingga ke daratan tetapi tidak mengganggu pemukiman. Air ini berfungsi untuk mengairi kebun-kebun yang diolah warga, serta berfungsi sebagai penampung air.

Tampak jelas bahwa pengaturan tata air menjadi prioritas raja saat itu, dan dalam prasasti juga disebutkan bahwa ini berguna untuk kebaikan semua makhluk. Harapannya adalah agar adanya kebahagiaan bagi semua makhluk yang ada. Bisa pula dimaknai disini bahwa kebahagiaan semua makhluk salah satunya berawal dari bagaimana air dikelola dan diatur oleh masyarakat setempat.

---

<sup>19</sup> Sarwidaningrum dalam <http://lingkarlsm.com/situs-sriwijaya-kian-tersisih/>

Dapat pula dipahami disini bahwa pengaturan air karena memang pada saat itu, wilayah perairan menjadi prioritas. Masyarakat sangat tergantung kehidupannya kepada air. Air menjadi sumber kehidupan, sumber mata pencaharian, sehingga dalam bahasa daerah di Sumatera Selatan sering disebut istilah Batang Hari. Ini mengidentikkan dengan pandangan bahwa air adalah nafas bagi kehidupan. Taufik Rahzen<sup>20</sup> mengatakan bahwa teks dalam prasasti Talang Tuwo tidak saja bicara soal tata kelola lahan, tapi juga soal pengairan dan tanaman. Disaat dulunya transportasi darat masih terbatas, maka pengaturan perairan menjadi sangat penting. Dapat dipahami prasasti ini sudah lebih dulu berbicara soal air.

#### 4. Pengaturan lingkungan untuk semua makhluk hidup

Tujuan pengaturan tata ruang lahan dan wilayah serta jenis-jenis tanaman yang akan ditanam didaerah tersebut, tidak saja diperuntukkan bagi manusia atau rakyat di sekitar wilayah tersebut. Kutipan teksnya menunjukkan hal berikut,

*"... dan semua amal yang saya berikan, dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk..."*

Kalimat di atas secara jelas menegaskan bahwa apa yang dilakukan, amal yang diberikan oleh Sang Raja, bisa bermanfaat untuk kebaikan semua makhluk. Disini, semua makhluk bisa dimaknai sebagai semua hal yang bernyawa, semua yang hidup di atas bumi ini. Tentu saja ini bukan manusia semata, tetapi juga tumbuhan, hewan, dan berbagai makhluk lainnya. Alam ataupun taman yang dibuat bukan saja diperuntukkan untuk kepentingan satu kelompok, tetapi siapapun yang punya kepentingan terhadap hal tersebut. Tujuan akhirnya adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan semua pihak.

---

<sup>20</sup> <http://www.mongabay.co.id/2015/06/10/berdasarkan-prasasti-talang-tuo-perayaan-hari-bumi-setiap-tahun-diusulkan-pada-23-maret-alasannya/>

Gagasan mengenai semua makhluk ini, diyakini kebenarannya oleh arkeolog Nurhadi Rangkuti<sup>21</sup> yang menyatakan bahwa kerajaan Sriwijaya yang dipengaruhi oleh agama Budha, terkenal pada kecintaan dan kepeduliannya terhadap semua makhluk hidup. Ini juga merupakan inti dari ajaran Budha. Oleh karena itu, berbagai penemuan arkeologi juga mengindikasikan keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungan alam setempat, yang artinya juga dengan semua makhluk hidup yang ada. Belum pernah ditemukan adanya perilaku aparat kerajaan yang tidak bersahabat dengan alam, tetapi selalu menyesuaikan diri. Ini terbukti dengan peninggalan yang mengikuti struktur alam, sehingga kelestarian semua makhluk juga terjaga.

Dedi Mohammad Santun<sup>22</sup> dalam sebuah artikelnya menjelaskan hal itu, bahwa Sri Jayanasa memiliki kemampuan dalam membagi kekayaan, bukan saja bagi manusia yang diperintahnya, namun juga bagi seluruh dan segenap makhluk yang ada dalam puseran kekuasaannya. Makhluk hidup disini adalah siapapun itu, baik manusia ataupun hewan.

Dijelaskan juga oleh Dedi M Santun bahwa pembukaan areal ini (Talang Tuwo) oleh Raja Sriwijaya tentu punya motif tersendiri. Pembukaan tanah lama, daerah Talang Tuwo merupakan wilayah paling ujung sebelah utara Kota Palembang yang tampaknya kurang produktif bagi ladang dan kebun dibuka menjadi lahan baru yang lebih produktif dalam bentuk taman pangan, sandang dan papan. Tampaknya, daerah taman di Talang Tuwo ini merupakan lahan yang baru dibuka yang diharapkan dan memang menjadi ladang dan kebun masyarakat Palembang waktu itu. Sasaran ini kiranya yang ingin dicapai sehingga Talang Tuwo jadi pilihan.

---

<sup>21</sup> Wawancara tanggal 10 Oktober 2017

<sup>22</sup> Jurnal Mozaik, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, *Volume 11 Nomor 1 Januari - Juni 2012*

## 5. Komitmen pimpinan terhadap lingkungan hidup

Raja adalah pimpinan tertinggi, dalam hal ini adalah Sri Baginda Sri Jayanasa. Oleh karena itu, butir-butir dalam prasasti juga menunjukkan kekuatan dan kekuasaan seorang raja sebagai pimpinan tertinggi. Kata-kata "... *semoga amal yang saya berikan....mendatangkan kebahagiaan..*" adalah penekanan seorang raja terhadap kebaikan semua pihak, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Memang pada teks tersebut kemudian menimbulkan ragam tafsiran dikalangan ahli sejarah dan arkeolog. Menurut Muljana (2008;124), ini sebenarnya adalah bentuk hadiah raja kepada rakyatnya, karena itu ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Sebaliknya, menurut Coedes, ini adalah bentuk upaya pencapaian status *bodhi* dari sang Raja. Syarat pencapaian *bodhi* ini diwujudkan dengan amal baik yang dilakukannya. Tetapi yang jelas komitmennya adalah lingkungan hidup setempat.

Semua teks yang tertulis menunjukkan komitmen tersebut. Bisa dibayangkan disini, di abad 7 M, seorang raja sudah memiliki komitmen terhadap hal ini. Membangun sebuah taman pada dasarnya adalah sebuah komitmen untuk membangun ruang publik, yang sasaran akhirnya adalah penyelamatan lingkungan hidup. Apapun alasan pendirian taman ini, yang jelas ini adalah sebuah komitmen lingkungan yang memang harus dikedepankan. Dapunta Hyang sudah memulai itu.

Pernyataan dalam teks bisa juga dipadukan dengan pernyataan lainnya pada berbagai prasasti lain yang semuanya menunjukkan kekuasaan dan pengaruh seorang raja. Apabila seorang raja sudah berkomitmen, akan dituruti pula sampai ke level terbawah. Berpantang sekali melawan titah seorang raja, apalagi di ranah masyarakat Melayu zaman itu.

Komitmen raja terhadap lingkungan hidup ini, disebutkan oleh Dedi M Santun, sebagai salah satu bentuk komitmen seorang pimpinan.

Ini membuat Sri Jayanasa dikenal sebagai raja yang teguh pendirian dan peduli dengan keadaan disekitarnya. Sosok kharisma Jayanasa dapat ditelusuri dalam konsep bercirikan dualisme etika, yang bukan dualisme kosmos. Menurut Evers (1967: 104), dualisme etika, biasanya akan berhadapan antara konsep *lokottara* dan *laukika*. *Lokottara*, dunia lain terkait dengan dunia nanti setelah kelahiran kembali dan berhadapan dengan *laukika* atau dunia ini, yang terkait dengan dunia manusia sekarang. Dalam pendapat Clough (1982: 544), ada pertalian antara sang Buddha dan para dewa melalui kedua orientasi tata nilai yang berlawanan ini. Artinya, raja memiliki posisi, secara teoritis ia berada di dunia *lokottara* sebab berkaitan dengan unsur *uttara*, kedigdayaan, kedaulatan tertinggi tetap dalam prakteknya, raja pasti terlibat dalam urusan duniawi, *laukika*. Ketika berada di dunia *lokottara*, ia menjadi Bodhisatwa, sang Buddha dan ketika berada di *laukika* ia menjelma menjadi *Chakkravarthin*, penakluk dunia, ingat epiteton “pembunuh atau penggempur musuh-musuh”, dalam prasasti Ligor B (Santun, 2012).

Oleh karena itu, terhadap masalah tata ruang yang berimbas pada aspek lingkungan, merupakan janji dan komitmen yang diucapkan seorang raja yang kemudian diwujudkan dalam pembentukan Taman Sriksetra. Kepemimpinan seorang Jayanasa terlihat sangat kuat dan itu dipergunakannya untuk menjalankan kerajaan. Sektor penataan lingkungan kemudian menjadi salah satu kunci keberhasilan Sriwijaya.

Komitmen dan kekuatan seorang raja ini memang fenomena sekali di kala itu. Dari berbagai prasasti yang telah ditemukan, banyak diantaranya berbicara tentang persumpahan. Ini bisa dilihat dari teks prasasti Kota Kapur, Karang Brahi, dan Telaga Batu. Apa makna persumpahan ini? Ini menunjukkan bahwa raja Sriwijaya bukanlah orang yang lemah. Ia merupakan sosok pemimpin yang tegas dan tidak segan-segan untuk mengutuk dan bahkan membunuh seseorang, jika sudah melakukan khianat terhadap dirinya. Piagam yang disebutkan di atas

(Karang Brahi, Kota Kapur, Telaga Batu) jelas berbicara tentang hal tersebut. Dalam tradisi-tradisi Melayu selanjutnya, metode persumpahan ini juga banyak diteruskan di kemudian hari.

Selain kekuatan sumpah, tersirat juga bahwa itu menunjukkan aura seorang raja, Sri Jayanasa. Lebih tepatnya wibawa dan kharisma. Ini terejawantahkan dalam setiap tindakannya, termasuk dalam pengaturan lingkungan sekitar. Dedi M Santun (2012) mengatakan hal itu dalam kesimpulannya bahwa dasar legitimasi bagi masyarakat terhadap kepemimpinan ideal, khususnya terhadap Sri Jayanasa adalah kemampuan berprestasi dan kharisma yang dimiliki.

Aspek prestasi tampak dari berbagai penjelasan pada prasasti-prasasti yang ada. Prestasi di bidang militer, ini ditunjukkan dengan kemampuan melakukan ekspansi ke daerah lain dan selalu dengan kemenangan. Hal ini akan memberikan rasa percaya terhadap sang raja. Kemudian prestasi dalam memakmurkan masyarakatnya. Ini juga menonjol dan kemudian memberikan legitimasi pada dirinya. Naskah Prasasti Talang Tuwo sudah jelas menunjukkan prestasi itu, yaitu kemampuannya untuk mengatur kawasan, berbagi ruang antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Ini adalah hal yang tentunya sulit ditemukan pada sosok pemimpin lainnya, terutama pada konteks zaman saat ini.

Dedi M Santun mengatakan juga bahwa Jayanasa jelas memiliki kualitas kepribadian yang tentunya berbeda dari orang-orang lain pada umumnya. Ia dianggap sebagai manusia unggul yang memiliki adikodrati, sifatnya luar biasa terlihat dari berbagai pujian yang diberikan untuknya dalam bait Prasasti Talang Tuwo tersebut. Dasar inilah yang kemudian membuat penerimaan dan gagasan dari Sang Raja menjadi hal penting dan positif bagi siapapun juga. Legitimasi lain tampak pada tindakan berprestasi di bidang militer dan juga pembangunan. Dapat dilihat dari acuan berbagai prasasti yang dibuatnya, Jayanasa dianggap sebagai

tokoh pertama dan utama yang mampu membangun dan mengembalikan kejayaan Sriwijaya.

#### 6. Keyakinan kepada Yang Maha Kuasa

Teks pada prasasti juga menunjukkan bahwa seorang raja selalu percaya dan tunduk pada kekuasaan yang lebih tinggi yaitu Yang Maha Kuasa. Kepercayaan yang dianut di masa Sriwijaya adalah ajaran Budha, oleh karena itu Yang Maha Kuasa juga mengacu pada Sang Budha. Kutipan teks cukup banyak berbicara soal ini.

*“... semoga dalam diri mereka lahir pikiran Boddhi dan persahabatan..... Suara Brahma..... Semoga mereka dilahirkan sebagai laki-laki, dan keberadaannya berkat mereka sendiri; semoga mereka menjadi wadah Batu Ajaib, mempunyai kekuasaan atas kelahiran-kelahiran, kekuasaan atas karma, kekuasaan atas nada, dan semoga akhirnya mereka mendapatkan Penerangan sempurna lagi agung.”*

Tampak sekali pada teks di atas bahwa Budha adalah sesuatu yang harus dicermati dan dijadikan acuan dalam kehidupan. Sosok ini dianggap sebagai penguasa dan penentu dalam kehidupan, oleh karena itu apapun yang dilakukan oleh manusia seharusnya mendapatkan restu dan kesesuaian dengan perintah dari Yang Maha Kuasa. Aspek religius ini menjadi penting dan memperlihatkan ciri khas dari sosok kerajaan di masa lalu.

Penyerahan diri ke Yang Maha Kuasa dilandasi oleh keyakinan bahwa lahan dan semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Yang Maha Kuasa. Ini bisa dikonfirmasi dengan bagaimana keterangan-keterangan pada prasasti lain seperti Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, dan sebagainya. Kata-kata “wahai sekalian Dewata...” menjadi penting, sebuah pengakuan bahwa segala sesuatunya harus atas izin Yang Maha Kuasa.

Pada Prasasti Talang Tuwo secara jelas menegaskan bahwa Dapunta Hyang sangat tunduk dan merupakan penganut ajaran Budha yang patuh. Analisis dari Coedes (2014) dan juga Muljana (2008) menyatakan hal itu, bahwa Sri Jayanasa merupakan penganut ajaran



Budha, dan bahkan sangat berambisi untuk mencapai level *bodhi*. Kepatuhannya pada Budha, banyak tergambar dari berbagai prasasti yang ditemukan, termasuk prasasti persumpahan. Nama Budha dan dewa selalu diikutsertakan, dan ini menunjukkan pertalian yang kuat antara raja dengan agama Budha.

Kekuatan hubungan dengan ajaran Budha ini, salah satunya tergambar dari bagaimana keberadaan seorang tokoh agama Budha dari China bernama It-Sing yang bermukim dan mengembangkan banyak ajaran di Sriwijaya. Begitu juga dengan penganut Budha lainnya, dimana mereka mendapatkan kedudukan yang terhormat di kerajaan Sriwijaya. Tulisan dari Coedes, Kulke dan juga Muljana menjelaskan juga tentang hal ini, dimana ajaran Budha menjadi agama utama yang dianut masyarakat dan juga kerajaan. Ajaran Budha yang dianut di sini adalah aliran *Tantrisme*, kendati Dapunta Hyang juga tidak mempersoalkan dengan ajaran-ajaran lainnya.

Muljana (2008;47) menjelaskan, saat It-Sing pulang dari Nalanda, ia mampir ke Sriwijaya sebelum ke China. Selama 4 tahun di Sriwijaya ia menulis ulang teks-teks Budhis dan menerjemahkannya dari bahasa Sanskrit ke Bahasa China. Jumlah naskah ini mencapai 4.000 buah. Ini menunjukkan sekali bahwa ajaran Budha memang ajaran yang sangat kental dipakai di Sriwijaya.

Dalam sebuah tulisannya, Kabib Soleh (2017) memberikan penjelasan pula bahwa pembuatan prasasti Talang Tuwo oleh raja Sriwijaya telah menggambarkan sebuah kepemimpinan yang sangat religius dalam agama Budha dan sekaligus pemimpin yang adil dan bijaksana kepada rakyatnya. Prasasti Talang Tuwo adalah usaha Dapunta Hiyang Sri Jayanasa yang bertujuan untuk mensejahterakan pemerintahan dan rakyatnya tertib, teratur sesuai dengan dharma sekaligus menyelamatkan rakyatnya dari samsara atau penderitaan dunia. Usaha itu dilakukan pada saat Dapunta Hiyang Sri Jayanasa telah

mampu atau dianggap telah mencapai tingkat kedewaan (sebagai dewa di dunia) dalam masa pemerintahannya. Proses pendewaan ini secara normatif diperoleh melalui Tantra, sebagai dewaraja ia dapat menjangkau pengertian yang luas dalam usaha menyelamatkan segala makhluk atas penderitaannya, dan seluruh wujud usaha itu antara lain adalah pembuatan Taman Sriksetra.

Menjadi jelas bahwa pembangunan Taman Sriksetra merupakan sebuah usaha penataan lingkungan, pengaturan tata ruang, yang semuanya didasarkan pada keridhoan dan kepatuhan pada perintah Yang Maha Kuasa, Sang Budha. Untuk bisa mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa, jalan terbaik adalah senantiasa berbuat baik kepada semua makhluk. Bagi Sri Jayanasa, membangun taman adalah bentuk baktinya kepada Sang Budha, sehingga posisinya dalam ajaran Budha bisa naik dengan tingkat kedewaan yang lebih tinggi.

#### 7. Keserasian hubungan sosial

Keserasian hubungan yang terjalin, terutama antar sesama anggota masyarakat memiliki keterkaitan dalam pengelolaan hubungan masyarakat dengan lingkungan yang ada. Aspek hubungan sosial menjadi penting untuk dilakukan dan diperhatikan karena pengelolaan lingkungan kemudian akan berkorelasi dengan hubungan sosial yang terjalin

Kata-kata pada kalimat,

*“... Selain itu, semoga mereka mempunyai seorang kawan sebagai penasihat baik; semoga dalam diri mereka lahir pikiran Boddhi dan persahabatan...”*

Ungkapan di atas memberikan makna mendalam tentang keserasian hubungan yang harus dilakukan antar sesama masyarakat. Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan realitas dan kondisi yang ada memperlihatkan bahwa aspek kesadaran terhadap lingkungan harus diimbangi dan diiringi dengan keinginan untuk menjalin hubungan baik. Semua teks diatas dalam format lengkapnya memiliki keterkaitan

dengan keserasian hubungan dengan alam semesta, dan semuanya berujung pada keyakinan bahwa kesadaran semua makhluk adalah untuk menciptakan persahabatan. Persahabatan yang baik adalah inti dari keserasian hubungan sosial yang terjalin.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa motivasi Dapunta Hyang dalam membangun taman ini bisa disebabkan karena keinginannya untuk berbuat baik kepada rakyat, sehingga posisi *bodhi* bisa diraihnya. Alasan seperti ini menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang, terutama pemimpin haruslah mendatangkan kebaikan bagi semua pihak, terutama sesama manusia. Ini adalah prinsip dasar dalam menjalin hubungan sosial. Keterikatannya kepada ajaran Budha juga memperkuat alasan ini sehingga bisa dimaklumi, seorang raja tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya pengakuan kebaikan dari orang lain. Berbuat baik terhadap masyarakat yang dipimpinnya adalah kata kunci penting.

Perbuatan baik apa yang bisa dilakukan yang kemudian akan berefek pada keserasian sosial hubungan raja dengan rakyatnya? Tentu saja ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kehidupan sehari-hari masyarakat sangat bergantung dengan alam. Mata pencaharian utama didasarkan pada siklus dan kondisi alam. Mengolah lahan pertanian serta mencari ikan di wilayah perairan adalah hal yang bisa dilakukan. Untuk itulah, perbuatan baik yang bisa dilakukan yang kemudian berefek pada keserasian sosial di masyarakat, adalah dengan fokus di sektor pertanian dan perikanan. Prasasti Talang Tuwo semuanya berbicara tentang hal ini. Disinilah keserasian sosial yang terjalin sangat tergantung pada aspek tersebut.

Berdasarkan semua penjelasan di atas tampak bahwa Prasasti Talang Tuwo memang memiliki tingkat kepedulian terhadap lingkungan yang sangat tinggi. Nilai-nilai utama dari pengelolaan lingkungan ada dalam teks. Apapun

analisis yang diberikan oleh para arkeolog dan sejarawan mengenai motif membangun Taman Sriksetra, tetapi yang jelas ini punya makna besar bagi lingkungan saat itu dan juga saat ini. Masing-masing nilai yang dijabarkan di atas sudah menunjukkan hal tersebut, sehingga bisa memberikan sebuah sudut pandang bahwa lingkungan hidup sudah jadi titik perhatian sejak masa lalu.

#### **IV.2. Pola Struktur Pesan pada Prasasti Talang Tuwo**

Mengacu pada metode analisis isi teks sebagaimana disebutkan oleh Bungin (2003) bahwa banyak variasi dalam melakukan analisis isi pada media atau teks. Salah satunya, dan kemudian dipakai dalam penelitian ini adalah metode dengan membagi gagasan melalui tiga aspek, yaitu :

##### **a. Isi**

Struktur isi berkaitan dengan kondisi pada saat teks dibuat, yang berhubungan dengan kondisi sosial budaya yang ada saat itu. Ini lebih pada konteks yang terjadi, bisa pada masa teks itu dibuat atau dipublikasikan, dan bisa pula pada saat sekarang (relevansi). Disebabkan naskah prasasti Talang Tuwo dibuat ratusan tahun yang lalu, dimana sangat sulit untuk memberikan analisis terhadap situasi sosial kala itu, maka struktur isi teks dihubungkan dengan realitas sosial saat ini. Pembahasan tentang realitas sosial di zaman Sriwijaya, akan tetap dilakukan dengan melihat dan mengkaji beberapa hasil riset pihak lain tentang situasi sosial masyarakat di saat itu.

Kajian dari Ricklefs (2005;27-28) mengatakan bahwa dilihat dari aspek kependudukan, sebenarnya masa Sriwijaya sudah sangat heterogen dan bervariasi. Saat itu sudah terdapat komunitas Cina, Arab, India, dan etnis lokal lainnya. Kondisi ini besar kemungkinan karena Palembang sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya adalah wilayah yang sangat strategis dan jalur perdagangan penting. Akibatnya situasi sosial

masyarakat yang variatif tersebut ikut pula mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh penguasa kala itu.

Realitas bahwa di masa Sriwijaya sudah ada variasi penduduk memang sangat dimungkinkan sekali, karena Sriwijaya adalah kerajaan besar yang kemudian menjadi magnet bagi pihak lain untuk datang ke daerah ini. Hal seperti ini sudah disampaikan dengan jelas pada teks Prasasti Talang Tuwo yang mengatakan bahwa apa yang tertulis dalam prasasti ini adalah untuk kemakmuran semua makhluk. Semua makhluk artinya siapapun yang berkepentingan dengan hal tersebut. Tidak ada penyebutan etnis pada teks tersebut, sehingga bisa diisyaratkan bahwa ini mengarah pada semua pihak yang tentu saja sangat mendukung keragaman dan pluralisme. Artinya disini, kelahiran Prasasti Talang Tuwo berhubungan erat dengan keyakinan bahwa keragaman harus dijaga dan dipelihara. Dalam situasi keragaman yang terjaga inilah, Prasasti Talang Tuwo dibuat oleh Sri Baginda Sri Jayanasa.

Dapat dikatakan disini bahwa konteks isi pada prasasti Talang Tuwo adalah konteks situasi sosial budaya yang bervariasi dan heterogen. Jalinan hubungan sosial bisa dikatakan tercermin pada naskah teks yang tidak memberikan perbedaan antara etnis yang ada. Perbedaan sosial memang tetap muncul, seperti adalah penyebutan “budak” dan “hamba mereka”, yang bisa diidentikkan dengan kelompok masyarakat yang berada di lapisan bawah dan bertugas melayani tuannya. Ini adalah bentuk stratifikasi sosial yang terjalin dan terbentuk kala itu. Tipikal sebagai sebuah negara kerajaan, tentu saja tetap memiliki aspek struktur dan pelapisan sosial. Prasasti Talang Tuwo dari sisi isi, memperlihatkan adanya lapisan tersebut, namun tetap dalam kerangka bahwa semua lapisan dan struktur sosial harus dalam lingkup untuk mendatangkan kemaslahatan dan kemakmuran bagi semua pihak.

Bagian lain dari teks juga menyebutkan harapan agar semua berjalan baik dan harmonis. Tidak ada pencuri, penzinah, pembunuh,

atau dalam bahasa saat ini dikenal dengan istilah penyakit sosial. Ini menegaskan bahwa memang penyakit-penyakit sosial di masyarakat tetap saja ada dan mungkin terjadi. Kekuatan kerajaan dan penataan ruang yang baik adalah bagian dari upaya meminimalisir hal tersebut.

Sebuah tulisan dari Nurhadi Rangkuti<sup>23</sup> mengatakan bahwa karakteristik masyarakat di masa Sriwijaya adalah masyarakat dengan berkelompok dan membentuk pemukiman berupa rumah panggung. Mereka dihubungkan oleh jembatan-jembatan yang terbuat dari kayu-kayu berkualitas. Hal ini disebabkan kebanyakan masyarakat menempati lahan basah. Selain itu dijelaskan pula oleh Nurhadi bahwa di daerah terindikasi lokasi Sriwijaya banyak ditemukan keramik dari China, tembikar India, manik-manik dan kaca dari Persia. Ini menunjukkan bahwa tipologi masyarakat terbuka dan hubungan sosial yang rapat adalah karakteristik khas masa itu.

Artinya disini, kekuatan sosial masyarakat di masa Sriwijaya tertumpu pada aspek kesatuan sosial dan pengaruh kuat kerajaan. Inilah yang banyak tergambar pada teks Prasasti Talang Tuwo, yaitu ikatan sosial dengan tertumpu pada kekuatan raja. Ini sebenarnya karakteristik yang lazim pada setiap wilayah dengan tipe pemerintahan kerajaan. Amanat sang raja biasanya menjadi undang-undang yang harus dipatuhi dan dijalankan.

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa teks prasasti memiliki korelasi langsung dengan sistem sosial dan tipologi masyarakat yang berkembang saat itu, yaitu tipologi kerajaan dengan sistem sosial yang cenderung dekat. Aktifitas masyarakat juga tergambar sangat berkorelasi dengan alam. Ini jelas tampak dari karakteristik masyarakat yang terikat dengan perairan, lahan basah dan perladangan. Tipe masyarakat pesisir

---

<sup>23</sup> Makalah pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi XIV, 24-27 Juli 2017 berjudul Teluk Cengal Lokasi Bandar Sriwijaya.

dan juga daratan bergabung disini, dengan satu kesatuan yaitu hubungan langsung dengan alam.

#### **b. Proses**

Aspek proses akan melihat pada bagaimana teks pada prasasti Talang Tuwo digagas dan dibuat serta kemudian disebarluaskan. Hal ini tentu saja akan berkaitan dengan peristiwa sejarah yang terjadi di masa Sriwijaya, 1.334 tahun silam. Walaupun banyak catatan sejarah mengenai kerajaan Sriwijaya ini, terutama temuan-temuan dari para arkeolog, tetapi hampir tidak ada yang berbicara tentang konteks penulisan prasasti di masa itu. Hal ini tentu saja menjadi kesulitan tersendiri untuk mendalami dan menelaah proses pembuatan prasasti tersebut.

Satu hal yang bisa dijadikan acuan adalah naskah prasasti itu sendiri, lokasi penemuan prasasti, dan imajinasi yang berkembang di kalangan peneliti ke masa Sriwijaya. Naskah prasasti sudah menunjukkan secara jelas bahwa ini adalah amanah atau titah dari seorang raja, yaitu Sri Baginda Sri Jayanasa. Sosok ini merupakan sosok penting yang memiliki kemampuan menghimpun dan melaksanakan pembangunan di wilayah Sriwijaya. Membangun sebuah kerajaan besar hingga terbentang ke seantero Asia Tenggara bukanlah pekerjaan mudah, mengingat segala kondisi keterbatasan yang ada saat itu. Tetapi fakta pada berbagai prasasti sudah menunjukkan hal tersebut.

Teks pada prasasti menunjukkan bahwa penulisan prasasti adalah niat dari baginda sendiri. Artinya disini adalah inisiatif dari seorang raja. Prasasti Talang Tuwo sendiri yang ditulis tahun 684 M, dua tahun setelah Sriwijaya terbentuk (682 M berdasarkan prasasti Kedukan Bukit), bisa dikatakan adalah sebuah aktifitas yang berangkat dari permulaan pembuatan kerajaan. Kegiatan ini bisa dikatakan adalah rangkaian dari pendirian Sriwijaya, atau kelengkapan proses berdirinya sebuah

kerajaan. Menurut Bambang Budi Utomo<sup>24</sup>, seorang arkeolog, setelah kota lahir Dapunta Hyang membangun taman Sri Setra pada tahun 684 masehi. Taman itu tertulis pada prasasti Talang Tuwo ditemukan di sekitar Gandus Palembang. Di sekitar Talang Tuwo ditemukan tanaman-tanaman yang tertulis dalam prasasti hingga sekarang. Artinya disini, proses pembuatan prasasti ini adalah bagian dari rangkaian pendirian Kerajaan Sriwijaya. Sementara proses pendirian Kerajaan Sriwijaya sendiri banyak tertulis di Prasasti Kedukan Bukit.

Selanjutnya, naskah yang sudah ditulis tersebut, dipahat pada batu dengan menggunakan huruf aksara Melayu Kuno, aksara yang dikenal saat itu. Ini menunjukkan bahwa aksara Melayu Kuno sudah dikenal sejak abad ke 6 M (Collins, 2009;78). Bahasa Melayu juga diyakini sudah digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya (Ophuysen, 1983). Disini juga penyebarannya menjadi sangat cepat dan meluas karena memang pengaruh Sriwijaya yang bisa masuk ke berbagai wilayah.

Mengenai penggunaan bahasa ini disebutkan oleh Yazidi (?) bahwa pusat kerajaan Sriwijaya merupakan wilayah pusat perdagangan internasional. Di wilayah ini merupakan pusat perdagangan, terjadi pertemuan antarpedagang di nusantara dengan pedagang yang datang dari luar. Pada pertemuan tersebut terjadi komunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu sehingga secara tidak langsung para pedagang dari pelosok nusantara dan juga pedagang yang datang dari luar berkomunikasi dalam bahasa Melayu.

Prasasti Talang Tuwo sendiri, diyakini merupakan masa-masa akhir peralihan dari aksara Pallawa ke Melayu Kuno. Dikatakan juga bahwa Palembang sebagai pusat kerajaan Sriwijaya dengan rajanya Jayanasya menjadikan daerahnya sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pusat keagamaan Budha pada

---

<sup>24</sup> Tabloid desa, 9 Mei 2017



sebuah perguruan tinggi dengan guru besar bernama Dharmapala (Adul, 1981: 2).

Selain aspek bahasa yang digunakan, Prasasti Talang Tuwo juga dibuat dalam konteks masa saat itu dengan tumpuan utama ada pada Sang Raja, artinya proses tersebut adalah kewenangan dari seorang Raja. Bisa dikatakan disini bahwa aspek proses pada naskah Prasasti Talang Tuwo merupakan kewenangan raja, artinya proses itu dimulai dari kegiatan atau inisiatif Sang Raja. Langkah berikutnya adalah meneruskan dengan menuliskan pada batu, yang kemudian akan disosialisasikan ke semua pihak.

### **c. Emergence**

Berdasarkan teks pada Prasasti Talang Tuwo, tampak bahwa naskah prasasti adalah ide dari Sri Baginda Sri Jayanasa, selaku Raja Sriwijaya saat itu. Menjadi pertanyaan pada konteks ini adalah bagaimana Raja memutuskan untuk membuat prasasti tersebut. Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah pada saat itu kondisi sosial masyarakat masih sangat erat, hubungan sosial terjalin dengan baik dan cenderung makmur. Situasi fisik juga bisa dipastikan masih berupa permukiman yang jarang, hutan dan air yang masih sangat terjaga. Eksploitasi terhadap kawasan hutan belum dilakukan. Tetapi Raja sudah menginisiasi untuk melakukan penataan dengan munculnya prasasti.

Tulisan dari Munoz (2009;160) menjelaskan bahwa para penguasa Sriwijaya saat itu memiliki permasalahan yang harus mereka selesaikan, yaitu kondisi ekosistem yang tertutup rawa-rawa bakau. Ini dianggap kesulitan dan tidak menyokong pada populasi yang besar. Konteks saat itu ternyata ada pertimbangan penting dalam menyusun dan menata kawasan. Tekanannya memang adalah penataan kawasan dan pertimbangan lingkungan, tetapi di sisi lain ada kepentingan lebih besar, seperti penataan penduduk, permukiman, termasuk kecukupan pangan. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada pula faktor

pertimbangan pertahanan dan keamanan yang membuatnya begitu. Munoz juga mengatakan hal tersebut.

Sejak awal, Sriwijaya berada dalam fase kedua proses pembentukan sebuah negara, dan untuk mencapai tujuan mereka, untuk mempertahankan stabilitas dalam mandala mereka. Maharaja Sriwijaya wajib berperan sebagai seorang politisi yang cakap (Munoz, 2009;160). Ini menunjukkan bahwa aktifitas seorang raja sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari sisi politik yang dilakukannya. Pemberitahuan dan pernyataan kepada publik adalah bagian dari aktifitas seorang raja, yang bisa saja disebabkan oleh motif untuk memakmurkan rakyat, atau bisa juga karena penunjang aspek keamanan dan stabilitas wilayah.

Selain itu, hal terpenting yang tidak bisa pula dilupakan adalah kenyataan bahwa Sriwijaya berada dalam pengaruh Budha yang kuat. Bahkan ada yang menyebut bahwa Sriwijaya merupakan pelindung bagi agama Budha (Soleh, 2017). Ini kemudian akan berkorelasi dengan bagaimana hubungan raja dengan rakyat, bagaimana tata ruang dibuat, dan bagaimana lingkungan dimaknai, semua tidak terlepas dari keberadaan Budha sebagai agama yang dipercayai kala itu.

Filosofis agama Budha yang dianut kala itu memang menekankan pada keharmonisan dan keserasian dengan lingkungan. Ini memang sangat ditekankan sekali pada inti ajaran Budha. Disebutkan oleh Wilujeng (2014) bahwa Sang Budha memiliki salah satu inti ajarannya yang disebut Sutra Teratai yang merupakan gagasan penting setelah kematiannya. Intinya adalah memahami bahwa roh hidup dan rohnya sendiri telah memasuki dan melebur dengan alam semesta. Oleh karena itu, alam semesta pada dasarnya adalah perwujudan dari Budha itu sendiri. Disinilah keserasian dan keharmonisan itu harus dikedepankan.

Nichiren Daishonin (Wilujeng, 2014) yang merupakan penyebar ajaran Budha setelah masanya Sidarta dan Chih-I, mengatakan bahwa alam semesta tidaklah dapat dipisahkan dari objek yang ditelaah,

dipelajari dan diteliti yang terpisah dari manusia. Kajian tentang alam semesta harus dikaitkan dengan maknanya bagi kehidupan manusia. Keserasian kembali menjadi penting karena perlakuan terhadap alam semesta akan menentukan kebaikannya bagi umat manusia.

Kerajaan Sriwijaya yang menganut agama Budha sebagai kekuatannya, jelas tidak bisa lepas dari filosofis-filosofis ajaran Budha. Ini terlihat nyata dalam naskah prasasti yang menyebutkan kata-kata Sang Budha dan sebutan Tiga Ratna. Identitas agama Budha melekat sekali dalam naskah prasasti tersebut. Bisa dikatakan dalam konteks ini bahwa pembuatan Prasasti Talang Tuwo dipengaruhi sekali oleh konteks ajaran Budha yang dianut Sang Raja. Keserasian hubungan dan pemanfaatan alam semesta untuk kemaslahatan orang banyak adalah titik sentral dari ajaran Budha yang kemudian dipahami oleh Sang Raja. Begitu juga dengan

Dalam hal ini, Sang Raja diyakini juga mendalami situasi dengan melihat kondisi lingkungan dan sosial masyarakat. Sebagaimana riset yang dilakukan Nurhadi Rangkuti (2017) menunjukkan bahwa masyarakat Sriwijaya membangun pemukiman dengan memperhatikan secara baik situasi dan kondisi yang ada. Mereka membuat rumah panggung, berdekatan dengan sisi pantai dan pesisir, tidak merusak tatanan alam, tetapi beradaptasi dengan kondisi alam tersebut. Kondisi inilah yang kemudian terlihat dalam konteks pembuatan prasasti Talang Tuwo, yaitu anjuran agar masyarakat memahami kondisi lingkungannya dan kemudian bermukim dan hidup secara aman dan damai di kondisi yang ada.

Teks-teks pada naskah Prasasti Talang Tuwo terlihat sangat kuat dengan fokus pada penataan ruang dan keserasian hidup di lingkungan alam setempat. Kondisi kerajaan saat itu, yang sedang dalam masa jayanya, kondisi alam yang memang dominan perairan, hutan yang masih banyak dan rapat, serta pertumbuhan penduduk, memiliki relevansi kuat

bagi pembuatan Prasasti Talang Tuwo. Begitu juga adanya ajaran Budha yang menjiwai kerajaan ini, membuat penghargaan dan perlakuan terhadap alam semesta harus dilakukan.

Hal yang mirip juga disebutkan oleh Khabib Soleh (2017) bahwa Prasasti Talang Tuwo menunjukkan level Sri Baginda Sri Jayanasa sudah pada level Dewa, tingkatan yang belum diraihnya selama ini. Ini diyakini dalam ajaran Budha, sehingga segala sesuatu yang dilakukannya adalah perwujudan dari ajaran Budha itu sendiri. Representasi agama Budha memang menjadi ciri khas penting yang kemudian terimplementasikan dalam penataan ruang dan pengaturan lingkungan hidup. Adanya Taman Sriksetra adalah bagian penting dari hal tersebut.

#### **IV.3. Relevansi Nilai-Nilai Lingkungan Hidup pada Naskah Prasasti Talang Tuwo**

Naskah Prasasti Talang Tuwo memang sudah lama digagas, sudah sekitar 1300 tahun lalu. Pembuatannya juga tidak lepas dari konteks pada masa itu. Banyak pesan dan nilai-nilai lingkungan hidup yang bermakna penting pada masa itu. Tetapi yang terpenting kemudian bukan semata konteks saat itu, namun relevansinya pada masa sekarang.

Sebagaimana diketahui, kerajaan Sriwijaya menguasai tidak hanya wilayah Sumatera Selatan saja, tetapi mendunia hingga ke Asia Tenggara. Fakta-fakta sejarah sudah banyak membuktikan bagaimana hubungan Sriwijaya yang terhubung ke Semenanjung Malaka, Malaysia, Champa, Vietnam, Kamboja, dan beberapa lainnya (lihat Muljana, 2008, Yuliati, 2014). Semua sejarawan juga sudah sepakat bahwa ekspansi Kerajaan Sriwijaya memasuki banyak wilayah sehingga menjadikannya sebagai kerajaan besar di Nusantara kala itu. Ini sudah bisa menjadi salah satu pertimbangan penting bahwa nilai-nilai dan filosofis dari kerajaan ini memberikan pengaruh kuat kepada daerah lain.

Sebagaimana sudah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa teks Prasasti Talang Tuwo memiliki hubungan penting dengan penataan dan pengaturan

lingkungan hidup, terutama tata ruang. Kendati hal ini dibuat ribuan tahun lalu, tetapi banyak makna dan nilai yang diyakini memiliki relevansi langsung dengan realitas saat ini. Kajian ilmu komunikasi, terutama yang mengacu pada bagaimana sebuah teks memiliki nilai-nilai tersendiri dan terhubung dengan kondisi sosial yang ada, menjadikannya sangat penting untuk dipahami lebih lanjut.

Relevansi nilai-nilai lingkungan hidup pada teks Prasasti Talang Tuwo akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang sudah dipaparkan dibagian sebelumnya. Berikut dijelaskan satu persatu.

1. Penanaman dan keragaman tanaman

Prasasti Talang Tuwo secara jelas menegaskan keragaman tanaman yang akan ditanam, yaitu meliputi kelapa, pinang, aren, sagu, pohon buah-buahan, bambu haur, dan pattum. Apabila dikontekskan pada saat ini, jelas sekali relevansi terbesar adalah pada sistem pertanian monokultur versus multikultur. Ini merupakan gagasan yang aktual sekali dan memiliki relevansi kuat dengan kebijakan pertanian dan realitas yang dilakukan banyak pihak.

Hal ini bisa ditelusuri dari bagaimana sejarah pertanian di Indonesia terutama sekali, yang jika ditelusuri sejak zaman kolonial Belanda, sistem monokultur sudah mulai diperkenalkan. Kebijakan tanam paksa dengan menanam satu jenis tanaman, bisa dikatakan sebagai sesuatu menjadi asal mula munculnya fenomena monokultur di masyarakat.

Dalam pola tanam paksa ini, memang tidak semuanya harus seragam. Van den Bosch, Gubernur Jenderal Belanda kala itu menetapkan kebijakan, dimana petani dibebaskan dari pajak tanah dan sebagai gantinya mereka harus menanam tanaman ekspor milik pemerintah. Jumlahnya minimal seperlima luas tanahnya (Geertz, 2016;65).

Dijelaskan juga dalam analisis Geertz bahwa tanaman yang dipaksakan pada sistem ini dapat dipisahkan menjadi dua katagori besar, yaitu tanaman tahunan yang dapat ditanam di sawah bergiliran dengan padi (tebu, nila, tembakau) dan tanaman keras yang tidak dapat ditanam bergantian dengan padi (kopi, teh, lada, kina dan kayu manis). Kedua sistem ini kemudian memberikan pengaruh kepada masyarakat maupun lingkungan secara ekologis.

Mekanisme tanaman seragam sebagaimana mulai dikenal di era kolonial, terus berlanjut dengan masuknya era orde lama dan orde baru. Di era kolonial, maraknya perkebunan milik Belanda, seperti perkebunan teh dan tebu, sudah memberikan indikasi pada masyarakat tentang kemungkinan keseragaman jenis tanaman. Hal ini semakin menemukan momentumnya saat orde baru berkuasa dan berlanjut ke era reformasi sekarang ini. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan, yaitu di masa kolonial, kebijakan ini lebih pada penguatan ekonomi penjajah, maka di masa orde baru dan reformasi, penguasaan lahan besar-besaran untuk tanaman monokultur sudah menunjukkan kapitalisme di sektor pertanian. Maka muncullah berbagai perusahaan besar dengan label *multinational company*, membuka areal ribuan hektar untuk tanaman sejenis. Primadonanya saat ini adalah kelapa sawit dan pohon akasia untuk tanaman industri.

Pemerintah dalam hal ini tidak lagi “memaksakan” penduduk untuk menanam kelapa sawit, tetapi memasukkan pemodal besar untuk memasuki kawasan perkebunan rakyat, membuka lahan luas dengan tanaman sejenis. Secara simultan, warga setempat akan tergoda dan bahkan terpaksa untuk menanam tanaman tersebut. Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) adalah bagian dari skema yang kemudian melibatkan masyarakat secara langsung untuk membuka lahan secara besa-besaran.

Memang tanaman sejenis tidak hanya didominasi oleh perusahaan skala besar. Warga masyarakat juga melakukan hal sama,

yang biasanya terbagi atas perkebunan karet dan kelapa sawit. Karet adalah tanaman yang dominan. Data BPS 2016 menunjukkan luas kebun karet rakyat di Sumsel mencapai 1.220.998 ha dan kelapa sawit di urutan kedua seluas 257.236 ha. Ini baru perkebunan sejenis yang dikelola rakyat.

Sementara data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan justru menunjukkan hal yang berbeda. Untuk tahun 2016 disebutkan luas perkebunan kelapa sawit rakyat mencapai 431.104, dan perkebunan swasta besar mencapai 1.520.758 ha. Catatan angka yang fantastis sebenarnya, dan semuanya ditanam dengan tanaman sejenis. Tentu saja ini akan memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat setempat dan juga lingkungan sekitar.

Efek dari tanaman sejenis jelas memberikan indikasi yang cukup negatif, terutama kaitannya dengan masyarakat sekitar. Hasil riset saya di daerah Sembilang, Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Desa Tanah Pilih menunjukkan bahwa masyarakat setempat bisa bertahan dan hidup dengan swadaya sendiri, bahkan tergolong sangat makmur, melalui tanaman yang multikultur. Warga Tanah Pilih mengolah lahan pertaniannya dengan beragam jenis. Mereka menanam kelapa, pinang, nanas, padi sawah, pisang, cabe, dan jenis palawija lainnya. Selain itu mereka juga melaut, menjadi nelayan untuk mencari ikan. Sejak awal desa ini dibangun, tahun 1969, sampai saat ini kehidupan tetap makmur, sejahtera, kendati akses transportasi dan komunikasi sangat sulit. Bencana alam juga bisa diatasi dan dihindari, seperti kekeringan, kebakaran hutan, maupun banjir.

Sebaliknya di daerah yang sudah terkena metode pertanian monokultur, justru keadaannya terbalik. Banyak daerah yang selama beberapa dekade ini dihiasi dengan rimbunnya kelapa sawit, ataupun pohon akasia, menjadi rawan kekeringan, kebakaran lahan, ataupun banjir di musim hujan. Sektor ekonomi masyarakat yang hanya

bertumpu pada satu jenis tanaman, menjadi rentan terhadap fluktuasi harga. Konsep ekonomi subsisten yang menjadi ciri khas masyarakat pedesaan menjadi hilang, karena mereka harus mengeluarkan uang untuk membuka lahan, dan kemudian hasil panen juga tersedot untuk mengembalikan modal.

Hasil riset dari Obidzinski, Andriani, Komarudin dan Andrianto (2012) menunjukkan bahwa maraknya perkebunan kelapa sawit di Indonesia justru menyebabkan tingginya angka deforestasi yang berefek pada hilangnya berbagai ekosistem hutan yang selama ini dikenal. Selain itu, perkebunan sawit juga rentan menyebabkan terjadinya dampak sekunder seperti polusi udara, erosi tanah, dan polusi air. Secara ekonomis juga, hasil dari perkebunan sawit tidaklah terdistribusi secara merata dan memberikan efek signifikan pada masyarakat setempat. Yang terjadi justru penumpukan modal pada satu kelompok pengusaha perkebunan. Sementara masyarakat setempat cenderung hanya sebagai buruh atau pemilik yang dibagi hasil dengan harga tertentu. Efek ekonomis yang tidak merata bertautan pula dengan efek ekologis yang mengancam lebih parah.

Sumatera Selatan sudah mengalami hal ini. Tingginya angka kebakaran hutan dan lahan, terjadinya kekeringan, banjir, serta ketergantungan masyarakat pada satu jenis tanaman, merupakan fenomena yang sudah biasa. Ekonomi masyarakat sulit bergerak, dan secara psikologis juga tidak terlatih untuk kreatif dengan berbagai jenis tanaman lainnya.

Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Prasasti Talang Tuwo, terutama pada aspek keragaman jenis tanaman dan kewajiban untuk menanam, menjadi sangat relevan sekali. Tidak hanya pada konteks Sumatera Selatan, tetapi juga Indonesia secara keseluruhan. Bencana kabut asap yang terjadi setiap kemarau, menjadi relevan untuk diatasi dengan pola ini. Kalimantan Tengah, Selatan, Barat, Riau, Jambi,



Sumsel, adalah daerah-daerah yang rentan terhadap ini, dan indikasinya juga menunjukkan bahwa daerah itu adalah daerah dengan jenis tanaman monokultur paling banyak.

Untuk Sumsel sendiri, keragaman tanaman sangat dipentingkan. Pemerintah Provinsi Sumsel sudah mencoba menggagas itu dengan pola *Green Growth Development*. Dr. Najib Asmani, staf khusus Gubernur Bidang Perubahan Iklim sudah mengatakan itu. Leluhur Sriwijaya sudah mengatakan itu dalam bentuk penataan lingkungan yang berkelanjutan. Keanekaragaman hayatinya bisa menjadi baik dan lestari<sup>25</sup>. Sumsel sendiri kemudian menjadi salah satu daerah prioritas dalam penanganan masalah lahan gambut.

Relevansi keragaman tanaman di Sumsel, sebagaimana amanat Prasasti Talang Tuwo jelas menjadi vital. Persoalan lingkungan hidup yang sudah di level darurat perlu diperbaiki. Beberapa daerah yang sebenarnya masih menerapkan hal itu, perlu terus dijaga, dan oleh karenanya moratorium izin-izin perkebunan skala besar perlu didorong. Ancamannya tidak hanya pada satu sisi dan satu generasi, tetapi berefek pada semua pihak.

## 2. Penanaman tanaman ramah lingkungan (bambu, waluh, pattum dll)

Sangat berhubungan erat dengan model keragaman tanaman adalah soal jenis tanaman yang ditanam. Amanat dalam Prasasti Talang Tuwo sudah mengatakan tentang tanaman-tanaman yang dianjurkan. Bambu adalah salah satu jenis tanaman yang dianjurkan, begitu juga jenis yang lainnya. Dapat dilihat bahwa jenis-jenis tanaman yang dianjurkan sebenarnya adalah endemik di Sumsel, sebaliknya justru yang dikenal belakangan bukanlah jenis khas daerah ini. Diasumsikan juga bahwa jenis-jenis tersebut merupakan tanaman yang bagi masyarakat setempat sangat berguna dan bisa menunjang kehidupannya.

---

<sup>25</sup> <http://www.mongabay.co.id/2016/05/31/dukungan-berdatangan-akankah-penataan-lingkungan-di-sumatera-selatan-lebih-baik/>

Tentang kelapa sawit yang belakangan demikian marak, banyak yang sudah melakukan kajian tentang berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Setidaknya penelitian dari Obidzinski dkk (2012) sudah menunjukkan hal tersebut. Riset yang diadakan di daerah Papua, Kalimantan dan Sulawesi ini memperlihatkan kerusakan pada tanah, air, udara, dan tentu saja hilangnya potensi hutan yang ada. Hal yang sama juga bisa dilihat dari maraknya penanaman hutan tanaman industri dengan jenis Akasia.

Sementara tanaman lokal yang diklaim ramah lingkungan justru terpinggirkan. Sebut saja bambu, tanaman yang dikenal sangat mudah tumbuh dimana saja, termasuk di kawasan gambut dan perairan. Jenis ini juga sangat mudah berkembang dan cepat, serta tidak memiliki efek negatif pada kondisi kesuburan tanah. Dari sisi manfaat ekonomis, bambu juga terkenal sangat multifungsi dan bisa dimanfaatkan untuk ragam kebutuhan manusia. Kendati bukan jenis tanaman pangan, tetapi nilai manfaat sangat besar.

Hasil riset dari Sutiarani dan Rahmafritria (2013) menunjukkan bahwa di sebuah desa yang memiliki kawasan khusus bambu, tepatnya di Desa Kertawangi, Cisarua, terdapat peningkatan kondisi ekonomi yang signifikan dari masyarakat. Sebelumnya mereka tidak secara khusus menanam bambu, tetapi kemudian dijadikan dusun bambu, dan hasilnya sangat positif. Selain itu aspek lingkungan juga terjaga dengan baik.

Tulisan dari Purwito (2012) juga menyebutkan bahwa bambu adalah tanaman yang ramah lingkungan dan multi guna. Penanaman juga mudah dan daya tumbuh sangat cepat dibanding pohon hutan lainnya. Purwito juga mengatakan bahwa bambu memiliki ketahanan terhadap cuaca dan iklim, selain itu bambu juga sangat mudah dibudidayakan oleh masyarakat tanpa modal yang besar. Terpenting, bambu sangat ramah lingkungan dan bisa menyimpan karbondioksida cukup tinggi. Alasan-

alasan seperti ini sudah menunjukkan bahwa bambu memang tanaman yang sangat dianjurkan, bahkan sejak nenek moyang dulu.

Tanaman lain yang juga direkomendasikan sebagai endemik Asia, khususnya daerah perairan adalah Sagu. Ini masuk katagori tanaman pangan. Dilihat dari sejarah pangan, sebenarnya Indonesia bukanlah semata-mata masyarakat pemakan nasi, tetapi juga dari bahan-bahan alami lainnya. Haryadi (2004) dalam pidato pengukuhan guru besarnya mengatakan bahwa sebenarnya berdasarkan sejarah, masyarakat Asia, termasuk Indonesia menjadikan umbi-umbian sebagai makanan pokok, selain padi. Ini berkembang sejak sekitar 9000 SM, dimana masyarakat banyak mengkonsumsi jenis umbi, seperti uwi dan keladi, sagu, dan pisang (lihat Gibbon dan Pain, 1984, Maryoto, 2009), serta sukun (Ave, 1977).

Hal ini menunjukkan bahwa tanaman yang ditanam adalah yang memang endemik dan sesuai dengan kondisi tanah, tanpa harus melakukan rekayasa ilmiah, prosesnya bisa dikatakan alami. Ini juga yang disebutkan Kemas Ari Panji<sup>26</sup> bahwa pada prasasti Talang Tuwo memang difokuskan pada aspek tanaman endemik lokal. Semua yang disebut di prasasti adalah tanaman yang memang ada di daerah tersebut. Artinya penulisan prasasti ini didasarkan pada realitas dan pengamatan situasi yang ada di daerah tersebut. Baru perjalanan waktu kemudian yang menunjukkan bahwa berbagai tanaman lain dimasukkan ke nusantara, dan banyak yang kemudian menghilangkan komoditas lokal.

Sagu adalah salah satu tanaman yang memang direkomendasikan dan punya karakteristik tumbuh di lahan basah/pesisir. Alfons dan Rivanie (2011) mengatakan bahwa Sagu (*Metroxylon* spp) merupakan salah satu sumber pangan tradisional potensial yang dapat dikembangkan dalam diversifikasi pangan mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional. Bahan pangan tradisional ini memiliki nilai

---

<sup>26</sup> Wawancara tanggal 1 November 2017

gizi tidak kalah dengan sumber pangan lainnya seperti beras, jagung, ubikayu, dan kentang. Disebutkan juga bahwa proses budidaya sagu (pra-panen) sampai pengolahan tepung sagu basah (pasca panen) dilakukan secara alami, sehingga tepung sagu dapat dikategorikan sebagai pangan organik 100%. Tepung sagu basah dapat dikeringkan untuk meningkatkan daya simpan dan daya tarik kemasan, serta dapat diolah menjadi berbagai kue basah dan kue kering.

Sagu juga dikatakan bisa menjadi bahan pangan organik dan ramah lingkungan. Dikatakan oleh Alfons dan Rivanie (2011) bahwa pentingnya nilai kesehatan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup telah mendorong masyarakat untuk kembali mengonsumsi pangan organik. Beberapa alasan yang mendasari keputusan tersebut antara lain: (1) berhenti mengonsumsi bahan-bahan kimia, (2) melindungi anak kita, (3) rasa pangan organik lebih baik/lebih enak, (4) mendukung petani-petani lokal berskala kecil, (5) melindungi kualitas air dan udara, (6) mencegah erosi tanah, (7) melindungi kesehatan, (8) hemat energi, (9) mempromosikan keanekaragaman hayati, (10) harganya relatif tidak mahal, dan (11) bebas dari bahan-bahan hasil rekayasa genetik (Sudrajat dan Surahman, 2007).

Atas dasar itu bisa dikatakan bahwa penanaman tanaman sagu sebagai salah satu tanaman yang ramah lingkungan dan menjadi alternatif tanaman pangan selain beras, menjadi relevan dilakukan. Ini juga bisa dilihat sangat sesuai dengan karakteristik wilayah perairan dan pesisir di Sumatera Selatan ataupun daerah lain di Indonesia. Papua dan Maluku adalah fakta bahwa tanaman ini menjadi konsumsi makan pokok bagi warganya, kendati kemudian karena kebijakan pangan dan politik pangan, menyebabkan beras dijadikan pula tanaman pokok. Berbagai stigma negatif tentang sagu juga masih terus berkembang, dengan asumsi bahwa sagu adalah tanaman masyarakat pinggiran dan tidak berkelas. Ini yang semestinya dilawan sehingga problem pangan di masa

datang bisa dihindarkan. Relevansi ini sangat kuat, dan itu sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh leluhur di masa Sriwijaya.

Tanaman lain yang juga dianggap ramah lingkungan dan berpotensi besar untuk dikembangkan adalah pisang. Ini juga bisa dikatakan endemik Indonesia, karena sudah dikenal sejak jauh hari dan mudah tumbuh di berbagai tempat.

Dikatakan oleh Wijayanto (?) bahwa pisang merupakan tanaman asli Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jenis pisang yang banyak ditanam di Indonesia antara lain pisang susu, pisang raja, pisang ambon, pisang kepok, pisang mas, dll. Pisang merupakan komoditas buah-buahan yang dominan dalam konsumsi buah-buahan di Indonesia, karena sekitar 45 % dan total konsumsi buah-buahan adalah pisang. Dikatakan juga bahwa Tanaman pisang mudah tumbuh di berbagai tempat, penanaman yang dilakukan oleh petani belum teratur dan sering dicampur dengan tanaman lainnya. Selain itu pemeliharaan tanaman pisang belum dilakukan secara intensif, sehingga produksi dan mutu buah yang dihasilkan masih rendah.

Terlihat bahwa pisang sangat mungkin dibudidayakan dan bisa memberikan penghasilan secara ekonomis yang juga baik bagi masyarakat. Lingkungan juga bisa terjaga karena tanaman ini bisa menyerap air dan mendinginkan suhu tanah. Secara tradisional juga para tetua kita juga kerap berkata bahwa menanam pisang bisa mendatangkan kesejukan.

Hasil riset yang pernah saya lakukan di daerah Sembilang, tepatnya di Desa Tanah Pilih juga menunjukkan hal tersebut. Pisang menjadi komoditi andalan masyarakat, yang hampir saban hari dibawa dengan kapal ponton ke Palembang atau ke kota. Sekilas mungkin ini tidak disadari, tetapi komoditas pisang tidak bisa dibantahkan sangat dibutuhkan.

### 3. Pengaturan tata air (bendungan, kolam, irigasi)

Saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di area gambut di Sumatera Selatan tahun 2014 dan 2015 lalu, tudingan terbesar diberikan pada masalah tata kelola dan manajemen air yang tidak beres. Gambut menjadi mudah terbakar karena memang sumber air tidak ada. Lahan yang selama ini basah menjadi kering di musim kemarau karena kesalahan dalam mengelola sistem pengairan. Oleh karena itu salah satu prioritas dalam pengelolaan lahan gambut dan mencegah kebakaran adalah dengan mengatur tata kelola air. Ini juga disebutkan dan ditegaskan oleh koordinator Tim Restorasi Gambut Sumsel, Najib Asmani<sup>27</sup>.

Hal yang sama juga terjadi di Kota Palembang (bahkan kota besar lainnya), yaitu ketika musim hujan datang, banjir wilayah perkotaan menjadi hal yang rutin. Kuncinya ada di tata kelola air. Maraknya pembangunan ruko-ruko yang menimbun daerah serapan air, menjadi penyebab utama banjir di kota. Palembang sudah sangat sering mengalami hal ini, bahkan sampai saat ini.

Di sisi lain, dapat pula dilihat bagaimana konflik sering terjadi antara sesama masyarakat, terutama antar petani sawah yang memperebutkan sumber air. Pengaturan air yang tidak merata, sementara air sangat dibutuhkan, menyebabkan gesekan-gesekan antar masyarakat seringkali terjadi.

Dalam sebuah riset ke Desa Gelebek Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin beberapa waktu lalu (2017), saya menemukan fakta bahwa masyarakat yang terbiasa dengan pertanian pasang surut dan sawah tadah hujan, terpaksa menelantarkan lahannya disebabkan pasokan air yang belum ada. Lahan sudah diolah, sudah dibersihkan, tapi tak bisa dimanfaatkan, padahal sumber air dari Sungai Komering sangat potensial sekali. Lagi-lagi masalah tata kelola air

---

<sup>27</sup> <http://www.mongabay.co.id/2016/01/17/apa-yang-dilakukan-pemerintah-sumsel-atasi-karthutlah-2016/>

menjadi faktor penting, yang semestinya ini diwujudkan dengan pembangunan irigasi ke areal persawahan.

Sebuah riset dari Edwar Saleh (2010) memperlihatkan bahwa tata kelola irigasi yang baik dan benar menjadi kunci penting dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik di masyarakat. Saleh mengatakan bahwa di daerah irigasi Kelingi, terdapat kondisi yang menunjukkan bahwa persoalan irigasi harus dikelola dan diselesaikan dengan baik. Tidak jarang konflik ini menimbulkan masalah-masalah yang berujung pada bentrok fisik. Semuanya hanya karena perebutan sumber daya air yang tidak terkelola dengan baik.

Apa yang sudah dijelaskan dalam Prasasti Talang Tuwo kemudian terlihat menemukan momentum dan relevansinya dengan kondisi saat ini. Persoalan air di lahan gambut, air untuk persawahan, banjir perkotaan, termasuk kekeringan, adalah kondisi aktual yang dibutuhkan saat ini. Kunci dari gagasan ini adalah amanah dari seorang pimpinan yang kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan dan praktek langsung. Persoalan tata kelola air sangat penting dan relevan sekali dengan kondisi kekinian, tidak hanya di Sumsel tapi juga di seluruh daerah di Indonesia dan bahkan dunia.

#### 4. Pengaturan lingkungan untuk semua makhluk hidup

Masalah lingkungan hidup harus dilihat bahwa ini adalah sebuah ekosistem besar. Dalam struktur ekosistem, komponennya tidak hanya manusia semata, tetapi juga seluruh makhluk hidup yang hidup didalamnya. Ini adalah sebuah keniscayaan yang memang banyak tertera dalam berbagai literatur lingkungan hidup. Mengabaikan komponen lain dari lingkungan akan berakibat pada pengabaian terhadap hak-hak hidup bagi makhluk lainnya. Gagasan dalam filsafat Antroposentrisme yang berawal dari pemikiran Descartes (Keraf, 2001), adalah pangkal mula mengapa lingkungan kemudian hanya dipandang dari sudut pandang manusia semata. Semestinya pendapat dari paham

Biosentrisme ataupun Ekosentrisme bisa menjadi acuan, bahwa manusia adalah bagian kecil dari unsur makhluk hidup lainnya. Hal ini yang sebenarnya sudah terjelaskan dalam semangat naskah Prasasti Talang Tuwo, bahwa kemakmuran itu untuk semua makhluk.

Relevansi pandangan ini bisa dilihat dari bagaimana eksploitasi lingkungan hidup selama ini yang terkesan membabi buta dan mengabaikan hak-hak makhluk lainnya. Pembukaan areal perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri secara besar-besaran adalah suatu bentuk pengabaian hak-hak makhluk hidup lainnya seperti hewan dan ikan-ikan. Banyak sekali spesies hewan seperti burung, ikan, maupun satwa hutan lainnya yang hilang disebabkan oleh perluasan perkebunan. Kasus-kasus gajah yang masuk kampung penduduk ataupun kasus harimau yang memangsa warga adalah bentuk hukum alam yang terjadi karena perusakan habitat makhluk hidup.

Hasil liputan Mongabay Indonesia banyak memberitakan tentang kasus hilangnya keseimbangan makhluk di sebuah ekosistem. Fakta bahwa gajah yang sering masuk ke areal perkebunan kelapa sawit, dan kemudian ditemukannya gajah yang mati di kebun adalah bentuk-bentuk gangguan keseimbangan lingkungan yang sudah rusak. Salah satunya terjadi daerah Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, seekor gajah ditemukan mati dan disebutkan juga gajah sering masuk ke areal kebun kelapa sawit<sup>28</sup>.

Begitu juga dengan banyaknya spesies ikan yang tidak ditemukan lagi, yang kebanyakan disebabkan oleh habitat hidupnya sudah terganggu. Hal yang sama juga dialami oleh burung-burung yang semakin hari semakin langka untuk ditemukan. Pada akhirnya ini akan merusak rantai makanan ekosistem yang efeknya adalah kehidupan manusia itu sendiri. Kasus banyaknya hama yang masuk ke

---

<sup>28</sup> <http://www.mongabay.co.id/2016/04/19/di-perkebunan-kelapa-sawit-ini-gajah-sumatera-ditemukan-mati/>



perkampungan penduduk adalah bukti terjadinya kerusakan rantai makanan ekosistem tersebut.

Oleh karena itu, gagasan dalam prasasti Talang Tuwo menemukan relevansi yang kuat untuk diterapkan dan dipertahankan saat ini. Memang ini tidak mudah, tetapi kebutuhan akan hal itu sudah dirasakan mendesak, karena ancaman terhadap terganggunya ekosistem sudah terlihat nyata. Hasil liputan dari majalah National Geographic<sup>29</sup> menyebutkan bahwa semua makhluk hidup pada dasarnya punya fungsi ekologi yang masing-masing. Hilangnya satu spesies akan berpengaruh pada keanekaragaman hayati di muka bumi, fungsi ekosistem juga akan ikut berubah. Nat Geo mencatat beberapa jenis hewan yang terancam punah karena ulah manusia dan perubahan kondisi alam, yaitu harimau, burung cucak rowo, trenggiling, kura-kura air tawar, badak, gajah, dan banyak lainnya. Padahal semua makhluk tersebut punya peran penting dalam menyeimbangkan ekosistem, sehingga kondisi lingkungan saat ini sudah terasa sangat berubah dan berbeda sekali.

Kata kunci penting dalam melihat persoalan keragaman dan kepentingan semua makhluk hidup terhadap lingkungan adalah keanekaragaman hayati. Ini adalah hal utama yang harus diperhatikan, karena kepentingan semua makhluk adalah kepentingan terhadap lingkungan.

Johan Iskandar (2016) sudah mengatakan bahwa dalam hal kekayaan hayati, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara 'megadiversiti', negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi di dunia. Berdasarkan keragaman tumbuhan (flora) di Indonesia, negara Indonesia yang termasuk kawasan Malesia mempunyai aneka ragam tumbuhan yang sangat tinggi, di antaranya dari tumbuhan berbunga saja telah tercatat sekurangnya 250.000 jenis. Selain itu, tercatat banyak jenis tumbuhan yang sebarannya hanya ada di Indonesia, seperti suweg

---

<sup>29</sup> <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/10/satwa-liar-punah-semua-hal-dapat-berubah>

raksasa atau bunga bangkai (*Amorphophalus titanum*), merupakan jenis tumbuhan yang memiliki perbungaan terbesar di dunia. Jenis tumbuhan lainnya, jenis anggrek hitam (*Coelogyne pandurata*) yang merupakan jati diri Kalimantan Timur, hanya tumbuh secara alami di Kersik Luai, Kalimantan, Timur.

Dari jenis tumbuhan nilai ekonomis, tercatat beberapa jenis kayu nilai ekonomis khas dari Indonesia yang terkenal ke seluruh dunia, seperti ampupu (*Eucalytus urophylla*) dari Nusa Tenggara Timur dan mangium (*Acacia mangium*) dari Piru, Ambon. Tak kalah menariknya Indonesia juga telah terkenal sebagai gudang jenis-jenis tumbuhan obat dan pusat anekaragam jenis buah-buahan. Berbagai jenis tumbuhan obat yang telah terkenal di Indonesia, seperti koneng gede (*Curcuma sp*), kencur, dan laja (*Aplinia galanga*), mempunyai pusat persebaran di Indonesia. Selain itu, dikenal pula jenis-jenis tumbuhan obat lainnya, berupa pohon pegagan, daun, buah atau biji, serta berupa tumbuhan obat berupa jenis-jenis pohon, seperti kedawung (*Parkia javanica*), kepuh (*Sterculia foetida*), pule pandak (*Rauvolviaserpentine*) dan mindi (*Azadirachta indica*) (Iskandar, 2016).

Pertanyaannya kemudian adalah, jenis-jenis tumbuhan penting tersebut justru sudah banyak yang hilang. Maraknya aktifitas *illegal logging* sekitar 1980-an merupakan malapetaka awal hilangnya berbagai keragaman hayati yang selama ini dikenal. Ditambah lagi dengan aktifitas masyarakat yang terus memasuki wilayah hutan, menebang pohon, membuat perkebunan dan perkampungan. Hal-hal seperti ini sudah jelas akan merusak tatanan makhluk hidup lain yang ada disekitarnya.

Soetarno dan Setyawan (2015) mengatakan bahwa tingkat kehilangan biodiversitas di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi didunia. Peningkatan populasi manusia yang berakibat pada meningkatnya konsumsi merupakan penyebab antropogenik utama penurunan dan hilangnya habitat bagi keanekaragaman hayati. Di luar

itu, perubahan iklim merupakan keniscayaan yang menyebabkan perubahan habitat baik di laut maupun di daratan. Tingkat konsumsi kita saat ini menimbulkan ancaman berkelanjutan bagi planet bumi. Hal ini mempengaruhi keanekaragaman hayati dan beberapa jenis hampir punah.

Dijelaskan juga oleh Soetarno dan Setyawan (2015) bahwa perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan tantangan terbesar saat ini bagi umat manusia. Diperkirakan bahwa kita akan kehilangan 20-50% dari semua spesies dalam abad berikutnya, bahkan beberapa di antaranya sebelum ditemukan. Ada tujuh belas negara megadiversitas yang menyumbang lebih dari 70% dari keanekaragaman hayati dunia.

Masalah-masalah seperti ini perlu jadi catatan penting, karena hakekatnya bumi ini bukan hanya untuk manusia. Bumi adalah untuk semua makhluk yang juga punya hak sama. Atas dasar itulah, pemikiran dalam prasasti Talang Tuwo menjadi relevan sekali, yang mestinya selalu didorong untuk diwujudkan. Relevansi seperti ini sudah pernah disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin yang menyebutkan bahwa Prasasti Talang Tuwo semestinya jadi tonggak awal untuk melakukan penataan lingkungan secara berkelanjutan. "Sebagaimana kita ketahui isinya antara lain menyebutkan semoga tanaman-tanaman dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan dapat digunakan untuk kebaikan semua mahluk, semoga mereka tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa, semoga semua planet dan rasi menguntungkan mereka atau lestari. Ini menegaskan bahwa lingkungan harus kita jadikan prioritas<sup>30</sup>. Sumsel sendiri kemudian mewujudkan hal tersebut dengan mendorong kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait, yang disebutnya dengan

---

<sup>30</sup> <http://www.mongabay.co.id/2016/06/17/spirit-talang-tuo-dasar-pelestarian-lingkungan-hidup-untuk-masyarakat-dunia/>

*Public Privater People Partnership (P4)*. Berbagai kegiatan juga disebutkannya akan dilakukan yang semua bermula dari Prasasti Talang Tuwo.

Tentu saja, apa yang dilakukan dan dicita-citakan tidak akan bisa terealisasi dengan mudah, mengingat masalah lingkungan hidup adalah masalah yang sudah sangat kompleks dan rumit. Banyaknya kepentingan modal dan ekonomi bahkan politik yang berada di wilayah tersebut, menyebabkan ini bagai lingkaran setan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Yang jelas, efek dari perilaku manusia tersebut sudah dan terus terasa sampai sekarang.

Contoh kasus pertambangan batubara di Lahat dan Muara Enim, Sumatera Selatan yang menunjukkan tingkat eksploitasi tinggi, serta sangat padat modal. Batubara terus dikeluarkan, sementara sisa-sisa lahan tambang ini cenderung terabaikan dan menjadi danau-danau gersang yang tidak bisa dimanfaatkan.

Gambar 6. Aktifitas Tambang Batubara di Lahat



Sumber : [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id)

Pada konteks kasus ini juga tampak bagaimana jalinan perizinan yang sangat kompleks dan melibatkan unsur kepentingan. Laporan

jurnalistik Taufik Wijaya pada Mongabay Indonesia<sup>31</sup> menyebutkan bahwa , Bupati Lahat (saat itu Harunata) lewat SK No.540/29/Kep/Pertamben/2005 tertanggal 24 Januari 2005, membatalkan KP di atas lahan seluas 14.190 hektar yang sebelumnya merupakan area KP PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Selanjutnya Bupati Lahat mengeluarkan IUP kepada sejumlah perusahaan swasta untuk beroperasi di Lahat. Persoalan ini terus berlanjut hingga PT BA Tbk melaporkan mantan Bupati Harunata (2003-2008) ke KPK. Mila Warman sebagai Direktur Utama PT BA didampingi oleh Patrialis Akbar, yang saat itu menjadi Komisaris Utama PT BA, melapor ke KPK atas dugaan potensi kerugian Negara sebesar 2,3 miliar dolar.

Hal tersebut hanya satu kasus di antara banyak kasus-kasus lain. Yang jelas, akses dari pertambangan batubara adalah rusaknya sekian banyak ekosistem yang hidup di area tersebut. Lahan-lahan yang sebelumnya tertata dengan baik, dikeruk dan dihancurkan untuk mengambil emas hitam didalamnya. Persoalan ini semakin parah ketika terjadi masalah pada lahan eks galian tambang.

##### 5. Komitmen pimpinan terhadap lingkungan hidup

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa masalah terbesar saat ini adalah pada aspek eksplorasi sumber daya alam untuk kepentingan manusia semata, baik masyarakat maupun sekelompok orang. Ini masalah yang sampai saat belum tertuntaskan.

Eksplorasi SDA akan berhubungan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya adalah mengolah dan mengelola lingkungan sedemikian rupa. Eksplorasi ini semakin menemukan masanya di era reformasi setelah pengunduran diri Soeharto. Kebijakan pertanian dan pembukaan lahan yang dulunya terpusat pada satu pihak

---

<sup>31</sup> <http://www.mongabay.co.id/2017/05/04/menguak-lapisan-persoalan-perizinan-batubara-di-sumsel-bagian-1/>

(pemerintah pusat), sekarang dengan bendera otonomi daerah diberikan pada masing-masing Kepala Daerah, terutama Bupati dan Walikota. Alhasil, baik atau tidaknya pengelolaan SDA di sebuah daerah sangat tergantung pada bagaimana daerah itu mengelolanya.

Sayangnya, yang terjadi justru banyak Kepala Daerah yang kemudian melakukan obral izin perkebunan dan pembukaan lahan untuk pengembangan pertanian monokultur seperti kelapa sawit. Bisa dilihat fakta bagaimana Bupati Seruyan Kalimantan Tengah yang memberikan begitu banyak izin perkebunan dan masuk untuk membuka areal menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Sejak 2008 sudah dikeluarkan izin sebanyak 43 buah dengan total luas 598.815,491 ha.<sup>32</sup> Diantara itu, tak sedikit pula yang kemudian tersandung kasus korupsi dan kongkalikong perizinan. Terbaru adalah kasus tertangkapnya Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari dalam kasus suap perizinan perkebunan kelapa sawit<sup>33</sup>.

Gambar 7. Areal Perkebunan Kelapa Sawit



Sumber : photo Lili Rambe, [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id)

<sup>32</sup> <http://www.borneonews.co.id/berita/34006-banyak-pbs-sawit-merambah-kawasan-hutan-di-seruyan>

<sup>33</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/28/19325891/suap-bupati-kukar-rita-widyasari-diduga-terkait-izin-perkebunan-kelapa-sawit>

Masalah perkebunan yang bersifat monokultur dalam skala luas, memang tidak akan bisa terjadi jika tidak ada izin dari pemimpin setempat. Fakta-fakta di berbagai tempat menunjukkan hal tersebut. Selain kasus Bupati Kutai Kertanegara di atas, tampak juga bagaimana Bupati Buol Sulawesi Tengah yang ditangkap KPK gara-gara kasus suap perizinan kebun kelapa sawit<sup>34</sup>. Tentu jika ditelusuri lebih jauh akan banyak ditemukan kasus-kasus yang melibatkan unsur pimpinan daerah terkait izin usaha.

Untuk wilayah Sumsel, masalah hampir serupa juga bisa ditemui. Maraknya penambangan batubara di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim adalah salah satu bentuk eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada. Bermula dari Kabupaten Lahat, sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Selatan berlomba-lomba mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), seperti Muaraenim, Musi Rawas Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), Pali, dan lainnya. Persoalan maraknya pemberian IUP yang dikeluarkan Bupati di Sumatera Selatan, menyebabkan batubara pun sertamerta menjadi komoditas yang “booming”. Siang dan malam batubara digali dan dibawa keluar dari Sumatera Selatan. Bukan hanya melalui kereta api, juga ribuan truk dan ratusan tongkang. Paralel, berbagai persoalan yang dirasakan oleh masyarakat pun muncul. Misalnya soal ganti rugi lahan antara masyarakat dengan perusahaan, serta terganggunya transportasi di jalan umum. Belum lagi tentang dampak lingkungan.<sup>35</sup> Maraknya aktifitas pertambangan batubara, tak lepas dari hasil kajian yang menunjukkan potensi batubara di Lahat sekitar 58 juta ton dengan kualitas terbaik (6.000-7.000 kalori) yang terbagi dalam beberapa blok seperti Blok Muara Tiga Besar (MTB), Kungkulan, dan Air Serelo (Sehile).

---

<sup>34</sup> <http://www.mongabay.co.id/2012/07/07/dugaan-suap-izin-kebun-sawit-bupati-buol-ditangkap-kpk/>

<sup>35</sup> <http://www.mongabay.co.id/2017/05/04/menguak-lapisan-persoalan-perizinan-batubara-di-sumsel-bagian-1/>

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa masalah lingkungan memiliki korelasi langsung dengan kebijakan pimpinan. Modusnya adalah aspek perizinan. Atas nama kepentingan industri dan kebutuhan manusia, SDA harus dieksplorasi dan diolah sedemikian rupa.

Hal lain yang juga tampak menonjol adalah kebijakan pemberian izin pendirian perumahan dan pemukiman pada areal yang semestinya di larang. Palembang dan kota-kota besar lainnya di Indonesia sudah mengalami hal itu. Maraknya pembangunan rumah toko (ruko) yang kemudian menimbun daerah resapan air, memunculkan masalah banjir setiap musim hujan. Untuk daerah perbukitan, ancaman longsor menjadi masalah yang sangat menakutkan. Kasus di Bopunjur (Bogor, Puncak, Cianjur). Data Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) menyebutkan, dalam kurun waktu delapan tahun terakhir telah terjadi perubahan fungsi lahan di kawasan lindung Kecamatan Cisarua secara signifikan, yakni sekitar 74%. Ditahun 2000, luas kawasan lindung masih sekitar 4,918 ha, kini tersisa 1.265 ha. Sementara pemukiman bertambah 44% (24.833 ha-35.750 ha). Uniknya pula, menurut KNLH, menjamurnya pembangunan villa di kawasan ini, sebagian besar dimiliki oleh para pejabat dan orang-orang kaya.<sup>36</sup>

Disinilah tampak bahwa persoalan lingkungan hidup adalah soal komitmen pimpinan atau pengambil kebijakan. Mulai dari level pusat hingga daerah, memiliki tanggungjawab untuk perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup. Sayangnya pula, dari sekian banyak kepala daerah sangat sedikit yang dalam prakteknya punya visi penyelamatan lingkungan hidup. Ajang kampanye kepala daerah misalnya, tidak atau sangat sedikit ditemukan janji kampanye yang punya komitmen terhadap lingkungan hidup. Tak ada salahnya jika dikatakan, bahwa jika ingin memilih kepala daerah yang baik dan berorientasi pada masyarakat,

---

<sup>36</sup> <http://www.menlh.go.id/kondisi-lingkungan-bopunjur-mencemaskan/>



pilihlah yang punya visi lingkungan hidup yang jelas. Jika tidak, masalah akan terus terjadi.

Prasasti Talang Tuwo adalah salah satu bentuk komitmen pimpinan terhadap lingkungan hidup. Kendati sudah terjadi ribuan tahun lalu, tapi nilai-nilai ini masih relevan dan tepat untuk dilakukan. Konsep *Green Growth Development* yang pernah dicanangkan di Sumatera Selatan, bisa jadi salah satu contoh, kendati untuk tataran praktik masih harus terus dimaksimalkan dan direalisasikan. Ini masalah besar yang harus dilakukan dan dicermati secara cermat.

#### 6. Keyakinan kepada Yang Maha Kuasa

Satu hal yang harus dicermati disini adalah bahwa bumi, alam dan seluruh yang ada disekitarnya adalah anugerah Yang Maha Kuasa. Ajaran agama manapun sudah menegaskan dan mengakui hal itu. Tidak ada satupun kitab suci yang diakui oleh masyarakat, yang membolehkan terjadinya tindakan perusakan terhadap lingkungan hidup. Prasasti Talang Tuwo secara jelas sudah mengatakan hal itu, yaitu kepercayaan pada Sang Budha. Ini sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut kala itu.

Sementara itu, gagasan *Land Ethics* dari Leopold bisa dikatakan salah satu tinjauan ilmiah yang juga memberikan penegasan terhadap hal itu. Ini tampak dari pengakuan bahwa bumi adalah nilai-nilai yang harus dicermati dan selalu menjadikannya sebagai prioritas.

Al Qur'an sebagai kitab suci umat Islam juga berkata hal yang sama. Surat Ar-Rum ayat 41-42, yang mengatakan bahwa kerusakan dimuka bumi adalah akibat ulah dari manusia. Begitu juga dengan Surat Al-A'raf ayat 56-58, juga menegaskan agar manusia senantiasa menjaga bumi dan tidak melakukan perusakan. Hadist-hadist nabi juga banyak yang menjelaskan tentang keharusan untuk berlaku baik dan menjaga kelestarian alam ini.

Keyakinan kepada Yang Maha Kuasa harusnya dijadikan sebagai dasar dalam menjaga kelangsungan hidup di muka bumi ini. Segala tindakan dan kebijakan, yang kemudian berpotensi melakukan kerusakan, sudah pasti adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan Yang Maha Kuasa. Hukum keseimbangan akan terganggu dan disitulah malapetaka akan terjadi.

Kepercayaan terhadap Yang Kuasa sebenarnya adalah keyakinan terhadap yang ghoib, yang diyakini sebagai penguasa alam ini. Masyarakat Indonesia ditingkat lokal sebenarnya sudah memiliki nilai-nilai ini, yang sering disebut dengan kearifan lokal (*local wisdom*). Susilo (2008;161) berkata bahwa sangat penting untuk melembagakan kembali kearifan-kearifan lokal tradisional karena ia membantu penyelamatan lingkungan. Kearifan lokal tradisional yang memiliki fungsi positif bagi masyarakat ini, menariknya bukan dirumuskan lewat proses saintifikasi yang menggunakan metode ilmiah baik sebagai objek maupun subjek.

Sampai sekarang, di beberapa komunitas masih melakukan itu dan masih menunjukkan fenomenanya. Salah satunya adalah kelompok masyarakat Baduy di Banten yang memiliki keyakinan kuat terhadap kekuatan penguasa alam. Baduy memang memiliki karakteristik kuat yang menempatkan kepercayaan terhadap Yang Maha Kuasa dan mengkontekkan dengan realitas alam semesta.

Riset dari Johan Iskandar (2004) menunjukkan bahwa masyarakat Baduy di Banten memiliki pola tersendiri dalam memahami lingkungan yang kemudian dipadukan dengan keyakinan terhadap Yang Maha Kuasa. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai tradisi yang dilakukan, sampai dengan pembuatan zonasi dalam mengelola lahan. Terutama sekali ini ditemukan di komunitas Baduy dalam. Mereka membagi sebutannya menjadi *huma serang*, *huma puun*, dan *huma masyarakat*. Pengelompokan ini didasarkan pada keyakinan bahwa alam semesta ini merupakan bagian dari pengaturan Sang Pencipta. Penduduk Baduy juga

melakukan larangan untuk menjual padi. Mereka percaya bahwa padi adalah perwujudan dari Dewi Sri, oleh karena itu hasilnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat. Ini identik sekali dengan konsep ketahanan pangan dengan pola bertani yang subsisten. Tanaman pangan bukan untuk dijual, tetapi untuk dimakan dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kepercayaan bahwa semua yang ada di bumi ini adalah milik Yang Maha Kuasa, artinya adalah keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang sebenarnya tidak punya wewenang untuk merusak alam semesta ini. Sewajarnya ini kemudian diejawantahkan dalam bentuk kebijakan dan perlakuan yang konkrit. Aktifitas masyarakat Baduy yang melindungi daerahnya dari kerusakan lingkungan adalah salah satu bukti bahwa tatanan itu harus dijaga.

Membaca gagasan dari Susilo (2008;180), ini sudah jelas disebutkan bahwa kegagalan pembangunan lingkungan di Indonesia, tidak lepas dari persoalan agama, disamping masalah hukum, politik, dan ekonomi. Tidak seharusnya lagi kegiatan-kegiatan ritual keagamaan hanya berkutat dengan peribadatan baku seperti berdoa, puasa, dan sebagainya. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan harus dimaknai dan dijelaskand alam bingkai religius. Gagasan besar yang mengajarkan umatNya untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan perlu digali secara lebih mendalam. Pesan dari kitab suci sudah jelas mengatur bahwa hubungan bukan hanya sekedar antar manusia tetapi juga manusia dengan alam.

Hal ini yang kemudian menjadi relevan sekali untuk diterapkan saat ini. Visi lingkungan untuk semua makhluk dengan percaya bahwa semua adalah makhluk ciptaan Tuhan, bisa menjadi sarana untuk memperkuat perlakuan terhadap alam semesta ini. Sayangnya, ini pula yang sekarang terabaikan. Oleh karena itu, aspek ini menjadi sangat relevan dengan kondisi kekinian.

## 7. Keserasian hubungan sosial

Lingkungan selalu memiliki relevansi dan keterhubungan dengan berbagai aspek lainnya. Rantai ekosistem menempatkan bahwa tidak ada satu kehidupan yang tidak terhubung dengan kehidupan lainnya. Ibnu Khaldun (Fakhry, 2001;126) pernah mengatakan, bahwa kehidupan sosial manusia, termasuk bentuk-bentuk persekutuan hidup manusia muncul sebagai akibat dari interaksi iklim, geografi, dan ekonomi. Semua bagian lingkungan ini kemudian akan membentuk dan menentukan corak serta temperamen manusia.

Donald Hardisty (Susilo, 2008;30), seorang penganut paham dominasi lingkungan mengatakan bahwa lingkungan fisik memainkan peran dominan sebagai pembentuk kepribadian, moral, budaya, politik, dan agama. Pandangan ini muncul tidak lepas dari asumsi bahwa dalam tubuh manusia ada tiga komponen dasar, yaitu bumi, air, dan tanah yang merupakan unsur penting dalam lingkungan.

Melalui paham dominasi lingkungan, keterikatan manusia dengan lingkungan dianggap sangat kuat. Lingkunganlah yang menentukan kehidupan manusia, termasuk pola hubungan yang terjalin. Susilo (2008;35) juga berkata bahwa dalam konteks hubungan ini, manusia cenderung kemudian menciptakan mitos-mitos, cerita-cerita yang intinya adalah memberikan penghormatan pada alam. Ini disebabkan keyakinan bahwa alam tersebut memiliki kekuatan tersendiri dalam menentukan hidup manusia.

Paham dominasi lingkungan yang kemudian lebih dekat ke wilayah Antroposentrisme, biar bagaimanapun telah menempatkan suatu realitas bahwa manusia tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya. Walau kemudian demi menjaga kehidupannya, manusia berusaha untuk menaklukkan lingkungan, tetapi yang jelas tatanan hidup manusia sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan sekitarnya.

Hal yang tidak bisa dipungkiri kemudian adalah hubungan sosial di masyarakat sangat ditentukan oleh bagaimana kondisi lingkungan disekitarnya. Bisa dicontohkan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah perairan/pesisir memiliki pola hubungan sosial yang lebih dekat ketimbang masyarakat yang berada di daratan/daratan tinggi. Hal ini disebabkan mereka lebih sering berkumpul dan struktur pemukiman juga lebih rapat. Faktor alam menyebabkan mereka harus membuat perumahan yang sangat rapat dan bertautan. Hal ini menyebabkan hubungan sosial juga semakin dekat. Sebaliknya masyarakat di daratan tinggi, cenderung tidak serapat perairan, karena struktur wilayah yang memang tidak memungkinkan untuk saling bertemu setiap waktu. Pengalaman penelitian penulis di daerah Semende Darat, Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa masyarakat setempat hanya memiliki waktu bertemu dalam jumlah banyak hanya di hari Jumat, waktunya *Kalangan* (pasar desa), dan ketika ada hajatan ataupun peristiwa kematian. Selebihnya masyarakat lebih banyak berada di kebun (Yenrizal, 2015).

Hal yang sama juga tampak dari bagaimana hubungan sosial yang terjalin antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, hubungan sosial cenderung lebih renggang dan bahkan menjurus individualistis. Antar tetangga bisa saja tidak saling kenal. Pertemuan sangat jarang dan aktifitas lebih banyak habis untuk kegiatan pekerjaan sehari-hari. Ini dimungkinkan terjadi karena faktor lingkungan setempat yang memberikan batas-batas kedekatan tersebut, seperti rumah dengan pagar tinggi, tembok pembatas, ataupun model tata ruang pemukiman yang memang tidak memberikan keleluasaan untuk bersosialisasi. Sebaliknya di pedesaan hal itu lebih rapat, rumah tidak memiliki pagar, jarak antar rumah sangat dekat, sehingga intensitas bertemu lebih banyak.

Dalam bahasa lain, Soerjono Soekamto (1986;363) menyebut adanya hubungan antara *biotic community* dengan *abiotic community*. Antara keduanya terdapat pola hubungan yang bersifat simbiosis mutualistis untuk menuju pada keadaan yang serasi, yang terwujud dalam kesatuan-kesatuan tertentu yang disebut dengan ekosistem. Setiap ekosistem senantiasa mengarah pada suatu keadaan yang seimbang, sehingga kontinuitasnya terjadi.

Sebuah pandangan menarik pernah disampaikan oleh Anshori Ch dan Sudarsono (2008;23) bahwa wawasan terpenting dalam masalah lingkungan hidup adalah keselarasan sosial. Hal ini berarti keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat karena adanya saling menghargai, saling melaksanakan rasa dan asas kepastian serta keadilan. Akan sangat bermanfaat jika di masyarakat kita tumbuh kelompok-kelompok yang secara lurus menggerakkan terselenggaranya keselarasan sosial. Apa artinya lingkungan alam indah dan mempesona, namun lingkungan sosialnya compang-camping. Disinilah perlunya keselarasan. Artinya hubungan sosial harus dibarengi dengan hubungan dengan lingkungan yang juga terjalin baik. Kemampuan menyesuaikan diri dengan alam, berhubungan pula dengan kemampuan untuk membangun relasi sosial yang baik.

Gambar 8. Kampung Nelayan Yang Ramah Lingkungan



Sumber : Dokumentasi Pribadi, Desa Tanah Pilih, 2017

Gambar di atas menunjukkan aktifitas di Desa Tanah Pilih, Kabupaten Banyuasin, yang dominan warganya adalah nelayan. Pemukiman dibangun dengan menyesuaikan topografi perairan pasang surut. Rumah-rumah dibangun secara berdekatan, sehingga memudahkan untuk menghubungkan antar rumah. Ini perlu karena jalan penghubung adalah jembatan kayu. Semakin jauh jarak rumah, semakin banyak kayu yang dibutuhkan. Membangun rumah berdekatan akan mengurangi konsumsi kayu sebagai jembatan. Akibatnya juga, komunikasi dan kedekatan sesama warga juga begitu rapat dan baik.

Tampak bahwa makna dari keserasian hubungan sosial dengan persoalan lingkungan hidup memiliki relevansi dengan kondisi kekinian. Sikap individualistis yang merenggangkan hubungan sosial, menyebabkan orang menjadi tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang lain. Ini adalah pangkal bencana, karena dengan membiarkan orang lain berbuat apa saja, akan berpotensi menjatuhkan orang tersebut ke perilaku merusak lingkungan. Gambaran tentang terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sumsel bisa memberikan bukti terhadap hal ini. Efek kebakaran terasa oleh semua pihak, tetapi tidak ada sikap bersama untuk mencegah terjadinya kebakaran. Ini masalah hubungan sosial yang sudah terganggu dan akhirnya menjadikan pembiaran terhadap perusakan lingkungan.

Hasil perjalanan dan pengamatan penulis di daerah Pedamaran Kabupaten OKI, Sumsel menunjukkan bahwa daerah yang sebelum ini merupakan pusat karhutla, sangat dipengaruhi oleh kedekatan dan kemampuan warga untuk membangun hubungan yang dekat. Karhutla kemudian bisa dideteksi secara dini dan masyarakat kemudian bahu membahu untuk mengatasinya. Organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sengaja dibentuk, ternyata sangat efektif sebagai tim pendeteksi awal kebakaran yang terjadi. MPA ini bisa berjalan karena memang ada

jalanan hubungan sesama masyarakat desa untuk mencermati fenomena karhutla yang terjadi.

Prasasti Talang Tuwo sudah menemukan momentumnya terhadap hal ini. Dapat dikatakan sebuah hipotesis bahwa di masyarakat yang pola hubungan sosialnya lebih dekat, maka aktifitas untuk merusak lingkungan juga akan berkurang. Sebaliknya di masyarakat yang hubungan sosialnya renggang, kegiatan merusak lingkungan sangat mungkin terjadi. Sebab utamanya adalah, rasa memiliki bersama terhadap alam, bukan milik individu-individu semata. Gagasan ini pula yang sekarang sangat dibutuhkan bahwa alam adalah milik semua makhluk, bukan kuasa segelintir orang saja.

Berdasarkan semua penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa naskah prasasti Talang Tuwo adalah sebuah piagam yang memiliki fokus pada lingkungan hidup dan penataan ruang. Motif-motif dari Sang Raja memang bisa ditafsirkan bervariasi. Tetapi, dalam konteks komunikasi lingkungan, pesan-pesan ini memiliki makna yang jelas bahwa ini adalah soal bagaimana lingkungan harus dikelola dan ditata. Taman Sriksetra yang tercantum dalam prasasti bisa dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan kepatuhan raja terhadap ajaran agama yang mengharuskan untuk berbuat baik terhadap semua makhluk hidup.

Sri Jayanasa adalah sosok raja beragama Budha dan memiliki ketaatan tinggi terhadap agamanya. Paham Budha memang menekankan pada keserasian hubungan, baik sosial maupun dengan lingkungan. Ini yang dimaknai oleh Sang Raja dan kemudian terwujud dalam petuah yang dibuatnya di Talang Tuwo. Komunikasi lingkungan, yang menekankan pada aspek pemaknaan terhadap simbol-simbol alam yang berguna untuk kebaikan hidup semua makhluk, tampak dari bagaimana Sang Raja memerintahkan pembangunan Taman Sriksetra. Telaah terhadap nilai-nilai lingkungan pada prasasti memperlihatkan bahwa dari semua sisi, ini berhubungan dengan bagaimana lingkungan harus diperlakukan.



Hal yang penting juga dalam kaitan relevansi nilai ini adalah membangun spirit bersama, semangat untuk menjadikan naskah Prasasti Talang Tuwo sebagai paradigma dalam mengelola lingkungan hidup. Ini terkait dengan komponen penting dalam naskah Prasasti Talang Tuwo, dan juga cakupan wilayah Sriwijaya yang luas.

Pada kondisi Indonesia saat ini, spirit tersebut sangat relevan sekali. Salah satunya adalah melakukan kegiatan kampanye lingkungan yang sehat. Akan sangat bijak dan baik sekali, andai pemerintah daerah memiliki komunitas/tim khusus kampanye lingkungan yang punya kewenangan lintas instansi. Kampanye lingkungan bukan sekedar memasang spanduk atau himbauan agar tidak merusak lahan, tetapi dimulai dari aksi nyata yang ada di level kebijakan. Kampanye bukanlah membangun opini publik, tapi membuktikan kepada publik (Yenrizal, 2017).

Spirit Talang Tuwo sudah bicara itu. Inilah yang seharusnya mengilhami berbagai kebijakan yang dibuat. Persoalannya sekarang, bagaimana pelaku kebijakan di Indonesia dan Sumsel khususnya, memandang prasasti tersebut sebagai benda yang punya makna faktual saat ini, bukan sekedar benda bersejarah yang hanya tersimpan di museum. Aktualisasi Prasasti Talang Tuwo harus dimulai, dan kebijakan pemerintahlah yang akan menjadi ujung tombaknya (Yenrizal, 2017). Selain juga hal ini kemudian ditularkan dan diperluas ke masyarakat lainnya. Masyarakat juga harus memahami ini, dan inilah yang kemudian perlu dikampanyekan secara luas. Kampanye spirit Talang Tuwo harus dilakukan sejak saat sekarang, seiring juga dengan perlunya membangun sebuah *grand design* pembangunan lingkungan yang berbasis pada Talang Tuwo.

#### **IV.4. Prasasti Talang Tuwo dalam Perspektif Komunikasi Lingkungan**

Prasasti Talang Tuwo sudah jelas berbicara mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Pesan yang tertulis di prasasti, serta uraian yang sudah dipaparkan sebelumnya sudah menegaskan akan hal tersebut. Tidak ada

keraguan soal ini. Pada konteks ini, Prasasti Talang Tuwo juga memiliki keterkaitan dan bahkan bisa dikatakan adalah salah satu bentuk komunikasi lingkungan Sang Raja saat itu. Hal ini juga bisa diperluas dengan mengatakan bahwa nilai-nilai lingkungan hidup dalam Prasasti Talang Tuwo adalah nilai-nilai yang memang merupakan pesan-pesan penting bagi pelestarian dan perlindungan lingkungan.

Komunikasi lingkungan tetaplah berakar pada keilmuan komunikasi sebagai pondasinya. Unsur utama dalam komunikasi adalah pelaku komunikasi (sering juga disebut komunikator dan komunikan). Dalam hal ini saya lebih cenderung mengatakan sebagai pelaku, yang merupakan semua unsur yang melakukan aktifitas komunikasi, khususnya komunikasi antar manusia. Tidak perlu dipisahkan mana yang komunikator atau komunikan, keduanya adalah pelaku yang aktif dalam berkomunikasi. Keduanya adalah unsur yang secara aktif saling memaknai. Unsur berikutnya adalah pesan yang dimaknai. Dalam literatur lain sering pula disebut sebagai simbol-simbol yang dimaknai, yang kemudian menjadi pesan. Proses komunikasi selalu ada pemaknaan terhadap simbol-simbol yang kemudian menjadi pesan (Mulyana, 2001).

Dalam konteks komunikasi lingkungan, unsur lain tentu saja adalah lingkungan itu sendiri. Tetapi disini, lingkungan bukanlah sesuatu yang terpisah dari manusia, ia bukanlah objek, tetapi subjek dalam proses komunikasi. Artinya lingkungan merupakan komponen aktif yang akan memberikan signal-signal ataupun simbol-simbol yang dimaknai oleh manusia. Lingkungan ini bisa berupa seluruh makhluk hidup dan non hidup selain manusia. Dalam bahasa Soemarwoto (2004) disebut juga sistem ekologi. Semua yang tercakup dalamnya adalah lingkungan, dan semua memberikan respon-respon yang bersifat aktif.

Komunikasi lingkungan, adalah sebuah bidang khusus dalam kajian ilmu komunikasi, yang fokus pada peristiwa komunikasi sesama manusia dalam memaknai lingkungan mereka. Florr (2004;8) menjelaskan bahwa komunikasi lingkungan adalah aplikasi dari pendekatan-pendekatan dalam keilmuan

komunikasi, prinsip-prinsip, strategi dan teknik untuk perlindungan dan manajemen lingkungan. Komunikasi lingkungan dikatakan memiliki empat asumsi utama yang terinspirasi *Barry Commoners Four Laws of Ecology*. Keempat hal tersebut adalah :

1. Segala sesuatu pasti terhubung dengan sesuatu yang lainnya

Tidak ada manusia atau makhluk lainnya yang bisa hidup sendiri. Sebagai sebuah sistem ekologi, semua terhubung dan saling berkaitan. Manusia tidak hidup sendiri di dunia ini, ada makhluk lain yang juga punya hak hidup dan memberikan sumbangsih bagi kehidupan yang lebih banyak. Apabila kita membangun rumah, maka di situ ada komunitas lain yang juga harus diperhatikan dan manusia terhubung padanya. Ada unsur air, tanah, makhluk kecil yang hidup didalam tanah, pepohonan, dan sebagainya. Semuanya akan terhubung dan membuatnya tidak bisa dipisahkan sama sekali. Justru saat keterhubungan ini terganggu, maka disitu juga masalah bisa terjadi, hukum keseimbangan sebagai hukum alam sudah terganggu, dan bencana biasanya akan datang. Istilah “rantai makanan” dalam biologi bisa merujuk pada pengertian ini.

2. Segala sesuatu pasti berpindah ke tempat lainnya

Dinamika kehidupan ini adalah sebuah siklus dan ritme yang dinamis. Perpindahan baik secara fisik maupun non fisik pasti terjadi. Hukum alam dalam perspektif ekologi sudah menegaskan hal ini, dimana kehidupan selalu berpindah-pindah dan berubah. Tidak ada satu makhluk apapun, dalam jenis apapun, yang bersifat statis, ia selalu bertransformasi dari satu tahap ke tahapan lainnya. Seorang manusia pasti mati, ia juga akan mengalami siklus dari kecil hingga besar. Seekor binatang juga demikian, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya, akan mengalami siklusnya sendiri-sendiri. Tidak ada yang kekal di dunia ini, kira-kira begitulah makna pada prinsip ini.

3. Alam memiliki pengetahuannya sendiri

Lingkungan alam dengan segenap isinya bukanlah sesuatu yang mati dan diam begitu saja. Kendati sering diasumsikan bahwa manusialah makhluk yang berpikir, tetapi faktanya alam memiliki kemampuan memberikan respon terhadap tindakan manusia atau makhluk lain. Sesama makhluk non manusia, respon-respon ini juga dilakukan dan terjadi. Apabila di sebuah tempat terjadi serangan makhluk buas, seperti gajah masuk perkampungan, itu bukanlah sesuatu yang berlangsung begitu saja. Hukum sebab akibat berlaku dalam konteks ini yang menunjukkan pengetahuan alam terhadap perilaku orang disekitarnya. Begitu juga, pada daerah tertentu hanya tanaman tertentu yang bisa hidup, kesesuaian iklim, cuaca, angin dan air, semua menunjukkan pengetahuan alam terhadap makhluk-makhluk yang ada disekitarnya. Pada beberapa sisi, pengetahuan inilah yang sering diabaikan karena hanya memandang dari sisi manusia semata. Masyarakat Baduy sebagaimana penelitian Iskandar (2009) memperlihatkan bagaimana komunitas lokal kemudian memaknai pengetahuan alam dengan membuat berbagai bentuk pola pemukiman dan peruntukan yang ada. Semua dilakukan karena keyakinan bahwa alam memiliki dinamika dan pengetahuannya sendiri.

4. Tetapi tidak ada satupun “makan siang gratis”

Ini diasumsikan bahwa setiap tindakan pasti memiliki efek tertentu. Hukum sebab akibat berlaku disini. Tidak ada tindakan manusia yang tidak akan memberikan efek tertentu. Apabila manusia melakukan perusakan alam, tanpa memperhatikan mekanisme keseimbangan alam, maka bencana akan datang. Tidak ada makan siang yang gratis. Inilah hukum alam yang tidak bisa terbantahkan dan akan selalu datang. Manusia kerap mengabaikan ini dan akhirnya bencana tersebut datang setiap waktu. Kabut asap

bukanlah tanpa sebab, tetapi memang karena ada perlakuan terhadap kawasan hutan dan rawa-rawa yang ada. Gambut dirusak, rawa dikeringkan, kebakaranpun terjadi.

Oleh karena itu, Florr juga mengatakan terdapat lima aspek dasar dalam komunikasi lingkungan yaitu :

1. Ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum lingkungan

Pemahaman terhadap komunikasi lingkungan haruslah diawali dengan pengetahuan tentang hukum-hukum lingkungan. Ini sebagai acuan bahwa pemaknaan terhadap lingkungan didasarkan pada hukum-hukum alam yang ada. Prinsip-prinsip ekologi yang dijelaskan diatas didasarkan pada kenyataan tentang hukum lingkungan. Oleh karena itu, prinsip ekologi harus dipahami terlebih dahulu. Ini nantinya akan bermuara pada sikap dan perlakuan terhadap masalah lingkungan yang ada.

2. Sensitivitas pada dimensi budaya

Dimensi budaya merupakan unsur penting pada kegiatan komunikasi lingkungan. Ini sudah sangat jelas disebutkan oleh Florr (2004) yang mengambilnya dari perspektif Teori Sistem Umum (*general system theory*) bahwa komunikasi lingkungan ditemukan dalam budaya masyarakat, tampak dari fakta kehidupan budaya tradisional di masyarakat. Budaya dan alam akan saling berhubungan, saling berinteraksi dalam sebuah sistem sosial ekologi tersendiri. Memperlakukan lingkungan pada dasarnya adalah perlakuan budaya dari masyarakat. Kebudayaan masyarakat juga terbentuk dari interaksinya dengan lingkungan setempat. Tradisi Sereun Tahun di Sunda misalnya, adalah adaptasi dari tradisi agraris dan pemahaman bahwa alam harus diperhatikan dan diperlakukan sebaik mungkin. Begitu juga tradisi-tradisi lain, seperti tradisi Upah Tanah di masyarakat Muara Merang, Sumatera Selatan, juga adalah hasil interaksi dengan alam yang menyatakan bahwa tanah adalah segala-

galanya. Mengabaikan dimensi budaya, diyakini akan melepaskan masyarakat dari konteks lingkungannya.

3. Kemampuan jaringan yang efektif

Melaksanakan aktifitas komunikasi lingkungan, termasuk kegiatan-kegiatan kampanye lingkungan, pada dasarnya akan terkait dengan membangun jejaring. Komunikasi lingkungan, apalagi dengan masuknya unsur advokasi lingkungan, dipastikan membutuhkan kekuatan jejaring yang lebih efektif. Jejaring ini bisa berasal dari unsur *stakeholder* terkait, yang memiliki fokus pada aspek lingkungan. Kita tidak bisa bergerak sendiri, karena lingkungan membutuhkan intervensi dari banyak pihak. Memahami ini pada orang lain, tidak cukup hanya dari satu sudut pandang semata.

4. Efisien dalam penggunaan media untuk agenda setting sosial

Penggunaan media juga sangat diperlukan dalam konteks pelaksanaan komunikasi lingkungan. Media berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, membentuk agenda publik, dan juga membuat opini bersama mengenai lingkungan. Efektifitas dan efisiensi penggunaan media, harus pula dikontekskan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat setempat. Tanpa ini semua, gerakan-gerakan advokasi lingkungan, gerakan penyelamatan lingkungan, cenderung akan terlewat begitu saja.

5. Resolusi konflik, mediasi, dan arbitrase

Masalah lingkungan sangat dekat hubungannya dengan konflik lingkungan. Hasil riset dari Tahyudin (2016) tentang konflik masyarakat di kawasan Suaka Margasatwa Bentayan Sumsel adalah salah satu bukti konkrit. Didi Tahyudin menyebutkan bahwa konflik ini terjadi antara rakyat dengan negara (diwakili oleh BKSDA). Persoalannya adalah penguasaan sumber daya alam. Masyarakat menganggap itu sebagai lahan konservasi, sementara BSDA

berkeyakinan bahwa itu adalah wilayah yang dilarang untuk diolah dan dibuka.

Begitu juga analisa dari Leeson, Coyne dan Boettke (2006) yang menyebut soal *focal point* dan evolusi dari resolusi konflik yang bisa dilakukan. Hal yang sama juga bisa dilihat dari riset Ahcyar (2005) tentang konflik sumber daya alam di daerah Riding, Sumatera Selatan. Ahcyar juga menyebutkan perlunya metode yang lebih komprehensif mengenai resolusi konflik, terutama dengan pendekatan budaya, hukum, dan juga non litigasi. Semua harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Florr (2004;7) juga menyebutkan bahwa fenomena konflik lingkungan adalah fenomena umum di negara berkembang. Dimanapun dan kapanpun itu, proyek-proyek lingkungan punya kecenderungan memberikan dampak saat implementasinya. Dalam beberapa hal, konflik justru terjadi karena adanya kebuntuan informasi antara pendukung proyek dengan komunitas yang terdampak. Praktisi komunikasi lingkungan seharusnya bisa mengambil posisi sebagai mediator pada kegiatan tersebut. Oleh karena itu, keterampilan dan keahlian dalam resolusi konflik juga harus dimiliki.

Pandangan Florr di atas menekankan bahwa komunikasi lingkungan berada dalam situasi dan kondisi yang sangat kompleks. Komunikasi lingkungan merupakan sebuah situasi yang memungkinkan terjadinya berbagai hal yang saling mempengaruhi. Disebutkan juga oleh Florr (2004;18) bahwa komunikasi lingkungan ditemukan dalam budaya masyarakat, secara khusus, dalam budaya-budaya tradisional. Budaya dan alam bukanlah sesuatu yang terpisah, tapi saling terhubung. Oleh karena itu, komunikasi lingkungan selalu akan memasukkan dimensi-dimensi budaya masyarakat setempat.

Richard Jurin (2010;5) menyebutkan bahwa salah satu prinsip dasar dari komunikasi lingkungan adalah kehidupan manusia tergantung pada bagaimana lingkungan bisa dipertahankan. Prinsip lainnya adalah, bumi memiliki pesannya

sendiri untuk dibagikan dengan semua manusia. Terpenting lagi, tidak ada manusia yang tidak berkomunikasi. Setiap aktifitas manusia adalah berkomunikasi, baik itu proses yang verbal maupun non verbal. Saat manusia membuka lahan dengan cara tertentu, maka saat itu ia sudah berkomunikasi mengenai lingkungan sekitarnya. Ia sudah melakukan kegiatan mempersepsi lingkungan.

Sedangkan Sawyer (Senecah, 2004;229) menjelaskan bahwa saat manusia memaknai lingkungan, saat itulah komunikasi lingkungan sudah terjadi. Dalam proses komunikasi lingkungan ini sendiri, manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara non verbal dengan lingkungannya. Apakah itu dalam bentuk merasakan, mendengarkan, melihat, ataupun meraba lingkungan itu sendiri. Kemampuan komunikasi nonverbal inilah yang banyak sebenarnya ditemukan di masyarakat saat mereka berada dalam sebuah situasi alam tertentu.

Manusia bisa mendengarkan suara hewan-hewan, bisa mendengarkan suara air, suara angin, gemuruh di langit pertanda hujan, ataupun desauan dedaunan kayu. Semua itu adalah komunikasi non verbal, yang kemudian juga direspon secara non verbal. Auman suara harimau di tengah hutan, akan disikapi dengan menghindar dari kawasan tersebut, suara air akan diikuti dengan tindakan mencari sumber air atau respon lainnya. Semua ini adalah non verbal. Artinya segala sikap dan perilaku manusia dalam merespon fenomena alam adalah aspek non verbal dalam komunikasi.

Tidaklah mengherankan jika kemudian Dapunta Hyang memerintahkan membangun sebuah taman, sebagai responnya terhadap kondisi alam yang ada. Daerah Talang Tuwo adalah daerah daratan yang berjarak sekitar 6 km dari Sungai Musi dan dataran rendah. Bisa juga dikatakan bahwa Talang Tuwo adalah sumber air yang akan mengalir ke bawah. Apabila daerah ini tidak dijaga dan dikelola dengan baik, niscaya luapan air ke Sungai Musi akan melimpah. Efeknya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Musi. Sri Jayanasa atau



Dapunta Hyang sudah bisa memahami dan memaknai ini, karena itulah taman dibuat lebih ke darat.

Kemampuan memaknai alam adalah kemampuan komunikasi lingkungan dalam pengertian yang lebih luas. Di masyarakat, ini kemudian disebarluaskan, dikomunikasikan, dan menjadi makna bersama. Dapunta Hyang adalah pihak yang melegalkannya dan membuatnya sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Posisinya sebagai Raja membuat ia punya kuasa terhadap masyarakatnya. Artinya pihak yang dominan dalam peristiwa komunikasi ini adalah Raja Sriwijaya, Dapunta Hyang.

Dapunta Hyang pada dasarnya sudah menjalankan prinsip komunikasi lingkungan. Alam bukanlah sekedar objek, tetapi juga adalah subjek yang harus diakui keberadaannya. Pengelolaan lingkungan bukanlah semata-mata karena aspek ekonomi saja, bukan pula soal kemanfaatan bagi manusia saja, tetapi soal kepentingan semua makhluk (Dewi, 2015). Ada kepentingan bumi yang harus diperhatikan bersama-sama. Gagasan Aldo Leopold (1949) menjadi relevan pada konteks ini, yaitu etika terhadap bumi dengan segala isinya. Digarisbawahinya bahwa ketergantungan lapisan hewan dan tumbuhan, tumbuh dalam satu komunitas biotik. Perubahan yang dilakukan manusia berdampak langsung terhadap kelangsungan komunitas tersebut. Kelalaian mengolah tanah atau mempergunakannya tanpa melihat implikasi interdependensi bisa menyebabkan kepunahan spesies (Dewi, 2015;28).

Prasasti Talang Tuwo jelas memiliki arah dan kecenderungan kepada wilayah tersebut. Pesan-pesan yang terkandung dalam naskah prasasti Talang Tuwo kemudian juga menjadi relevan dengan kondisi saat ini (2017). Berbagai persoalan lingkungan hidup yang selama ini dirasakan manusia, pada dasarnya adalah pengabaian terhadap nilai-nilai yang sejatinya sudah pernah tertulis dalam naskah prasasti. Bisa jadi juga karena ketidaktahuan bahwa prasasti sudah berkata tentang perlunya bersinergi dengan lingkungan, menjaga alam, dan mempergunakan untuk kepentingan semua makhluk.

Oleh karena itu, pesan-pesan lingkungan yang terdapat dalam naskah prasasti Talang Tuwo, apabila digali kembali saat ini, merupakan sesuatu yang sangat vital dan mendesak. Kampanye lingkungan hidup, khususnya di wilayah Sumatera Selatan dan Indonesia, bisa dimulai dari memahami dan membumikan naskah prasasti tersebut. Disini jugalah makna penting aktifitas komunikasi lingkungan ditempatkan, yaitu sudah memiliki *basic* yang jelas pada leluhur di era Sriwijaya. Hal ini yang disebutkan sebagai *grand design* dengan semangat Talang Tuwo. Membumikan nilai-nilai pada Prasasti Talang Tuwo adalah dengan mengkampanyekan kepada semua pihak, menjadikannya sebagai semangat bersama, dan kemudian ini tertuang pula dalam kebijakan pemerintahan yang ada.

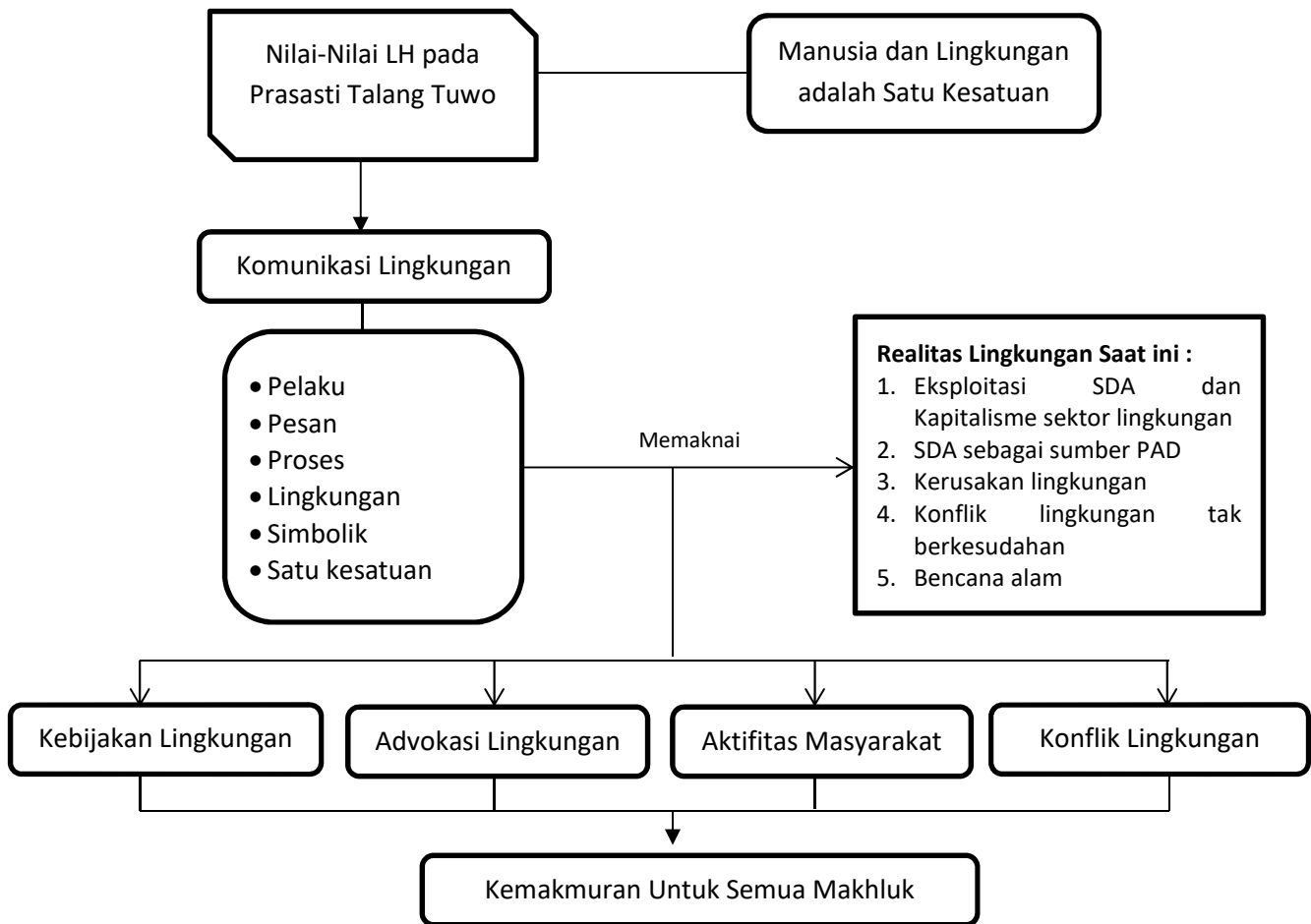
Memaknai alam, itulah kata penting dalam komunikasi lingkungan. Memaknai ini adalah gagasan dasar dan sangat filosofis dalam komunikasi lingkungan. Kata yang bisa dikatakan penyebab malapetaka yang senantiasa dialami. Kata yang memiliki dua sisi pemaknaan berbeda, untuk alam dan manusia atautkah untuk manusia semata. Kata inilah yang akan bermuara pada banyak aspek, mulai dari perilaku manusia, sampai pada kebijakan pemerintah. Terbayang saat tahun 2009 lalu, penambangan batu bara digencarkan sedemikian rupa, karena batubara dianggap sumber pendapatan dan sumber energi luar biasa. Teringat pula saat tahun 1990-an, perkebunan kelapa sawit menyebar ke berbagai pelosok, menghabiskan ribuan kubik kayu bernilai tinggi, mengeringkan rawa-rawa gambut, karena sawit dianggap punya nilai ekonomis tinggi (Yenrizal, 2017). Semua fenomena ini adalah realitas-realitas yang bisa dikatakan berangkat dari pemaknaan manusia terhadap lingkungan alam. Kerusakan kemudian terjadi dan berbagai bencana pula dialami, semua tentu karena salah dalam pemaknaan dan salah pula dalam bersikap. Ini kekeliruan besar dalam komunikasi lingkungan yang dilakukan selama ini.

Oleh karena itulah, apabila leluhur saja sudah mengingatkan tentang nilai-nilai penting lingkungan hidup, maka sudah jadi kewajiban pula bagi generasi berikut untuk meneruskannya. Andai ini tidak dilakukan, maka bisa

jadi “kutukan” Dapunta Hyang, sebagaimana tercantum dalam banyak prasasti lainnya sudah tampak nyata. Sayang, tak banyak masyarakat yang melekat terhadap hal ini, bahkan hingga saat ini.

Secara sederhana, adanya Prasasti Talang Tuwo dalam konteks Komunikasi Lingkungan bisa dijelaskan pada bagan berikut.

Bagan 2. Prasasti Talang Tuwo dan Komunikasi Lingkungan



Sumber : analisa penulis

Tampak bahwa, sasaran akhir dari internalisasi nilai-nilai lingkungan hidup pada Prasasti Talang Tuwo adalah untuk kemakmuran semua makhluk. Ini yang selama ini belum tercapai. Proses komunikasi lingkungan yang dilakukan, sejatinya bisa memfasilitasi terciptanya mimpi besar ini.

Komunikasi lingkungan dalam konteks ini tergambar dari realitas bahwa proses pemaknaan yang terjadi dalam mensikapi realitas persoalan lingkungan bisa terwujud pada berbagai aspek yaitu :

1. Kebijakan lingkungan yang pro terhadap konsep *sustainable environment*. Ini bisa masuk dalam agenda-agenda kebijakan di masing-masing pemerintahan. Sumatera Selatan sudah mencoba melakukan ini dengan konsep *Green Growth Develeopment*, kendati dalam prakteknya tetap saja masih dibutuhkan upaya-upaya maksimal. Kebijakan-kebijakan yang melakukan moratorium pembukaan lahan gambut, pembatasan lahan perkebunan dalam skala besar, sebenarnya bisa masuk dalam kelompok ini. Tetapi lebih jauh adalah *grand design* pembangunan itu sendiri, yang menempatkan persoalan lingkungan sebagai agenda paling strategis. Kebijakan lingkungan ini termasuk adalah aktifitas perusahaan besar yang banyak beraktifitas terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan perusahaan tersebut tentu atas izin dan sepengetahuan pemerintah. Oleh karena kebijakan yang pro lingkungan diperlukan untuk menempatkan posisi yang tepat atas eksplorasi sumber daya alam.
2. Advokasi lingkungan. Kegiatan ini merupakan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh semua pihak, baik organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat itu sendiri. Termasuk disini komponen pemerintahan juga bisa melakukan hal tersebut. Advokasi bukan semata-mata soal konflik, tetapi upaya melakukan revitalisasi, perbaikan lingkungan hidup, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk pembenahan lingkungan secara keseluruhan.
3. Aktifitas masyarakat. Selama ini ada kecenderungan opini yang berkembang bahwa kerusakan lingkungan dominan disebabkan oleh kegiatan masyarakat yang tidak memperhatikan masalah lingkungan. Pembakaran lahan untuk memulai usaha cocok tanam yang baru, adalah salah satu contoh yang kemudian menyebabkan kebakaran hutan dan

lahan dalam skala yang lebih luas. Kegiatan pembalakan liar yang dilakukan oleh unsur-unsur masyarakat secara individual ataupun terorganisir, juga bagian dari kegiatan ini. Pemakaian pukot harimau, bom ikan, zat kimia untuk menangkap ikan, bisa pula dimaknai pada aktifitas ini. Penimbunan rawa untuk membuat bangunan, menghilangkan daerah resapan, dan berbagai tindakan masyarakat lainnya, bisa masuk dalam aspek ini. Tentu saja, merubah dan mendorong masyarakat untuk tidak melakukan itu, bukanlah pekerjaan mudah. Agenda kampanye lingkungan, edukasi lingkungan, serta dukungan kebijakan konkrit dari pemerintah sangat diperlukan. Jika tidak, ini hanya akan jadi semangat yang tidak ada hasil konkritnya sama sekali.

4. Konflik lingkungan. Ini biasanya terjadi antar sesama masyarakat, masyarakat dengan pelaku usaha, ataupun antara masyarakat dengan pemerintah. Masalah dasarnya hanya satu, perebutan kuasa atas sumber daya alam. Lagi-lagi ini menempatkan lingkungan sebagai objek dan manusia punya kuasa atas hal itu. Komunikasi lingkungan dengan semangat Prasasti Talang Tuwo seharusnya bisa menjembatani ini. Soal *mind set* adalah hal dasar, dan ini yang harus dibenahi. Sekali lagi, ini juga tidak mudah dan sederhana. Tetapi semangat ini bisa digelorakan dan didorong terus dengan pendekatan komunikasi lingkungan yang kuat. Antara gagasan dan praktek dikonkritkan melalui tindakan-tindakan nyata. Hal ini juga nantinya akan beririsan komitmen dan kebijakan lingkungan dari pemerintah.

Melaksanakan komunikasi lingkungan dengan semangat Talang Tuwo memang tidaklah mudah. Tetapi ini harus ditempatkan sebagai semangat dasar dalam melihat masalah lingkungan hidup dan program-program pembangunan. Aktifitas kebijakan dan semuanya yang dilakukan, beranjak dari paradigma besar sebagaimana tercantum dalam Prasasti Talang Tuwo. Inilah ruh yang mesti dibangun, dalam konteks masyarakat apapun itu.

# BAB V

## PENUTUP

### V.1. Kesimpulan

Penjelasan yang panjang lebar pada bagian sebelumnya, akhirnya membawa tulisan pada kesimpulan akhir. Kesimpulan ini ditarik dengan mengacu pada pertanyaan penelitian, serta ditambahkan dengan temuan-temuan lain di luar pertanyaan penelitian.

Penggambaran nilai-nilai lingkungan hidup dalam Prasasti Talang Tuwo tampak dari tujuh unsur nilai yang bisa dirincikan. Mulai dari anjuran untuk melakukan penanaman ulang tanaman endemik sampai dengan keyakinan pada Yang Maha Kuasa dan keserasian hubungan sosial. Nilai-nilai ini bisa diuraikan dari teks-teks yang sudah diterjemahkan George Coedes. Cukup kentara sebenarnya nilai yang disebutkan disitu, dan setidaknya ini sudah mencerminkan pesan-pesan yang nyata seputar lingkungan hidup.

Pola struktur pesan dan teks tampak bahwa pesan-pesan ini merupakan pesan yang didominasi oleh kekuasaan seorang Raja. Hal ini tampak dari penggunaan atau penyusunan kata-kata yang identik sekali dengan bahasa seorang pemimpin. Pola yang tampak adalah pola yang menunjukkan satu garis lurus dari seorang raja kepada rakyat. Tetapi ada makna kelembutan dan sikap empatik dari bahasa yang digunakan, tampak dari harapan-harapan yang muncul dari Raja. Bisa jadi ini memang adalah sikap seorang *Bodhi* yang sudah melewati level-level tertentu menuju kesempurnaan.

Hal yang menonjol kemudian dan bisa menjadi bahan analisis penting adalah relevansi nilai-nilai lingkungan hidup yang ada dalam prasasti dengan kondisi sekarang. Hasil analisis menunjukkan bahwa ia memang sangat relevan dan dibutuhkan saat ini. Mulai dari keharusan menanam tanaman, variasi, pengaturan air, keyakinan pada Tuhan, keserasian sosial dan sebagainya, semua

relevan sekali. Ini didasarkan atas fenomena lingkungan yang dialami masyarakat memang sangat rumit dan kompleks. Oleh karena itu, bisa dimunculkan hipotesis bahwa pengabaian terhadap nasehat dan petuah para leluhur akan berimplikasi pada kerusakan hidup manusia. Fakta pada nilai-nilai yang terkandung dalam prasasti Talang Tuwo sudah menunjukkan hal tersebut.

## **V.2. Saran**

1. Menjadikan semangat yang terkandung dalam prasasti Talang Tuwo sebagai spirit pembangunan di semua daerah sangat perlu dipertimbangkan. Ini didasarkan keyakinan bahwa prasasti ini dibuat oleh leluhur kita sendiri, bukan datang dari luar. Spirit itu sangat relevan dan dibutuhkan dengan kondisi lingkungan saat ini.
2. Sosialisasi tentang semangat dan nilai-nilai dalam Prasasti Talang Tuwo perlu terus disampaikan dan ditanamkan kepada semua generasi. Ini agar nilai tersebut tidak terlepas dari diri mereka. Peristiwa itu sudah berlangsung lama, tapi generasi muda sekarang dan yang akan datang perlu untuk tahu tentang hal itu.
3. Akan lebih baik dan lebih menarik lagi jika ada yang mau meneruskan riset ini dengan sebuah rencana aksi, yaitu bagaimana agar nilai-nilai lingkungan hidup pada Prasasti Talang Tuwo bisa benar-benar tertanam ke generasi muda dan generasi lainnya. Metode dan cara praktis untuk menanamkan nilai itu adalah kajian riset tersendiri yang juga diperlukan.

## Daftar Pustaka

- Andarwulan, N. dan P. Hariyadi. 2004. *Perubahan Mutu (Fisik, Kimia, Mikrobiologi) Produk Pangan Selama Pengolahan dan Penyimpanan Produk Pangan. Pelatihan Pendugaan Waktu Kedaluarsa (Shelf-Life)*, Bogor, 1-2 Desember 2004. Pusat Studi Pangan dan Gizi. Institut Pertanian Bogor
- Ahimsa-Putra, Heddi Shri, 2012. *Etno Bencana, Etno Sains untuk Kajian Bencana*, dalam Respon Masyarakat Loka atas Bencana, Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono (ed.), Penerbit Mizan dan CRCS UGM, Bandung.
- Anshory CH, HM Nasruddin dan Sudarsono, 2008, *Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Budaya Jawa*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Alfons, Janes Berthy dan A. Arivin Rivaie, 2011, *Sagu Mendukung Ketahanan Pangan Dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim*, Jurnal Perspektif, Volume 10 No 2.
- Bajari, Atwar dan Salaha Tua Saragih, 2010, *Komunikasi Kontesktual, Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Basorun, JO dan Ayeni DA., 2013, *Planning and Restoration of Environmental Values in Nigeria Disfunctional Societies*, European Journal of Sustainable Development, Volume 2 Nomor 4.
- Beckmann, Suzane dan William E Kilbourne, 1997, *Antropocentrism, Value System, and Environmental Attitude, A Multi National Comparison*, Copenhagen Bisnis School, Denmark
- Bicker, Alan, Paul Silioe, Johan Pottier (ed.), 2004, *Developmental and Local Knowledge*, Routledge, London
- Bodgan, Robert and Steven J. Taylor. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methods*. United States of America: John Wiley & Sons
- Boyd, Robert and Peter J Richerson., 1985, *Culture and Evolutionary Process*, The University of Chicago Press, Chicago and London.
- Branch, N, M. Canti, P. Clark and C. Turney (eds), 2005, *Environmental archaeology. Theoretical and practical approaches*, Hodder Arnold, London
- Brosius J Peter, George W Lovelace dan Gerald Marten, 1986, *Ethnoecology : An Approach to Understanding Traditional Agricultural Knowledge*, dalam



- Gerard Marten, *Traditional Agriculture in Southeast Asia, A Human Ecological Perspective*, Westview Press, Colorado
- Calbarello, Rosario, 2008, *Theorizing about Genre and Cybergenre*, Computer Resources for Language Learning
- Callicot, J Baird and Richard Froderman, 2009, *Encyclopedia of Environment and Philosophy Ethics*, Mc Millan Reference, USA
- Coedes, George, Louis Charles Damais, Hermann Kulke, dan Pierre Yves Manguin, 2014, *Kedatuan Sriwijaya*, edisi kedua, Pusat Arkeologi Nasional, Komunitas Bambu, Jakarta
- Cresswell, W, John. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publications, Inc.
- Cox, Robert, 2010, *Environment Communication and Public Sphere, Second Edition*, Sage Publications, USA
- Conklin, Harold, 1963, *The Study of Shifting Cultivation*, Washington DC.
- Cooper, Richard N, 1999, *Kebijakan Lingkungan dan Sumber Daya bagi Ekonomi Dunia*, Rosda Karya, Bandung
- Dewi, Saras. 2015, *Ekofenomenologi, Mengurai Disekuilibrium Relasi Manusia dengan Alam*, Margin Kiri, Jakarta
- Dietz, Thomas dan Amy Fitzgerald, Rachael Shwom, 2005, *Environmental Values*, Annual Review of Environment and Resources, November 2005
- Dwyer, Peter D, 2005, *Ethnoclasification, Ethnoecology and Imaginations*, Journal de la Societe des Oceanistes, Volume 1 No. 2
- Eckersley, Robin, 1992, *Environmental and Political Theory, Toward Ecocentric Approach*, State University of Newyork Press
- Fathoni A. 2005. *Antropologi Sosial Budaya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Flor, Alexander G, 2004, *Environmental Communication : Principles, Approaches and Strategies of Communication, Applied to Environmental Management*, University of the Philippines.
- Gratani, Monica, Stephen G Sutton, James Buttler, Erin Bohensky, dan Simon Foale., 2016, *Indigenous Environmental Values as Human Values*, Cogent Social Science, Volume 2
- Geertz, Clifford. 2016, *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta

- Gibbon, D. and Pain, A. (1985). *Crops of the drier regions of the tropics*. International Tropical Agriculture Science. Longman London
- Hardiansyah, 2012, *Filsafat Sebagai Pencegah Kerusakan Lingkungan*, Jurnal Substantia, Volume 14 Nomor 2.
- Huberman, A. Michael & Miles B. Matthew. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penj. Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Ida, Rahma, 2001, *Analisis Isi Kualitatif, Ragam Penelitian Isi Media, Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Idang, Gabriel., 2015, *African Culture and Values*, Phronimon Journal, volume 16, Nomor 2.
- I Iaen, Nora, 1999, *The Power of Environmental Knowledge*, dalam Journal of Human Ecology, Volume 27 Nomor 3
- Iskandar, Johan, 2001, *Manusia, Budaya dan Lingkungan, Kajian Ekologi Manusia*, Humaniora Press, Bandung
- , 2009, *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*, Program Magister Ilmu Lingkungan, UNPAD Press, Bandung
- , 2012, *Etnobiologi dan Pembangunan Berkelanjutan*, Puslitbang KPK LPPM, Unpad, Bandung
- , 2012, *Ekologi Perladangan Orang Baduy, Pengelolaan Hutan Berbasis Adat secara Berkelanjutan*, Penerbit Alumni, Bandung
- Jurin, Richard, Donny Roush, and Jeff Danter., 2010, *Environmental Communications, Skill and Principles for Natural Resources Managers, Scientist, and Engineer*, Springer Doerdrecht Heidelberg, Newyork London.
- Keraf, A Sonny, 2002, *Etika Lingkungan*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- , 2014, *Filsafat Lingkungan Hidup*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Kilbourne, William, 1995, *Green Advertising, Salvation or Oxymoron*, Journal of Advertising, Volume 24 Issue 2
- Krier, Rob, 1979, *Urban Space*, Umbau Verlag, Puschel
- Lahajir, 2001, *Etnoekologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Linggang*, Galang Press, Yogyakarta

- Lay, Cornelis, 2007, *Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia*, Jurnal Studi Sosial Politik, Volume 11 No 2
- Lewis, Diane, 1973, *Antropology and Colonialism*, Current Antropology, Volume 14, Number 5
- Leopold, Aldo, 1949, *A Sand County Almanac, Skecthes Here and There*, Oxford University Press, Oxford Newyork.
- Lesson, Peter T, Christopher Coyne and Peter Boettke, 2006, *The New Comparative Political Economy*, Review of Austrian Economic, Springer
- Li, Tania Murray, 2012, *The Will to Improve, Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*, diterjemahkan oleh Hery Santoso dan Pujo Semedi, Penerbit Marjin Kiri, Jakarta
- Littlejohn, Stephen W. 1996. *Theories of Human Communication*. USA: Wadsworth Publising Company
- Maryoto, Andreas, 2009, *Jejak Pangan, Sejarah, Silang Budaya dan Masa Depan*, Penerbit Kompas, Jakarta
- Merchant, Caroline, 1992, *Radical Ecology*, Psycology Press
- Muljana, Slamet. 2008, *Sriwijaya*, LkiS, Yogyakarta
- M Santun, Dedi Irwanto, Murni dan Supriyanto, 2010, *Iliran dan Uluan, Dinamika dan Dikotomi Sejarah Palembang*, Eja Publisher, Yogyakarta
- Mufid, Muhammad, 2010, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Mulyana, Deddy dan Solatun (ed.). 2007. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosda
- Mulyana, Deddy, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosda Karya
- , 2002. *Ilmu Komunikasi: suatu Pengantar*. Bandung: Rosda Karya
- Munoz, Paul Michel, 2009, *Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia*, Penerbit Mitra Abadi, Yogyakarta.
- Naess, Arne and David Rotherberg, 2001, *Ecology, Community and Lifestyle*, Cambridge University Press, UK

- Nurhayati, Lestari, 2011, *Kesenjangan dan Kearifan Lokal pada Komunikasi Lingkungan*, Konferensi Komunikasi Nasional “Membumikan Ilmu Komunikasi di Indonesia” Depok, 9-10 November 2011, Jawa Barat
- Obidzinski, Andriani, Komarudin dan Andrianto, 2012, *Can Large Scale Land Acquisition for Agro Development in Indonesia be Manage Sustainability*, Land Use Policy
- Oksana, M. Irfan dan M. Utiyal Huda, 2012, *Pengaruh Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap sifat Kimia Tanah*, Jurnal Agroteknologi, Volume 3 Nomor 1
- Pillman, Werner, 2002, *Environmental Communication, Systems Analysis of Environmentally Related Information Flows as a Basis for the Popularization of the Framework for Sustainable Development*, Vienna, International Society for Environmental Protection
- Possey, Darel Adyson, ed., 1999, *Cultural and Spiritual Values of Diversity*, UNDP Programme
- Puri, Rajindra K, 2005, *Deadly Dances in The Bornean Rainforest, Hunting Knowledge of the Penan Benalui*, KITLV Press, Leiden.
- Purser, Ronald E, Changkil Park, and Alfonso Montuori, 1995, *Limits to Anthropocentrism: Toward an Ecocentric Organization Paradigm?*, Academy Management Review, Volume 20 No 4.
- Ricklef, M, 2005, *Sejarah Indonesia Modern*, Serambi Ilmu, Jakarta
- Rambo, A Terry dan Percy Sajise (ed.), 1984, *An Introduction to Human Ecology Research on Agricultural Systems in Southeast Asia*, University of the Philippines, University Publication Program, College, Laguna, Philippines
- Rahardjo, Wahyu, 2006, *Hubungan Manusia dengan Lingkungan*, Jurnal Penelitian Psikologi, No. 2, Volume 11.
- Rangkuti, Nurhadi, 2017, *Teluk Cengal, Lokasi Bandar Sriwijaya*, Makalah pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi XIV, 24-27 Juli 2017, Bogor.
- Saleh, Edward, 2010, *Studi Konflik Air Irigasi dan Alternatif Penyelesaiannya di Daerah Irigasi Kelingi, Sumatera Selatan*, Jurnal Keteknik Pertanian, IPB
- Santun, Dedi M., Murni dan Supriyanto, 2010, *Iliran dan Uluan, Dinamika dan Dikotomi Sejarah Palembang*, Eja Publisher, Yogyakarta

- , 2012, *Tafsir Kepemimpinan Ideal Dapunta Hyang Srijayanasa*, Jurnal Jurnal Mozaik, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, Volume 11 Nomor 1
- Sarre, Phillips, 1995, *Toward Global Environmental Values, Lesso from western and estern*, Environment Society, London
- Senecah, Susan L, ed., 2004, *The Environmental Communication Year Book*, New Jersey, London, Lawrence Ehlbaum Associates Publisher
- Schroeder DC. (2011) Viruses of seaweeds. In: Hurst C (ed). *Studies in Viral Ecology: Microbial and Botanical Host Systems*. Wiley-Blackwell: New Jersey
- Sholeh, Kabib, 2017, *Prasasti Talang Tuo Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Sebagai Materi Ajar Sejarah Indonesia Di Sekolah Menengah Atas*, Jurnal Historia, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017
- Sita, Rai, 2014, *Pertarungan Kuasa dan Legitimasi Klaim atas Sumber Daya Hutan*, Tesis, Sekolah Pascasarjana, IPB
- Soekamto, Soerjono, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta
- Soetarno dan Ahmad Dwi Setyawan, 2015, *Biodiversitas Indonesia, Penurunan dan Upaya Pengelolaan Untuk Menjamin Kemandirian Bangsa*, Prosiding Seminar Nasional Biodiversity, 2015
- Soemarwoto, Otto, 2004. *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- , 2004. *Problematik Pelik Kesetaraan Pembangunan Desa-Kota*, Makalah untuk Seminar Sehari Peringatan Hari Habitat Indonesia, Yogyakarta, 4 Oktober 2004.
- , 2008. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Soerjani, M. 2000. *Perkembangan kependudukan dan pengelolaan sumber daya alam: Pembangunan berkelanjutan dalam otonomi daerah*. Jakarta: Yayasan Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan
- Shrivastava, Paul, 1995, *The role of corporations in Achieving Ecological Sustainability*, The Academy of Management Review, Volume 20 No 4
- Sukenti, Kurniasih, 2000, *Kearifan Lokal Dan Perannya Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan: Suatu Kajian Terhadap Budaya Dan Masyarakat Jawa*, Jurnal Pijar MIPA, Volume 3 no. 1.

- Sudarwani, Margareta Maria dan Yohanes Dicky Ekaputra, 2012, *Konservasi Lahan Kritis Untuk Pertanian Produktif Dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Di Kecamatan Gunungpati Semarang*, Prosiding SNST ke 3 Tahun 2012
- Sutiarani, Hasny dan Fitri Rahmafritria, 2015, *Dampak Keberadaan Dusun Bambu Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua*, PS Manajemen Resort dan Leisure, UPI, Bandung
- Sulistiyono, Singgih, ?, *Sumber Daya Pangan Bahari Dalam Perspektif Sejarah*.
- Susilo, Rakhmad K Dwi, 2004, *Sosiologi Lingkungan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Tahyudin, Didi, 2016, *Resolusi Konflik Pertanahan Masyarakat di Kawasan Suaka Margasatwa*, Program Doktor Ilmu Lingkungan, Universitas Sriwijaya
- Thompson, Suzane C Cagnon and Michelle A Burton, 1994, *Ecocentric and Antropocentric Attitudes toward the Environment*, Journal of Environment Psychology, Volume 14 Issue 2
- Tucker, Mary Evelin and John Grim, 2013, *Ecology and Religion*, Island Press, Washington DC.
- Wahyudin dan Sudin Panjaitan, 2013, *Perbandingan Sistem Agroforestry, Monokultur Intensif, Dan Monokultur Konvensional Dalam Pembangunan Hutan Tanaman Sengon*, Prosiding Seminar Agroforestry.
- Yazidi, Ahmad, ?, *Penulisan Aksara dari Bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia*, Program Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pakuan, Bogor
- Yenrizal, 2010, *Upah Tanah Ala Muara Merang*, HU Sriwijaya Post, 29 Agustus 2010
- , 2015, *Komunikasi Lingkungan Petani Pedesaan, Studi Etnoekologi Komunikasi Masyarakat di Semende Darat Tengah, Muara Enim, Sumatera Selatan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung
- , 2017, *Lestarikan Bumi dengan Komunikasi Lingkungan*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- , 2018, *Makna Lingkungan Hidup di Masa Sriwijaya: Analisis Isi pada Prasasti Talang Tuwo*, Jurnal Aspikom, Vol 3, No 5 (2018): Juli 2018
- Yuliati, 2014, *Kejayaan Indonesia Sebagai Daerah Maritim*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Tahun 27 nomor 2.



## Biodata Singkat Penulis



**Dr. Yenrizal, M.Si.** Lahir di Talu (Sumbar) 23 Januari 1974 silam, merupakan akademisi yang khusus mendalami bidang komunikasi lingkungan, sebuah kajian yang tergolong langka untuk disiplin ilmu komunikasi. Pendidikan S-1 ditamatkan di FISIP Universitas Sriwijaya, kemudian menyelesaikan S-2 Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran, Bandung. Studi S-3 (Doktor) juga ditamatkan di Unpad dengan predikat kelulusan *Cumlaude*. Disertasi yang diselesaikan berhasil memunculkan sebuah konsep baru dalam ilmu komunikasi yang disebut *Etnoekologi Komunikasi*. Tahun 2015, penulis berkesempatan mengikuti program *Utrecht Summer School di Utrecht University, Netherland*. Saat ini penulis aktif sebagai dosen

tetap di FISIP UIN Raden Fatah Palembang, khususnya Prodi Ilmu Komunikasi. Buku yang pernah diterbitkan adalah “Konstruksi Wartawan tentang Berita Lingkungan Hidup” (2015) dan “Lestarkan Bumi dengan Komunikasi Lingkungan” (2017). Kesehariannya, penulis aktif sebagai peneliti komunikasi dan sosial budaya, khususnya berkaitan dengan aspek lingkungan. Hasil kajian, telaahan, riset, yang sudah dilakukannya, banyak yang dipublikasikan di berbagai media, baik media massa cetak/elektronik, termasuk melalui Jurnal Ilmiah yang baik berskala internasional maupun akreditasi nasional. Di media massa cetak, penulis sudah aktif menulis sejak tahun 1995 hingga sekarang. Selain itu, penulis juga aktif dalam penulisan buku bersama, menjadi narasumber dalam berbagai forum ilmiah, terutama berkaitan dengan kajian lingkungan. Penulis saat ini juga terlibat sebagai Wakil Koordinator Tim Restorasi Gambut (TRG) Sumatera Selatan, pengelola [www.sriwijayapeat.org](http://www.sriwijayapeat.org), Dewan Pakar ASPIKOM Sumsel dan Ketua Bidang Keilmuan ISKI Sumsel.



Sejarah sudah mencatat bahwa kejayaan leluhur masyarakat bumi Sriwijaya adalah cerminan kearifan mereka dalam mengelola alam semesta ini. Alam raya adalah guruku, kiranya menjadi slogan kongkrit bahwa semesta ini bukan hanya milik manusia, tapi punya semua makhluk yang hidup didalamnya. Prasasti Talang Tuwo yang dibuat semasa Dapunta Hyang, 684 M lalu, sudah berbicara secara lugas dan jelas tentang keserasian yang harus dibangun antara manusia dengan lingkungannya. Di saat segalanya masih serba asri, serba hijau, air yang mengalir jernih, hewan yang berkeliaran bebas, dan pepohonan yang masih berdiri gagah, Sang Baginda Sri Jayanasa sudah mencanangkan gagasan pembuatan taman. Sriksetra, demikianlah nama yang diberikan, sebuah taman yang tujuan utamanya adalah untuk kemakmuran semua makhluk.

Apa yang digagas oleh Sriwijaya ribuan tahun lalu, diyakini kemudian memiliki relevansi strategis dengan kondisi kekinian. Begitu banyak bencana terjadi, menghancurkan kehidupan, menggilas peradaban, semua adalah karena pengingkaran terhadap petuah para *Puyang*. Disinilah makna penting Prasasti Talang Tuwo yang memiliki relevansi terhadap apa yang terjadi belakangan ini.

Buku ini membahas semua itu, terutama nilai-nilai penting pada Prasasti Talang Tuwo yang bermuatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Mengambil sudut pandang Komunikasi Lingkungan dengan menggunakan kerangka analisis wacana, diharapkan ini bisa menjadi sebuah pemahaman bagi kita semua bahwa leluhur sudah pernah mengingatkan itu semua. Sebagai referensi ataupun sebagai pembuka wawasan yang berbeda, diharapkan buku ini bisa bermanfaat untuk siapa saja yang peduli dengan lingkungan hidup, baik itu penggiat lingkungan, pelaku kebijakan, mahasiswa, dosen, dan siapapun itu. Semoga jadi kemaslahatan bersama.



FISIP

ISBN 978-602-5471-99-5



9 78-602-5471-99-5

**RAFAH**press

UNIVERSITAS ISLAM RADEN FATAH PALEMBANG

Ayamak :  
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fatah No. 01 Km. 0,5  
Palembang Sumatera Selatan 30170  
Telp. 0711 5596950  
Email: rafahpress2018@gmail.com